



ILMU SOSIAL DASAR

Dr. Lue Sudiyono, MM
Yulia Palupi, M.Pd

ILMU SOSIAL DASAR

Penulis:

Dr. Lue Sudioyono, MM
Yulia Palupi, M.Pd

Desain Sampul:

Jeky Melkianus, M.Si

Setting & Layout:

Ismalik Perwira Atmaja, ST, M.Pd

Cetakan Pertama, Desember 2016

ISBN: 978-602-73684-1-5

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak Karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis
dari Penulis dan Penerbit

Penerbit:

KALIWANGI OFFSET
Jl. Monumen Yogya Kembali 93 Yogyakarta
Telp. (0274) 566307

Karya ini dipersembahkan kepada Orang Tua kami yang telah Membesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga serta suami kami tersayang, dan anak-anak kami demikian juga kepada IKIP - PGRI Wates serta teman-teman sejawat.

Mereka telah menerangi hidup kami dan memberikan inspirasi dalam berkarya untuk negeri dan bangsa

PRAKATA

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh masyarakat.

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayat, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Dunia pendidikan masa depan memang dituntut untuk lebih dekat lagi dengan realitas dan permasalahan hidup yang tengah menghimpit masyarakat. ungkapan *school is mirror society* (sekolah / lembaga pendidikan adalah cerminan masyarakat) seyogyanya benar-benar mewarnai proses pendidikan yang sedang berlangsung. sebagai konsekuensinya, pendidikan harus ikut berperan aktif dalam memecahkan *problem social*.

Ilmu sosial dasar sangat penting dalam suatu rangkaian pengetahuan mengenai aspek – aspek yang paling mendasar dan menonjol di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki budaya dan permasalahan – permasalahan yan adadi masyarakat.

Aspek lain dari pengantar ilmu sosial dasar merupakan pengenalan teori - teori ilmu sosial dan kebudayaan sehingga diekspektasikan seseorang dapat memiliki wawasan keilmuan yang bersifat multidipsliner yang bersangkutan dengan keagamaan, kesetaraan , dan manusia di dalam kehidupan bersosialisasi.

Secara umum, ilmu sosial dasar bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan sebagai makhluk budaya (*homo humanus*), sehingga mampu menghadapi secara kritis dan berwawasan luas masalah mengenai sosial budaya dan permasalahan lingkungan sosial budaya, serta dapat menyelesaikannya dengan baik, tujuan umum ilmu sosial dasar ada beberapa yaitu yang pertama pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya, yang kedua kemampuan seseorang menanggapi secara kritis dan berwawasan luas terhadap permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan sosial budaya, dan yang terakhir ketiga adalah kemampuan di dalam menyelesaikan secara baik, bijaksana dan obyektif permasalahan – permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum kita harus memahami konsep – konsep dasar mengenai manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki daya kritis, wawasan yang luas terhadap permasalahan lingkungan sosial budaya.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan terima kasih kepada semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini membantu perkembangan wawasan pemikiran yang lebih luas dan mempunyai kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan masyarakat Indonesia khususnya berkenan dengan sikap dan tingkah laku serta pola pikir manusia dalam relasinya antar sesama, tentunya buku ini masih mengalami kekurangan, dan akan diperbaiki jika ada perkembangan informasi yang lebih otentik lagi.

Yogyakarta, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I ILMU SOSIAL DASAR

A. Ilmu Sosial Dasar Sebagai Komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian	1
B. Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial Dasar	2
C. Tujuan Ilmu Sosial Dasar	5
D. Masalah-Masalah Sosial Dan Ilmu Sosial Dasar	6
E. Ke Arah Paradigma Ilmu Sosial Dasar	9

BAB II TEORI ILMU SOSIAL DAN REALITAS SOSIAL

A. Logika Sosial	19
B. Pemikiran Tokoh Ilmu Sosial dan Realitas Sosial	26
C. Pengantar Ilmu Sosial dan Realita Sosial	50
D. Refleksi Atas Realita Sosial	88
E. Involusi Etika Sosial Masyarakat	108

BAB III PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI

A. Definisi Desa dan Kecamatan	118
B. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat	120
C. Demokrasi dan Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani	124
D. Masyarakat Madani (Civil Society)	126

BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian negara	129
B. Pengertian Konstitusi	130
C. Tujuan dan Nilai Konstitusi	134
D. Kedudukan Konstitusi	135

E. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi	136
F. Sikap Positif Hidup Konstitusi Negara	137

BAB V SISTEM POLITIK DAN BUDAYA POLITIK

A. Sistem Politik	139
B. Pengertian Sistem Politik	140
C. Budaya Politik	143

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara dan Penduduk	146
B. Asas dalam Kewarganegaraan	148
C. Hak dan Kewajiban WNI	149

BAB VII HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Hukum dan Penegakan Hukum	153
B. Macam-macam Hukum	154
C. Konsep Peraturan Hukum	157
D. Lembaga Penegak Hukum	159

BAB VIII PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

A. Pelapisan Sosial	162
B. Kelas Sebagai Dimensi Pelapisan Sosial	164
C. Kelompok Kedudukan sebagai Dimensi	167
D. Teori Fungsional	169
E. Elite, Masyarakat, dan Kesamaan Derajat	170

BAB XI AGAMA DAN MASYARAKAT

A. Fungsi Agama	180
B. Pelembagaan Agama	186
C. Agama, Konflik dan Integrasi	190

DAFTAR PUSTAKA	194
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS	200
------------------------------	------------

BAB I

ILMU SOSIAL DASAR

A. Ilmu Sosial Dasar Sebagai Komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Menghadapi masalah- masalah dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, demikian pula untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan negara, maka diselenggarakan program-program pendidikan umum.

Tujuan pendidikan umum di perguruan tinggi ialah :

1. Sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama.
2. Untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan- kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat.
3. Memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner, dan mampu memahami pikiran ahli berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi.

Jadi, pendidikan umum yang menitikberatkan pada usaha untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa, pada dasarnya berbeda dengan mata kuliah- mata kuliah bantu yang bertujuan untuk menunjang keahlian mahasiswa dalam disiplin ilmunya. Demikian pula berbeda dengan pendidikan keahlian yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang atau disiplin ilmunya.

Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh universitas dan institut kemudian terkenal dengan nama “mata kuliah pengembangan kepribadian”, atau disingkat MKPK yang terdiri dari 6 mata Kuliah, yaitu :

1. Agama,
2. Pancasila,
3. Kewiraan,
4. Ilmu Budaya Dasar (IBD),
5. Ilmu Sosial Dasar (ISD), dan
6. Ilmu Alamiyah Dasar (IAD).

Tujuan MKPK adalah untuk menghasilkan warga negara sarjana yang berkualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengalaman nilai- nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi, mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia.
- b. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
- c. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, maupun pertahanan keamanan.
- d. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat, dan secara bersama- sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun di lingkungan alamiah, dan secara bersama- sama berperan serta di dalam pelestariannya.

B. Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial Dasar

Latar belakang diberikannya Ilmu Sosial Dasar (ISD), adalah banyaknya kritik yang ditujukan kepada sistem pendidikan di Perguruan Tinggi oleh sejumlah cendekiawan, terutama sarjana pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Mereka menganggap sistem pendidikan yang sedang berlangsung ini berbau kolonial dan masih merupakan warisan sistem pendidikan pemerintah Belanda, yaitu kelanjutan dari “politik balas budi” (*etische politiek*) yang

dianjurkan oleh Conrad Theodore van Deventer. Sistem ini bertujuan menghasilkan tenaga- tenaga yang terampil untuk menjadi “tukang- tukang” yang mengisi birokrasi mereka di bidang administrasi, perdagangan, teknik dan keahlian lain dengan tujuan eksploitasi kekayaan negara.

Ternyata sekarang masih dirasakan banyaknya tenaga ahli yang berpengetahuan keahlian secara khusus dan mendalam (spesialisasi), sehingga wawasannya sempit. Padahal sumbangan pemikiran dan adanya komunikasi ilmiah antar disiplin ilmu diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat yang demikian kompleks. Sering suatu masalah terasa tuntas pemecahannya menurut suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi ternyata bagi disiplin ilmu yang lain masih merupakan masalah besar.

Hal ini ialah sistem pendidikan kita menjadi sesuatu yang “elite” bagi masyarakat kita sendiri, kurang akrab dengan lingkungan masyarakat, tidak mengenali dimensi- dimensi lain di luar disiplin keilmuannya. Perguruan Tinggi seolah- olah menara gading yang banyak menghasilkan sarjana- sarjana “tukang”, tidak atau kurang peka terhadap denyut kehidupan, kebutuhan, suatu perkembangan masyarakat. Sebagai upaya mengatasi kegusaran para cendekiawan terserbut, diberikanlah ilmu sosial dasar sebagai pelengkap pembentukan sarjana paripurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam peragaan kuliahnya mempunyai ciri- ciri tersendiri, banyak menyangkut “problem oriented” yang dirasakan dan nyata di masyarakat.

Tenaga ahli yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan memiliki tiga jenis kemampuan yang meliputi personal, akademis, dan kemampuan profesional.

Kemampuan personal adalah kemampuan kepribadian. Dengan kemampuan ini para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai- nilai keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan (Pancasila), serta memiliki pandangan yang luas

dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan akademis adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis, maupun berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis, memiliki kemampuan konseptual untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi, serta mampu menawarkan alternatif pemecahan. Kemampuan profesional adalah kemampuan dalam bidang profesi tenaga ahli yang bersangkutan. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang profesinya.

Kemampuan personal ditanamkan kepada para mahasiswa sebagai calon tenaga ahli melalui program pendidikan umum atau yang lazim disebut mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK).

Program pendidikan umum berusaha untuk memperluas cakrawala perhatian dan pengetahuan para mahasiswa sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan keahlian serta golongan asal masing- masing. Ia membantu mahasiswa menemukan diri sendiri dan menempatkan diri dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang sedang berlangsung, menghadapkannya dengan masalah- masalah susila yang secara sadar ataupun tidak sadar, senantiasa dihadapi, serta masalah- masalah yang diwujudkan oleh kenyataan- kenyataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Disamping itu juga memberikan pengertian kepada mereka mengenai hubungan kait- mengait dari ilmu pengetahuan. Singkatnya, program- program pendidikan umum diharapkan menjadikan mahasiswa lebih peka dan lebih terbuka, disertai rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Ilmu sosial dasar, sebagai bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, mempunyai tema pokok perkuliahan, yaitu hubungan timbal- balik antara manusia dan lingkungannya. Hubungan ini dapat mewujudkan berbagai ilmu sosial dasar dengan memanfaatkan pengetahuan yang berasal

dari lapangan ilmu- ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi sosial, dan sejarah.

Ilmu sosial dasar sebagaimana halnya dengan ilmu budaya dan ilmu alamiah dasar, bukanlah pengantar suatu bidang keahlian (disiplin) ilmu- ilmu sosial tertentu. Tidak seperti pengantar ilmu politik, pengantar pengertian-pengertian (fakta, konsep, teori) yang berasal dari berbagai bidang keahlian itu untuk menganggapi masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Adapun yang menjadi sasaran perhatian antara lain:

1. Berbagai kenyataan yang bersama-sama merupakan masalah sosial yang dapat ditanggapi dengan pendekatan sendiri maupun sebagai pendekatan gabungan (antar bidang).
2. Adanya keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial lain dalam masyarakat, yang masing-masing mempunyai kepentingan kebutuhan serta pola-pola pemikiran dan pola-pola tingkah laku sendiri, tapi juga amat banyaknya persamaan kepentingan kebutuhan serta persamaan dalam pola-pola tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan-pertentangan maupun hubungan setia kawan dan kerja sama dalam masyarakat kita.

Tegasnya, mata kuliah ilmu sosial dasar adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial agar daya tanggap, persepsi, dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan sosialnya menjadi lebih besar.

C. Tujuan Ilmu Sosial Dasar

Sebagai suatu mata kuliah dasar umum, ilmu sosial dasar bertujuan membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas, dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar Indonesia, khususnya

berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lain, serta sikap dan tingkah laku manusia-manusia terhadap manusia yang bersangkutan.

D. Masalah-Masalah Sosial Dan Ilmu Dasar Sosial

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan kepada masalah sosial yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. masalah sosial ini tidaklah sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan kebudayaannya, sifat kependudukannya, dan keadaan lingkungan alamnya.

Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong kedalam ilmusosial dasar telah mempelajari hakikat masyarakat dengan perspektif yang berbeda-beda. maka terdapat keanekaragaman dalam melihat dan mempelajarinya.

Hal ini disadari oleh Nisbet (1961), bahwa cara-cara untuk melihat masyarakat dan memahaminya hampir dapat dikatakan tidak ada batasnya. Masyarakat dapat dilihat menurut nilai-nilai dominannya, hasil-hasil teknologinya, pranata-pranatanya yang utama, ataupun sistem-sistem spiritual dan intelektualnya.

a. Masalah-masalah Sosial

Masalah-masalah sosial merupakan hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. pemecahannya menggunakan cara-cara yang diketahuinya dan yang berlaku, tetapi aplikasinya menghadapi kenyataan hal yang biasanya berlaku telah berubah, atau terhambat pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, masalah moral, masalah ekonomi, masalah agama, atau masalah-masalah lainnya.

Yang membedakan masalah satu dengan masalah lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat

dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata sosial, serta ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia terwujud (Nisbet, 1961). Pengertian masalah sosial memiliki dua pendefinisian: *pertama*, pendefinisian menurut umum, *kedua*, menurut para ahli. Menurut umum atau warga masyarakat, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum adalah masalah sosial. menurut para ahli, masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi, mempunyai sifat yang menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.

Contoh, masalah pedagang kaki lima. Menurut definisi umum, pedagang kaki lima bukan masalah sosial karena merupakan upaya mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan pelayanan bagi warga masyarakat pada taraf ekonomi tertentu. sebaliknya para ahli perencanaan kota menyatakan pedagang kaki lima sebagai sumber kekacauan kecelakaan lalu lintas dan peluang kejahatan. Oleh karena itu batasan yang lebih tegas dikemukakan oleh Leslie (1974) yang disitir oleh Parsudi (1981), bahwa masalah-masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh kepada kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, oleh karena itu dirasakan perlunya untuk diatasi dan diperbaiki. Batasan masalah sosial sebenarnya agak rumit, mengingat masalah sosial berkaitan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Cohen (1964) bahwa masalah sosial adalah terbatas pada masalah-masalah keluarga, kelompok, atau tingkah laku individual yang menuntut adanya campur tangan dari masyarakat yang teratur agar masyarakat dapat meneruskan fungsinya. Jadi, masalah sosial adalah suatu cara bertingkah laku yang dapat dipandang sebagai tingkah laku yang menentang satu atau beberapa norma yang disepakati bersama oleh warga masyarakat. Batasan ini masih mengandung aspek objektif dan subjektif. Tetapi yang jelas, tidak ada satu pun tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai suatu masalah sosial apabila tidak dianggap sebagai penyimpangan secara moral dan norma-

norma masyarakat yang telah diterima secara umum. Contohnya kasus kemiskinan di negara Barat sebelumnya merupakan suatu kondisi yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak dapat dihindari. Tetapi kemudian karena kondisi kemiskinan ini mempengaruhi kepentingan orang banyak, misalnya karena lingkungan menjadi tidak sehat, maka kemudian dianggap sebagai masalah sosial.

Kepekaan akan adanya masalah-masalah sosial biasanya dimulai oleh para ahli, para cendekiawan, pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan oleh warga masyarakat yang langsung merasakan akibat-akibat yang merugikan dan kondisi objektif yang ada tersebut. Kondisi yang ada di situ menjadi masalah-masalah sosial kalau dapat mempengaruhi sebagian besar warganya.

b. Kebudayaan, Masyarakat, dan Masalah-masalah Sosial

Kebudayaan, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan sosial manusia, atau sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia”. Sedangkan masyarakat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yang didalamnya tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia diwujudkan. Dalam masyarakat manusia mengembangkan kebudayaannya. Ada yang diterima dan ada yang tidak, atau diterima secara selektif karena berkenaan dengan nilai-nilai moral dan estetika, sistem-sistem penggolongan, benda-benda, berbagai hal lainnya yang diperlukan hidupnya. Kesemuanya merupakan masalah sosial, yang didalamnya masyarakat berada dalam suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang cepat, seperti yang terjadi dalam masyarakat industri dengan teknologinya.

c. Ilmu Sosial Dasar dan Masalah-Masalah Sosial

Ilmu sosial dasar bukanlah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah suatu pengetahuan

mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan masalah-masalah yang terwujud daripadanya.

Ilmu sosial dasar, sebagai suatu mata kuliah, menyajikan suatu pemahaman mengenai suatu hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Masalah dilihat dengan kerangka pendekatan yang melihat sasaran studinya sebagai suatu masalah objektif, dan yang dilihat juga dengan kacamata subjectif (Parsudi Suparlan, 1981). diharapkan gabungan kacamata objectif dan subjectif ini akan mewujudkan kepekaan mengenai masalah sosial yang disertai dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepribadian yang kuat dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat ilmiah, warga masyarakat dan negara Indonesia.

E. Kearah Paradigma Ilmu Sosial Dasar

Ilmu sosial dasar yang sasaran studinya masalah objektif dan dilihat dengan kacamata subjectif, perlu disertai dengan tanggung jawab ilmiah. Untuk menjamin landasan tersebut diperlukan suatu paradigma ilmu sosial dasar. Paradigma menurut Thomas Kuhn dalam karyanya, *The Structure of Scientific Revolution* (1962), mdenawarkan suatu cara yang bermanfaat dalam mempelajari suatu disiplin ilmu sosial, bertujuan menantang asumsi yang berlaku umum dikalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab umumnya ilmuwan berpendirian, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif. ini dibuktikan oleh buku teks yang memberikan kesan yang sama, bahwa ilmu berkembang kumulatif. Menurut Kuhn, mitos ini perlu dihilangkan, sebab ilmu pengetahuan itu terjadi secara revolusi. model perkembangannya sebagai berikut:

Paradigma I

Hasil usaha masyarakat ilmu baik secara terpisah maupun terorganisasi, mengawali pembentukan suatu ilmu, yang akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada suatu paradigma tunggal yang dianut oleh masyarakat ilmiah. Merupakan pandangan yang

mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu. Suatu paradigma terdiri dari asumsi-asumsi teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah.

Normal Science (Ilmu biasa)

Periode ilmu biasa, ditandai oleh akumulasi ilmu pengetahuan. Saat ini ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh, sebagai usaha mempertanggungjawabkan dan menjabarkan perilaku beberapa aspek yang relevan dengan dunia nyata sebagaimana yang diperoleh dari hasil eksperimen.

Anomali (Penyimpangan-penyimpangan)

Pada saat ilmu biasa, bisa sampai keadaan dimana ilmuwan-ilmuwan tidak dapat menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan. Dalam keadaan demikian, terjadi kesulitan dan dijumpai *falsifikasi* (pemalsuan). Paradigma ! tidak mampu memberikan penjelasan terhadap persoalan yang timbul secara memadai.

Krisis Ilmu Pengetahuan

Setelah bebas dari kesulitan atau penyimpangan (anomali), maka timbul krisis ilmu pengetahuan, dalam arti penyimpangannya sudah memuncak. Pada saat ini paradigma sudah mulai disangsikan validitasnya. Bila krisis sudah demikian seriusnya, maka timbul revolusi. krisis ini teratasi apabila lahir paradigma yang baru sepenuhnya dengan menari banyak kepercayaan para ilmuwan sampai akhirnya paradigma orisinal yang telah menimbulkan problem itu dilepaskannya.

Revolusi Ilmiah

Pada periode ini, terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan terus menerus. Paradigma yang baru penuh janji dan tidak terkecung oleh kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi, kemudian membimbing aktivitas ilmiah yang baru mulai dari normal, anomali, krisis baru dan diikuti oleh revolusi baru.

Jadi, paradigma merupakan terminologi pokok dalam model perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu sosial dasar yang menjamah tema-tema ilmu sosial, dengan sendirinya harus lebih jelas paradigmanya, atau mungkin sebaliknya, bertambah “ruwet” sebab kajian yang interdisipliner menyebabkan *anomalies*.

Dalam paradigma ilmu sosial dasar terdapat unsur *exemplar*, yaitu hasil penerimaan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum (*one sort element in that constellation the basic social science paradigm*), demikian menurut konsep Kuhn. Menurut Kuhn, paradigma ilmu sosial masih dalam tahap preparadigmatik, sebab pengetahuan mengenai manusia tidaklah semudah dalam ilmu alam. Faktanya tidak selalu tergantung kepada suatu konteks teori, dan juga tidak selalu mengandung logika pencarian yang dapat dirumuskan sedemikian rupa untuk memenuhi kekerasan prosedural verifikasi ilmiah. Jadi, melihat pendapat mereka masing-masing. Ilmu sosial dasar tentu memerlukan beberapa paradigma dari berbagai disiplin ilmu sosial, dan tentu cocok dengan kondisi (baca: Indonesia).

Sosiologi, menurut Ritzer (1980), didominasi oleh tiga paradigma, yaitu *fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial*. paradigma fakta sosial memusatkan perhatian kepada struktur makro masyarakat, seperti dikemukakan oleh Durkheim, fakta sosial terdiri atas dua macam:

1. Dalam bentuk material, yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Contoh : norma khusus.
2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (eksternal). fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat *intersubjective*, yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contoh: egoisme, altruisme dan opini

Fakta sosial ada dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial yang dirinci *menjadi* satu kelompok kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai keluarga, pemerintah dan sebagainya. Teori yang tergabung dalam fakta sosial ialah fungsionalis struktural (K.Merton), teori konflik (Ralp Dahrendorf), teori sistem dan teori sosiologi makro. Metode

paradigma fakta sosial penggalan datanya dilakukan menggunakan kuesioner atau *interview*.

Paradigma definisi sosial memusatkan kepada aksi dan interaksi sosial, serta fenomena sosial yang ditelorkan oleh proses berfikir. Paradigma perilaku sosial mencurahkan perhatiannya kepada tingkah laku dan perulangan tingkah laku. Ilustrasi paradigma sosiologi ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk kegiatan diskusi dalam membahas masalah-masalah sosial lainnya, sehingga tidak terkecoh dalam mengemukakan pendapat antara fakta dan ide, menganggap sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret (retifikasi). Apakah paradigma ilmu sosial dasar itu memang perlu? Kalau memperhatikan bahan kajian ilmu sosial dasar tentu perlu, mengingat ilmu sosial dasar lebih banyak berbicara tentang fakta, konsep dasar, teori dari ilmu sosial, dan masalah-masalah sosial aktual yang mengundang kepekaan.

Untuk bahan dasar dalam mengkaji atau memecahkan masalah-masalah sosial dalam mengemukakan pendapat (upaya ilmiah), baik teori maupun persepsi, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa pengertian penting sehingga jelas perbedaannya, yaitu mengenai:

1. Fenomena

Fenomena (kejadian atau gejala) adalah hasil daya tangkap indra manusia tentang masalah yang ingin diketahui, yang diabstraksikan dalam bentuk konsep-konsep.

2. Konsep

Konsep adalah suatu kata atau lambang yang luar biasa pentingnya, menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam gejala yang berbeda.

Misalnya manusia dalam sifat pribadinya berbeda, namun semuanya digolongkan kedalam kategori “binatang menyusui” atas dasar kesamaan dalam ciri-ciri biologis tertentu. Pengembangan konsep-konsep yang merupakan produk

pemikiran menghendaki dua proses : melakukan generalisasi dan abstraksi. Generalisasi adalah proses memperoleh suatu prinsip dari berbagai pengalaman. Sedangkan abstraksi mencakup hanya ciri-ciri pilihan dari gejala-gejala yang dibicarakan (Sanford Labovitz dan Robert Hagedorn, 1982). Konsep atau pengertian ialah serangkaian perangsang dengan sifat-sifat yang sama atau sebagai pola unsur-unsur bersama diantara anggota kumpulan atau rangkaian. Hakikat suatu konsep tidak terdapat didalam masing-masing anggota, tetapi didalam suatu unsur-unsur atau sifat-sifat yang terdapat pada semua anggota. Misalnya konsep benda padat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: berat, volume dan bentuknya tetap. Sifat ini merupakan ciri umum untuk semua benda padat, meskipun masing-masing anggota benda padat mempunyai cirinya sendiri. Selama proses yang terus-menerus menerima dan menginterpretasikan stimuli sensoris, otak manusia tidak henti-hentinya mengabstraksi, membentuk dan membandingkan pola, yang dikerjakan dengan baik dan secara otomatis, sehingga menyebabkan manusia dapat mempelajari konsep dan dapat menggunakan sedemikian rupa secara intuitif. Namun sering mengalami kesulitan dalam memberikan suatu deskripsi verbal yang memadai mengenai proses atau kriteria yang digunakan dalam pembentukan konsep.

Konsep mempunyai tiga dimensi, yaitu :

- a. Pengembangan secara internal pola mental yang memberikan “perasaan” kepada kita akan kemampuan untuk menguak konsep tersebut.
- b. Verbalisasi, deskripsi dan definisi pola.
- c. Pemberian nama untuk konsep

Definisi dan nama dapat dipelajari sebagai informasi yang lepas.

Kondisi khusus belajar konsep.:

- a. Renungkan arah, orientasi dan aplikasi konsep.
- b. tinjau kembali unsur prasyarat konsep
- c. Berikan rangsangan sederhana yang tepat dari unsur-unsur secara simultan.

- d. Definisi dan asosiasikan nama konsep.
- e. Asosiasi diperluas melalui berbagai contoh dan aplikasi.
- f. Pertajam kemampuan diskriminasi dengan menggunakan lebih banyak contoh yang kompleks dan realistis.
- g. Berikan latihan dan peninjauan kembali.
- h. Uji kemampuan mengamati contoh-contoh konsep, menggunakan konsep, dan menamakan konsep (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985)

3. Prinsip

Prinsip didefinisikan sebagai pola- pola antar hubungan fungsional diantara konsep- konsep. Prinsip yang pokok dan diterima dengan baik dinamakan hukum. Mempelajari prinsip adalah sama dengan mempelajari konsep. Prinsip adalah sarana penting untuk dapat, meramalkan, memecahkan masalah, dan membuat desain baru. Prinsip sangat penting untuk menyataka aadanya hubungan sebab-akibat, mempunyai daya pemindahan yang tinggi, serta mudah dipelajari dan diingat. Bila prinsip telah dikuasai dengan baik, banyak fakta dapat diperoleh daripadanya melalui induksi logis. Jika digunakan bersama-sama dengan kemampuan manusia lainnya, prinsip menjadi sarana pokok dan kaya dengan isi informasi. Kondisi khusus belajar prinsip hampir sama dengan kondisi khusus belajar konsep (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985).

4. Fakta

Fakta mengandung empat hal, yaitu:

- a. Suatu pernyataan (statement)
- b. Menggambarkan suatu gejala (fenomena) tertentu yang ditangkap panca indera.
- c. Merupakan tanggapan menurut suatu kerangka (conseptual scheme) tertentu.
- d. Dapat diuji kebenarannya atas dasar kenyataan empiris (emperically verifiable)

Fakta (sosial) berbeda dengan ide atau tafsir (sosial). Fakta sosial adalah pernyataan deskriptif yang sudah merupakan abstraksi dari kejadian-kejadian masyarakat yang kongkret. Kalau suatu fakta menjadi penyebab dari fakta lain, maka sering dipakai istilah *faktor*. Adapun kejadian-kejadian khas adalah hal yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam wujud hasil pengukuran, hal itu disebut *data* (Harsya W. Bachtiar, 1982: Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1977).

5. Proposisi/Hipotesis

Suatu proposisi/hipotesis mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Suatu pernyataan (statement) yang dianggap berlaku umum dalam kata-kata atau kalimat.
- b. Menyatakan hubungan antara dua atau lebih gejala (variabel).
- c. Dikemukakan untuk diterima atau ditolak.

6. Teori

Teori adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum, menjelaskan hakikat suatu gejala, hakikat hubungan antara dua gejala atau lebih, relevan dengan kenyataan yang ada dan operasional, alat untuk penjelasan dan pemahaman, dan dapat diverifikasi, berguna dalam meramalkan suatu kejadian (Parsudi Suparlan, 1982). Menurut Fuad Hasan dan Koentjaraningrat teori berfungsi dalam:

- a. Menyimpulkan generalisasi- generalisasi dan fakta hasil pengamatan.
- b. Memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi dari fakta-fakta yang diperoleh.
- c. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi.
- d. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan *tentang gejala-gejala* yang telah atau sedang terjadi.

Dengan demikian teori berfungsi apabila:

- a. Mempunyai konsistensi internal (susunan *konsep tidak bertentangan* satu dengan yang lainnya).
- b. Mempunyai konsistensi eksternal (mempunyai konsistensi dengan realitas yang diperoleh dengan observasi mengenai realitas tersebut).
- c. Mempunyai kekuatan untuk meramalkan suatu kejadian dan dapat diverifikasi (pembuktian).
- d. Mempunyai kekuatan generalisasi sehingga dapat menerangkan kejadian yang luas.
- e. Mempunyai sifat ringkas ilmiah (dari dua teori yang mampu menjelaskan suatu kejadian dan meramal, maka dipakai teori yang kurang kompleks).

7. Postulat

Disiplin keilmuan sering mengembangkan apa yang disebut postulat dalam menguasai teorinya. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa dituntut pembuktiannya. Dari sudut metode ilmiah postulat menyimpang dari prosedur, ibarat titik dalam lingkaran yang eksistensinya ditetapkan secara sembarang.

Dalam ilmu-ilmu sosial sukar sekali sampai pada sebuah postulat yang diterima secara universal, misalnya asas sebab-akibat dalam gejala sosial tidak disebabkan oleh satu fakta tetapi banyak fakta. Dalam ilmu sosial yang harus dianalisis adalah kondisi apa yang menyebabkan suatu jenis peristiwa itu terjadi, jawaban Ibnu Sina dan jawaban Weber berbeda. Jawaban Weber mungkin sebab sejarah dan sosiologis, sedangkan jawaban Ibnu Sina mungkin sebab Tuhan, artinya final (Harsya W. Bachtiar, 1982; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985).

8. Paradigma

Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (Ritzer, 1980). Urutan paradigma meliputi :

- a. paradigma filsafat,
- b. paradigma metafisik,
- c. paradigma sosial,
- d. paradigma operasional,
- e. construck (bentuk) paradigma: kongkret.

makin keatas paradigma ini semakin fleksibel (Harsya W. Bachtiar, 1982).

9. Persepsi

Persepsi penting dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dari segi psikologi dikatakan, bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi ada tiga komponen utama, yaitu:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan dan sebagainya. Dan interpretasi juga bergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan kedalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985). Jadi, proses persepsi adalah melakukan ,seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi.

10. Reifikasi

Reifikasi adalah pengertian dari fenomena manusia atau aktivitas manusia, sebagai fakta alam, hasil hukum alam atau

manifestasi keinginan Tuhan, sebagaimana yang oleh manusia pikirkan (Berden dan Luckmann, 1979). Sehingga, sering ada kesalahan pemikiran menganggap suatu hal yang bersifat abstrak menjadi suatu yang kongkrit. Bahkan, menginginkan segala kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lahiriah diukur secara kuantitatif. Contohnya, kepuasan akan selalu diukur dengan angka-angka statistik, kemajuan Islam hanya diukur dengan jumlah mesjid, keberhasilan KB hanya diukur dengan jumlah angka akseptor dan lain-lain.

BAB II

TEORI ILMU SOSIAL DAN REALITAS SOSIAL (SUATU PENGANTAR)

A. Logika Ilmu Sosial

Metode ilmiah atau metode ilmu sosial adalah sangat strategis untuk mengembangkan suatu pandangan atau teori ilmu sosial. Namun status ilmu sosial sering diragukan pemikirannya, dicurigai bahkan diabaikan. Di lain pihak ilmuwan sosial itu sendiri terpecah dalam suatu pendekatan penelitian akibat kekaburan dalam filsafat ilmunya. Pandangan bahwa ilmu sosial menyerupai ilmu alamiah dalam metodenya tidak mendapat tempat sebagai dasar untuk suatu kesepakatan. Tetapi akhir-akhir ini filsafat realisme mulai menggeser peran dan menjadi perspektif baru dalam metode ilmu sosial dan juga ilmu alamiah (Sayer, 1984:11). Kebenaran realisme adalah kepatuhan kepada realistik yang obyektif (teori korespondensi).

Filsafat ilmu dan metode ilmiah sangat erat hubungannya, filsafat ilmu memberi landasan bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang lebih cepat, melalui metode ilmiah yang valid (sahih). Namun perkembangan filsafat ilmu juga sekaligus memberikan banyak nuansa dalam metode atau dalam kaitannya dengan uji kebenaran (Context of justification). Ketidaktahuan dan ketidakjelasan tentang metode ilmu sosial (metode Ilmiah), menyebabkan tanggapan yang negatif atau menolak pandangan ilmu sosial. Oleh karena itu penguasaan filsafat ilmu dan metode ilmiah mutlak untuk difahami dan dihayati.

Peran Filsafat Ilmu

Filsafat diartikan secara harfiah adalah mengetahui secara mendalam atau mengakar, sehingga filsafat diartikan sebagai refleksi kritis radikal. Filsafat ilmu yang dimaksud adalah gejala pengetahuan yang dilihat sebagai obyek meterial filsafat adalah

gejala ilmu-ilmu pengetahuan sebagai salah satu bidang pengetahuan khas menurut sebab musabab terakhir. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis (Verhaak,1998;3). Ilmu pengetahuan mempunyai tiga syarat keilmuan yaitu:

1. Deduktif (ilmu-ilmu formal), adalah ilmu yang berurusan dengan simbol-simbol abstrak-abstrak. Model deduktif ingin segera menangkap susunan keniscayaan (Structure of necessity) yang mendasari segala kenyataan secara “apriori” (prius= sebelum,ilmu ini ingin mendahului adanya segala kenyataan). Cara kerja deduksi dilakukan pada ilmu pasti.Deduksi merupakan penalaran dengan kesimpulan yang wilayahnya lebih sempit daripada wilayah premisnya. Struktur keterangan ilmiahnya terdiri atas gejala yang kan diterapkan (explanandum) dan keterangan (explanans). Penjabaran kuat dinamakan “deduktif-nomologis”(DN), yang ada dua kemungkinan:

- 1) Kebenaran premis dapat dialihkan kepada kesimpulan.

Contohnya:

Premis 1: semua Angsa Putih

Premis 2: Ini Seekor Angsa

Kesimpulan : Angsa ini putih

- 2) Ketidakbenaran kesimpulan dapat dialihkan kepada premis

Contohnya :

Premis 1: Kalau hujan,maka jalan basah

Premis 2: sedang hujan

Kesimpulan: jalan tidak basah

2. Induktif (Ilmu-ilmu Empiris), Ilmu empiris sering disebut induksi atau disebut cara kerja “aposteriori”, artinya ilmu itu diperoleh setelah melalui pengalaman-pengalaman.

Pemeriksaan kesimpulan secara induktif dilakukan dengan mengambil terlebih dahulu beberapa kasus yang harus diamati, untuk kemudian disimpulkan secara umum. Kelemahan penalaran induktif meskipun premis-premisnya benar dan prosedur penarikan kesimpulannya sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar, kesimpulan mempunyai peluang benar. Logika induktif memberi kepastian namun sekedar tingkat peluang (Suriasumantri, 1987: 221).

Contoh: selama bulan oktober beberapa tahun terakhir terus hujan, namun belum tentu bulan Oktober ini.

3. Penggunaan bahasa yang tepat. Metode ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi dengan membatasi bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah mempunyai ciri-ciri:
 - a) Bebas nilai, pemerian maupun keterangan mengenai keadaan nyata tidak tunduk kepada anjuran untuk berbuat sesuatu dalam keadaan tertentu. Nilai dikuasai metode ilmiah seketat mungkin. Penilaian seakan-akan diterjemahkan ke dalam bahasa ilmiah yang diatur lebih ketat.
 - b) Sistem tertutup, artinya bahasa ilmiah diatur oleh kaidah-kaidah logis, definisi-definisi (operasional) yang tunggal artinya spesifik.
 - c) Bahasa spesifik, artinya menjernihkan bahasa dan menjadikan obyek penelitian tidak mempunyai pengertian emosional dan subyektif.

Peran filsafat ilmu pengetahuan adalah memeriksa sebab akibat dengan bertitik tolak pada gejala ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari menggali tentang kebenaran, kepastian, objektivitas dan abstraksi, instuitis serta dari mana asal dan ke mana arah pengetahuan. Pemetaan wilayah filsafat ilmu dalam lingkungan manusia, meliputi tiga jawaban dari pertanyaan :

1. Apa yang dapat saya ketahui (epistemologi)?
2. Apa yang dapat saya lakukan (axiologi)?

3. Apa yang dapat saya harapkan (onotologi)?

Epistemologi artinya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai alat untuk meramalkan dan mengontrol gejala empiris (Suriasumantri, 1987: 106). Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakekat pengetahuan, meliputi empat ciri khas yaitu :

- 1) Sumber pengetahuan, diperoleh melalui penalaran (rasio) proses deduksi dan dengan cara pengalaman kongkrit (empiris) proses induksi. Keduanya melahirkan kelompok rasionalitas dan empiris, yang oleh Kant disintesakan.
- 2) Batas ilmu pengetahuan, yang diketahui hanyalah gejala (fenomenon) yang merupakan penampakan kesadaran inderawi batas ruang dan waktu. Ada yang lebih penting lagi dibelakang “fenomenon” yaitu “nomenon” sebagai kebenaran metaempirik.
- 3) Struktur ; struktur artinya ada yang ingin mengetahui sesuatu, subjek yang meneliti, serta ada objek yang hendak diteliti. Keduanya selalu ada dalam dialektika. Subyek dalam menghadapi obyek dilakukan dengan klarifikasi (erklaren) bagi ilmu alamiah sedangkan bagi ilmu sosial dilakukan dengan pemahaman (verstehen) dan hermeneutik (kontekstual).
- 4) Keabsahan ; keabsahan ditentukan oleh kebenaran. Menyangkut benar tidaknya pengetahuan yang ditentukan oleh teori kebenaran yaitu :
 - a. Korespondensi (yaitu adanya kesamaan antara gagasan dengan kenyataan. Gagasan yang diungkapkan lewat pengetahuan kemudian dicocokkan dengan relita)
 - b. Koherensi (yaitu adanya kesesuaian/tidak bertentangan antara gagasan/ Pernyataan kita dengan pernyataan lain atau dengan sebelumnya)

- c. Pragmatis, (yaitu apabila gagasan itu ada nilai gunanya dari segi praktis sebagai manfaat langsung).

Pengetahuan ilmiah tidak dapat terpisahkan dari dua hal penting yaitu:

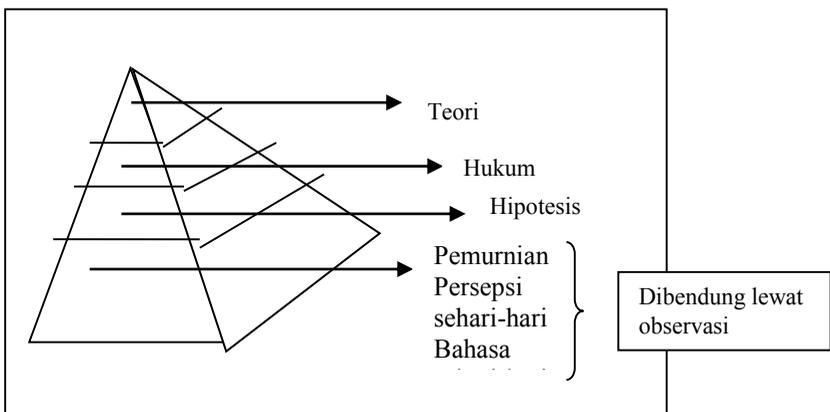
- 1) Proses heuristik (Context of discovery), yaitu proses atau teori menemukan jalan untuk menangani suatu masalah secara ilmiah. Heuristik mendahului ilmu, padahal ilmu sendiri justru wajib memeriksa, menerangkan membuktikan jalan yang dilalui ilmu (heuristik). Jadi heuristik adalah sebidang medan meliputi sejumlah faktor nirilmiah yang dapat menjadi penting demi munculnya ilmu (Peursen 1985:97). Seperti aspek metafisik, waktu, sosial, ekonomi, politik dan budaya berpengaruh secara heuristik. "Context of discovery" berusaha menyusun "context of justification", sebagai koreksi diri. Rasionalitas dalam arti luas dikoreksi oleh rasionalitas dalam arti sempit, semacam *falsifik* (propper) dan rencana penelitian serta lingkungan pelindung (lakatos).
- 2) "context of justification", yaitu konteks pembenaraan suatu pengetahuan ilmiah, sebagai proses pertanggungjawaban yang menyeluruh sebagai suatu kebijaksanaan sebuah ilmu. Sebuah ilmu harus lewat metode sebagai daur (siklus) yang terdiri dari induksi, dedukasi dan verifikasi (Kemeney, 1997:83). Proses demikian merupakan proses yang bisa dilakukan oleh aliran positivis logis, sebagai model daur empiris (Groot, 1961:29). Menurut propper (1968) bahwa pertanggungjawaban ilmu dilakukan dengan proses-proses logis (penjabaran bahasa, dedukasi) dan pengujian fakta (empiris). Kemudian disusun keterangan ilmiah

berupa gejala yang akan diterangkan (explanandum) dan keterangan (explans).

Untuk mencapai suatu teori ilmu pengetahuan, tidak begitu saja memperoleh teori tetapi melalui tahapan-tahap, ibarat bentuk piramida, yang terdiri dari beberapa lapis yaitu:

- 1) lapisan persepsi sehari-hari, bahasa sehari-hari dan akal sehat (commonsense). Kemudian dengan aspirasi ilmiah persepsi sehari-hari ini diarahkan menjadi observasi dengan berbagai teknis atau metode atau dilakukan pemurnian. Kemudian melalui pemurnian penalaran masuk ke tahap berikutnya.
- 2) Lapisan hipotesis, merupakan hasil pemurnian yang disusun berupa pernyataan (proposisi), yang menyatakan ada ikatan antara dua konsep hasil observasi. Bila terbukti benar maka akan menjadi hukum.
- 3) Lapisan hukum, yaitu menunjukkan kepada suatu keteraturan. Menemukan hukum-hukum dimana antaran satu dengan yang lainnya saling menunjang.
- 4) Lapisan teori, yaitu hasil abstraksi dari suatu keteraturan sehingga menjadi berlaku umum sebagai teori.

Gambar : Piramida Ilmu Pengetahuan
(Munandar S. 2005 : 24)



Metode Ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah sebagai suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis sebagai pengkajian dari peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metode ilmiah ilmu sosial berkaitan dengan paradigma disiplin ilmu sosial, yang terdiri dari tiga paradigma (Amal,1998) yaitu:

- 1) Positivisme
- 2) Konvensionalisme
- 3) Realisme

Ketiga paradigma tersebut, menentukan filsafat ilmu pengetahuan (ontologi,epistemologi dan implikasi metodologi). Ilmu sosial metode ilmiahnya dapat dilakukan menurut ketiga paradigma tersebut. Positivisme dilakukan dengan rangkaian logika deduktif,induktif,hipotesis dan verifikasi. Juga digunakan statistik (pelengkap induktif),sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan *aliran Chicago*. Metode ilmiah konvensionalisme dan realisme banyak dilakukan oleh para teoritis Eropa masing-masing Weber dan Marx.

Positivisme berasumsi bahwa pancaindera sebagai alat tangkap untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera (sense data), segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan dan masuk ke dalam kesadaran manusia secara langsung. Pengetahuan tingkat dasar sebagai landasan pengetahuan tingkat atas yang diperoleh melalui logika induktif (Carnap dalam Wuisman,1996:8). Asas positivisme yang dikembangkan oleh kelompok Wina (Der Wiener Kreis) pada tahun 1929, meliputi asas empirisme (induktif) dan logika (deduktif). Proses ilmiah positivisme menurut Wallace, (1971) meliputi: observasi, generalisasi empiris, penyusunan teori,penyusunan hipotesis,keputusan menerima atau menolak hipotesis dan penyimpulan logis teori.

Konvensionalisme; Asas filsafat konvensionalisme terhadap manusia berpandangan positif, manusia adalah bebas dan merdeka. Masyarakat adalah plural (sosial dan budaya),sebagai

kumpulan individu yang membentuk kelompok primer. Mengenai ontologi adalah merupakan hasil konvensi, termasuk epistemologinya. Teorinya bersifat menegerti dan memahami (understanding versteinen). Dampak dan cara dalam metodologinya pun dengan pengertian, pemahaman, melalui pendekatan “indepth” dan kualitatif. Penelitian lebih bersifat eksploratif, menyusun hipotesis yang juga siap untuk diuji. Deklarifikasi (erklaren).

Realisme; Asumsi yang diajukannya adalah ontologi adalah “comon sense” dan realitas ilmiah (scientific reality). Tentang hakekat sesuatu (essence) adalah struktur dan mekanisme, sebagai hasil yang diturunkan. Epistemologi adalah hasil para pakar melalui “generating structure and mechanism”. Implikasinya metode survey dan penyusunan analogi dan model. Realisme positif terhadap manusia. Masyarakat adalah seperti bangunan ada super struktur dan struktur rendah, bila dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Metode ilmu sosialnya adalah membuat model dengan modifikasi pertemuan antara pernyataan teori (theoretical statement) dengan pernyataan empirik (empirical statement), sehingga dapat menemukan struktur dan mekanisme.

Berdasarkan pengkajian tersebut, maka metode logika ilmu sosial berakar pada aliran filsafat ilmunya dan paradigma apa yang akan digunakan. Sehingga dengan sendirinya mempunyai implikasi bagi metode penelitian yang akan digunakan. Suatu hal yang sulit adalah apabila menggabungkan paradigma dalam suatu penelitian, maka akan menghadapi masalah benturan asumsi yang akan membiarkan hasil penelitian.

Pemikiran Tokoh Ilmu Sosial (Karl Max, Durkheim, Weber)

B. Pemikiran Tokoh Ilmu Sosial & Realitas Sosial

1. Karl Marx (1818-1883)

Relevansi pemikiran Marx dewasa ini, sehubungan dengan adanya kecenderungan pergeseran pemikiran dan sikap masyarakat Indonesia dari pandangan masyarakat selaras, serasi

dan seimbang serta stabilitas dan dinamis, ke arah masyarakat yang terbuka, demokratis, bebas menyatakan pendapat, bahkan cenderung menimbulkan konflik akibat pandangan demokrasi yang disalahtafsirkan dan kebablasan. Marx dalam hal ini mengajukan pandangan-pandangan tentang asumsi-asumsi kontradiksi dalam masyarakat yang pincang, adanya kesenjangan antara kaum modal dengan kaum buruh, eksploitasi, dominasi dan alienasi.

Karl Marx melihat seluruh struktur sebagian lapisan-lapisan yang penuh dengan kontradiksi dan merupakan proses yang terus menerus sebagai perubahan dialektika. Semua masyarakat dalam keadaan bergerak sebab mengandung unsur-unsur kekuatan yang saling bertentangan. Masyarakat terdiri dari oposisi-oposisi yang terus berjuang untuk mencapai suatu kedudukan tertentu. Revolusi untuk memperoleh perjuangan tersebut adalah dapat dicapai melalui sintesis baru yang akhirnya tiada lain adalah pertentangan.

Beberapa asumsi struktural konflik yang diajukan Marx antara lain:

- 1) Fenomena dunia sosial adalah berkarakter selalu mengalir dan berubah, dengan perubahan yang teratur, seragam dan rutin. Pola-pola perubahan fenomena sosial diperlihatkan pada hubungan sosial manusia dalam keteraturan ekonomi, seperti perlunya meningkatkan nafkah kehidupan yang berat dan berdampak pada seluruh struktur masyarakat.
- 2) Keanekaragaman kehidupan manusia sikap dan perilakunya dibentuk oleh institusi sosial baik itu primitif atau feodal dan kapitalis, adalah merupakan basis dan esensi alam manusia.
- 3) Dasar filosofinya adalah materialisme sejarah.

Akar Intelektual Marx terutama dipengaruhi oleh Hegel dan Feurbach. Hegel dengan idealisme mutlak, merupakan hasil pengembangan pemikiran idealisme subjektif (Fichte) dan idealisme objektif (Schelling). Untuk memerintahkan seluruh

pikiran maka diperlukan struktur “dialektika”, meliputi: tesis, antitesis, dan sintesis. Hegel mengembangkan struktur dialektika proses sejarah sehingga pemikirannya adalah idealisme sejarah (*historical materialism*), perbedaan antara subjek dan pikiran serta menguatkan sifat external dari obyek terhadap subjek.

Mark Marx mengkritik, menjungkir balikan pemikiran filsafat Hegel dan Feurbach, yang menggunakan pemikirannya yang melahirkan jalan pikiran filsafat barunya yang disebut materialisme sejarah (*historikal materialism*). Marx beranggapan bahwa realitas dunia adalah produk sejarah. Dan kesadaran yang sesungguhnya adalah eksistensi manusia dalam proses hidup yang sebenarnya.

Jalan pikiran materialisme sejarah meliputi :

- a. Mengkompromikan dua aliran filsafat yang bertentangan (*extrim*) antara idealisme dengan materialisme. Idealisme memandang kenyataan dunia ada dalam pikiran manusia, sehingga kenyataan dunia dapat diubah. Sebaliknya materialisme meyakini bahwa dunia yang ada di luar, dunia obyek fisik adalah membentuk pemikiran dan ide-ide manusia.
- b. Marx menurunkan pendekatan filsafat ini, bahwa ide tidak dapat bekerja dalam kekosongan (*avacumm*) dan tidak berproduksi dalam kekosongan. Ide telah banyak dipengaruhi. Oleh karena itu harus mempunyai relevansi terhadap konteks sejarah dimana mereka bergenerasi. Ide harus berkaitan secukupnya dengan kenyataan realitas sosial (*in that historical context*). Hanya dengan tindakan (*action*) ide dapat melakukan transformasi terhadap kegiatan sosial. Bahwa materialisme bukanlah suatu yang sederhana, bila kehilangan waktu maka tidak dapat merubah cara, oleh karena itu harus secara kontinyu membentuk dan merubah bentuk dengan tindakan manusia pada ide-ide dan persepsi yang berubah pula.
- c. Pandangan materialisme sejarah; bahwa pandangan atau ide dan kesadaran manusia membentuk dunia sosial dan materi

apabila: *pertama*, manusia bertindak atas dasar ide-idenya; *kedua*, dalam kenyataan bahwa ciri-ciri material merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan bagian dari periode sejarah yang harus dibatasi susunannya pada luasnya pemikiran, bahkan dibantu oleh tindakan sosial yang nyata dapat membentuk kembali alam masyarakat.

2. Struktural Konflik

Pandangan struktural konflik, menggambarkan pandangan manusia tidak hanya sosiabilitas, manusia membutuhkan manusia lain, tetapi juga perlu beraktivitas untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu pandangan dialektika sebagai bentuk logika lengket (*inheren*) dengan perubahan sosial. Sehingga fakta sebagai sesuatu yang tidak abadi, sebagai titik-titik dalam proses, bukan sesuatu yang final, contohnya pekerja merupakan fakta sejarah spesifik kapitalisme. Struktur masyarakat alam materi sebagai asumsi pemikiran, sehingga masyarakat dipilih menjadi bagian yang terdiri dari : dasar materi atau dasar ekonomi dan bagian super struktur; yang nantinya akan timbul reflek yang konsisten dari dasar.

Dasar ekonomi masyarakat; dasar materi mengacu kepada sesuatu bagian dari produksi, suatu cara pengaturan kehidupan produktif dari masyarakat. Bentuk sejarah dari model produksi yang dilaluinya adalah bersifat antagonistik, akan tetapi semua masyarakat ditentukan oleh langkah produktif, yang bertemu pada kebutuhan dasar.

Bagian super struktur masyarakat yang meliputi kelembagaan politik, kerangka normatif (hukum formal dan ajaran moral), harapan, seni, sistem pengetahuan formal, ideologi, dan kelembagaan.

Hubungan antara dasar materi dengan super struktur adalah secara dialektika, melalui interaksi dan refleksi yang konsisten dengan caranya sendiri. Superstruktur, keseluruhan caranya adalah konsisten dengan cara di bawahnya yaitu model produksi, yang berkembang dalam eksistensi miliknya.

Terjadinya dominasi kolektif pada dasar ekonomi, maka terjadi kontrol yang efektif dari superstruktur pada ideologi.

3. Pandangan Serba Kontradiksi

Pandangan serba kontradiksi nampak analisisnya pada kelas sosial kapitalis dan antara kekuatan produksi dan relasi sosial. Kekuatan produksi berupa teknologi alat-alat, tenaga kerja, lahan dan kapital akan ditransformasikan dalam bentuk relasi sosial diantara kelas. Kekuatan produksi dipertemukan dengan kebutuhan dasar manusia ternyata dalam realitas objektif menimbulkan suatu distribusi yang tidak seimbang. Tentu saja ketidakseimbangan dalam distribusi ini menimbulkan disintegrasi, kaum kapitalis semakin kuat ekonomi dan kehidupannya, sedangkan kaum pekerja sebaliknya semakin lemah. Hal ini bukanlah secara otomatis, tetapi dibuat oleh sejarahnya sendiri, yaitu hasil kreasi kaum kapitalis.

Konsep dasar ekonomi merupakan basis utama untuk perubahan, baik untuk kapitalis maupun sistem sosial. Terjadinya eksploitasi terhadap yang bukan hak yaitu dari produk kerja, akan menimbulkan adanya ideologi tandingan.

Adanya akumulasi materi melalui privatisasi, jelas akan menimbulkan kelas. Konsep kelas yang dicirikan oleh adanya posisi dalam keteraturan ekonomi pengertian produksi, juga adanya perbedaan budaya dan pandangan dunia dengan sendirinya menimbulkan konflik, sebab sama-sama mempunyai tujuan ekonomis. Diantara kelas ada yang mengalami peggangan masyarakat dari pengertian kehidupan produksi dan hakekat dirinya terserap oleh pekerjaan di luar kepentingannya. Maka pada saat demikian terjadi alienasi.

Secara abstrak kita melihat adanya kontradiksi diantara relasi-relasi dari produksi. Secara bersama kekuatan dari produksi dan hubungan produksi terdiri dari dasar ekonomi dari masyarakat dan perubahan sosial. Sehingga pemikiran kontradiksi timbul dan berada dalam dasar masyarakat. Teori tentang determinisme

ekonomi menyatakan bahwa perubahan-perubahan masyarakat disebabkan oleh minat manusia-manusia ekonomi dan memang perubahan dalam masyarakat mesti berlangsung.

Dalam kenyataan (fakta), perubahan datang ketika ada kontradiksi yang mungkin terhadap masyarakat, dimana mereka mengambil tindakan untuk menggerakkan kembali rintangan terhadap kemajuan ekonomi. Ada pendapat bahwa kesamaan tidak ada tempat untuk timbulnya kesadaran manusia. Dalam hal ini perubahan terjadi di dalam struktur sosial sehingga menjadi independen dalam tindakan. Pendapat lain menyatakan bahwa manusia harus menjadi sadar terhadap posisinya dan perlu melakukan kontradiksi sebelum perubahan terjadi. Inilah pandangan serba kontradiksi.

Untuk lebih jelasnya nampak pada sketsa masyarakat kapitalis berikut : Hukum-hukum ekonomi yang direalisasikan pada produksi di manapun pasti didasarkan pada adanya pertentangan kelas. Pertentangan ini terjadi antara majikan dan buruh, sehingga kekuatan produksi berkembang atas dasar dominasi pertentangan kelas. Hal ini sebagai perubahan sejarah. Kelas adalah sebagai hasil abstraksi dari rakyat melalui langkah politik ekonomi. Gambaran kelas kapitalis adalah gambaran “uang dan pertentangan”. Produk dari struktur kelas berupa kekayaan dan pendapatan. Kekayaan sebagai hasil dari dominasi relasi produksi, sebab ada saling keterkaitan antara hubungan produksi, situasi kelas dan situasi politik. Situasi kelas ditentukan oleh posisi proses produksi. Posisi proses produksi yang terus menerus menentukan distribusi kekuasaan politik, yang kemudian akan menentukan politik dan ekonomi. Perbedaan atas kondisi kaya dan sosial menimbulkan kesadaran supra-struktur sehingga berbagai sentimen, ideologi, ilusi, cara berpikir, dan konsepsi kehidupan mulai dibentuk dalam rangka kepentingan kelas.

Hubungan antara kekayaan dan kekuasaan merupakan basis pertemuan kelas. Individu-individu bagian dari kelas terlibat dalam perjuangan kelas. Dalam realitas terjadi persaingan perjuangan kelas antara borjuis dengan proletar. Realitas sosial

ekonomi merupakan tujuan dari proletar, sehingga timbul konflik dua kepentingan. Artikulasi dua kepentingan tersebut adalah antara kepentingan konservatif yang berkuasa dengan kepentingan revolusioner kelas tertindas.

Untuk perjuangan tersebut terkristal adanya organisasi dan perjuangan kelas, sebagai hasil koalisi individu dua kelompok kepentingan. Kematangan organisasi masing-masing merupakan pertarungan politik. Selama perjuangan kelas tertindas belum berhasil, maka para teoritis hanya jadi utopis. Menunggu sejarah perjuangan kelas. Kelas dalam perspektif sosiologis adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya unsur heuristik dari Marx, artinya dapat mencoba mencari jawaban penyelesaian praktis dan penuh arti untuk menyelesaikan masalah kehidupan realistik, karena ada unsur rasionalitas pengetahuan dan unsur pra-ilmiah. Konsep kelas adalah dinamis dan analitis, bermakna perubahan sosial.
- 2) Model dua kelas yang antagonis menggambarkan ada dominasi kelas dan perubahan sosial . jadi suatu pertentangan yang mampu menggerakkan perubahan struktural menunjukkan adanya pertentangan kelas. Pertentangan kelas mencerminkan isu dominan dan dua kelas ada dalam kontinum tesis-antitesis Hegelian.
- 3) Adanya “force of production”, menyebabkan ada hubungan-hubungan produksi dan timbulnya kelas. Prosesnya adalah kapitalis yang membeli tenaga kerja ditambah kemampuan menguasai teknologi alat-alat, maka menghasilkan nilai surplus. Jadi “relations of production” dapat bermakna hubungan kekayaan faktual dan kekuasaan serta perundang-undangan. Konsep kekayaan dianalisis secara sosiologis, filsafat dan sejarah. Kekayaan berkaitan dengan pemilikan dan pengendalian kekayaan yang merupakan fungsi kapitalis. Perubahan dari kapitalis menjadi kekayaan sosial, bersama atau perseroan, menghilangkan privatisasi adalah menuju masyarakat komunis.

- 4) Hubungan-hubungan produksi merupakan rahasia terakhir atau misterius, tetapi memunculkan kekuasaan politik suatu kelas.
- 5) Pembentukan kelas sebagai hasil pembangunan kekayaan milik orang dan kepentingan. Di bidang politik kelas bercirikan komunitas, organisatoris dan mempunyai perserikatan.
- 6) Pertentangan kelas sebagai penggerak perubahan sosial, dianalisis secara sosiologis dan filosofis.

Pemikiran sosiologis dan fisiologis bertemu pada permasalahan:

- a. Pada setiap barang milik terdapat barang milik yang termasuk ke dalam kekuasaan yang sah atau tidak sah.
 - b. Perbedaan situasi kelas menjadi meningkat.
 - c. Ada jurang pemisah antar kelas semakin matang.
 - d. Puncak pertentangan kelas adalah revolusi. Teori kelas diartikan perubahan struktur sosial melalui revolusi atau pertentangan kelompok yang berkepentingan antagonists. Hukum pertentangan berbunyi: tanpa pertentangan tidak ada kemajuan.
- 7) Analisis pemikiran struktur sosial dalam kategori akan membantu penelitian lanjutan. Pertemuan pemikiran filsafat dan unsur sosiologis menghasilkan logika “ilegal”. Dalam analisis sosiologisnya mencatat ada tiga faktor empiris yaitu:
 - a. Kehadiran pertentangan antar kelompok sosial (kelas)
 - b. Kehadiran kekayaan pribadi efektif.
 - c. Kehadiran hubungan dominasi dan penundukan.

Kemudian mengkaji lenyapnya kekayaan pribadi diganti oleh kekayaan komunal. Kemudian pada saat proses pelenyapan kekayaan pribadi yang efektif, apa yang terjadi. Maka Marx menjawabnya dengan cara loncat dari analisis sosiologis ke analisis filsafat. Dengan menyatakan ketergantungan kelas pada hubungan dominasi dan penundukan dan ketergantungan hubungan-hubungan pada pemilikan atau ketiadaan pemilikan “kapital pribadi yang efektif”. Maka di satu pihak membuat

kekayaan pribadi bersifat empirik dan di lain pihak membuat kelas sosial bersifat filosofis.

4. Emile Durkheim (1858-1917)

Pemikiran Durkheim tentang masyarakat dapat digunakan sebagai alat analisis kondisi masyarakat Indonesia pascareformasi (tahun 1998), yang menghadapi problem integrasi sosial. Durkheim dalam pemikirannya mengajukan pandangan tentang penafsiran masyarakat yang terintegrasi (solidaritas sosial), makna moral, kondisi hukum dan kondisi masyarakat anommi (tiada moral).

Problem sosial yang dihadapi Durkkheim menjelang abad ke-19, adalah cepatnya pertumbuhan industri dan terjadinya destruksi masyarakat akibat konflik antar kelompok, antara kelompok gereja dan negara, politik antisemit dan tumbuhnya kelompok sosialis dan peristiwa “dreyfus” serta timbulnya unsur sosial baru. Akibat demikian timbul minat Durkheim untuk mengintegrasikan masyarakat (perancis) dengan isu utama “solidaritas sosial). Sebagai pertanyaan problem sosialnya adalah:

- 1) Apa yang dapat diperbuat untuk suatu masyarakat unit-unit individu (gabungan-gabungan individu)
- 2) Apa perekat manusia satu dengan manusia lainnya atau determinan tranformasi apa dari kebersamaan. Kemudian dalam mengkaji proses perubahan, tingkat dan tipe solidaritas bagaimana yang mempunyai kontribusi terhadap integrasi masyarakat. Bila pembagian kerja berperan dalam menimbulkan solidaritas sosial sebagai fenomena moral yang tidak dapat langsung diobservasi, maka bagaimana dalam menentukan data internalnya.

5. Dua Tipe Sodilaritas (Mekanis dan Organis)

Melalui analogi organisme (seperti hewan dan tumbuhan), setiap individu hidup dalam tempat yang sama, berpengalaman sama sehingga timbul kesamaan dalam nilai-nilai,

emosi, kepercayaan dan sentimen (sentimen), satu sama lain sama-sama anggota kolektivitas, tiap-tiap bagian serupa dengan bagian lain, masing-masing bentuk dari masyarakat sebagai versi kecil (micro version) dari keseluruhan masyarakat. Aktivitas yang bersifat kolektif, suatu jenis kebersamaan (agregat). Solidaritas demikian mengacu pada ikatan moral dan kebersamaan. Kewajiban moral sebagai adalah berlaku untuk semua bentuk masyarakat (suku, bangsa), ikatan moral sebagai perekat satu sama lain.

Dalam solidaritas ada konsep kolektif atau kesadaran bersama (common consciousness), merupakan hasil kepercayaan, perasaan dari seluruh anggota masyarakat. Mengenai penopang proses perubahan solidaritas dimulai sejak individu berdampingan mengalami hal yang sama dengan lingkungan. Semua laki-laki perempuan menginternalisasi kesadaran individu yang “mengkristal” dalam suatu perasaan yang sama. Dengan kata lain kepribadian individu menyerap ke dalam kepribadian kolektif. Ini berarti kesadaran kolektif menutupi kesadaran individu.” Mereka mendominasi kami”.

Kesadaran ini merupakan eksistensi diri suatu “super human”. Suatu yang menggema dalam milik sendiri sebagai kekuatan asing. Sehingga ada dua kenyataan besar yaitu :

- 1) Kesadaran individu, kedudukannya menyelimuti pribadi masing-masing
- 2) Kesadaran kolektif, menyelimuti seluruh masyarakat, keduanya mempunyai kesadaran mirip dasar organis yang sama terikat satu sama lain. tetapi mempunyai satu entitas. Keduanya bekerja dengan solid yang meningkatkan solidaritas (sui generis). Individu tidak hadir secara nyata sebab kenyataannya kabur oleh kesadaran kolektif. inilah yang disebut dengan “solidaritas mekanis”. Perkembangan kondisi baru menyebabkan ikatan moral yang dikuasai masyarakat secara bersama-sama berubah, membesarkan ukuran masyarakat (social volume) dan kepadatan sosial akan menghasilkan beraneka ragam individu. Pada saat yang sama

transformasi dan komunikasi berkembang secara cepat. Kondisi demikian menempatkan tingkat interaksi (hubungan sosial) semakin membesar. Intesitas dari hubungan sosial tersebut menyebabkan adanya kepadatan moral (moral density). Kombinasi pertumbuhan isi sosial dan kepadatan moral menyebabkan kondisi timbulnya diferensiasi sosial. Demikian pula kondisi kompetensi, perjuangan untuk keberadaan (kehidupan) menjadi lebih kuat. Pembagian kerja merupakan bagian untuk hidup, tetapi penyelesaiannya perlahan. Antara lawan tidak mewajibkan menghilangkan satu terhadap yang lainnya, tetapi dapat hidup berdampingan.

Pembagian kerja semakin berkembang maka individu-individu tidak akan selamanya sama, sebab pekerjaan mereka mengikuti fungsi spesialis. Tetapi perasaan solidaritas mengikat sesuai dengan pembagian kerja, yang membawa kepada posisi saling melengkapi “tidak sama tetapi mirip” yang akan menyebabkan kegiatan bersama, sumber perasaan solidaritas dari macam-macam perbedaan tertentu. Sebagai pengganti saling bertentangan saling mengasingkan satu dengan yang lainnya, adalah saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga pembagian kerja menetapkan bentuk kontrak moral baru antara individu, dan inilah yang dinamakan “solidaritas organik”. Pembagian kerja yang semakin besar, maka saling ketergantungan semakin besar, karena semakin bertambah spesialisasi kerja. Indikator solidaritas organik ini adalah ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (restitutif).

Menurut Durkheim struktur dari masyarakat adalah ketetapan, bukan dengan pengulangan dari unsur-unsur homogen yang sama, tetapi oleh suatu sistem dari organ yang berbeda, masing-masing setiap sesuatu telah mempunyai peran khusus dan milik mereka tidak terbentuk dari bagian yang berbeda. Unsur dalam masyarakat tidaklah semua asli, tidak menempati bersama dan kemudian berakhir. Tidak terpancang satu dengan yang lainnya, tetapi ada koordinasi dan subordinasi satu sama lainnya

dengan organ pusat sama, berusaha melampaui ketahanan dari organisme yang cukup.

Meskipun masyarakat tumbuh dengan cepat, maka kondisi kehidupan individu tidaklah sama untuk setiap tempat. Hal ini menurut Durkheim karena masyarakat menyebar lebih cepat, sehingga kesadaran bersama menekan dirinya untuk naik ke atas dan akibatnya menjadi lebih abstrak. Semakin umum munculnya kesadaran bersama, maka kehidupan untuk variasi individu lebih luas. Solidaritas organik hanya mungkin jika masing-masing orang perseorangan mempunyai lingkungan kegiatan yang berakibat bagi pribadi. Jadi kesadaran kolektif tidak melindungi kesadaran individu, tetapi disini membangun untuk fungsi kohesivitas yang muncul dari solidaritas.

“Solidaritas mekanik” berkaitan dengan pertumbuhan pembagian tenaga kerja, dimana semakin meningkatkan pembagian kerja, maka terjadi perubahan struktur sosial dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama, yang menunjuk kepada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang rata-rata ada pada warga masyarakat. Merupakan solidaritas yang tergantung kepada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Karena itu individu tidak berkembang terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan besar untuk konformitas (penyesuaian-penyesuaian). Indikatornya ada hukum yang bersifat menekan (represif).

6. Konsep “Anomi”

Apabila kondisi masyarakat sudah tidak mempunyai sistem pengaturan utama dan tidak berfungsi lagi dalam membentuk keteraturan dan hubungan harmonisnya, maka hal demikian membawa membawa kepada kondisi “anomi”. Secara subyektif individu mengalami keadaan tidak pasti, tidak aman, dimana keinginan dan ambisi pribadinya tidak mungkin untuk dipenuhinya secara realistis, ada perasaan tidak punya arti yang

merasa curiga bahwa hidup ini benar-benar tidak punya arti. Ada tekanan budaya yang kuat pada individualisme. Fenomenanya dalam bentuk penyakit masyarakat:

- 1) Anomi pada pembagian kerja, seperti kasus krisis industri dimana terjadi permusuhan antara buruh dengan pengusaha, sehingga individu terisolasi
- 2) Tingginya intensitas pembagian kerja, sehingga penempatan individu tidak berdasarkan kemampuannya.
- 3) Bentuk patologis lainnya yaitu fungsi tugas tidak dikerjakan secara penuh sistem.

7. Fenomena “Moral”

Aspek moral dalam solidaritas berkaitan dengan “kepadatan moral” (moral density). Arti sosiologisnya bahwa kepadatan fisik hanya penting sepanjangkepadatannya sudah menjadi kepadatan moral atau kepadatan yang dinamis yang nampak dalam kontak sosial. Meningkatnya kepadatan penduduk yang akan meningkatkan pembagian kerja (division of labor), selanjutnya akan meningkatkan kepadatan moral.

8. Fakta Sosial

Ide penting lainnya adalah masalah metodologi. Yang memperlakukan fenomena sosial sebagai benda (things). Hal ini berkaitan dengan konsep “fakta sosial” yaitu sebagai fenomena yang harus dikaji secara empiris tidak secara filsafat. Fakta sosial bersifat eksternal, koersif, aktor solidaritas sosial juga sebagai fakta, meskipun bersifat nonmaterial. Teori perkembangan masyarakat adalah cenderung model unilinier dengan tipe ideal solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik.

9. Max Weber (1864-1920)

Pemikiran Weber cukup relevan untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana Weber menguraikan tentang tindakan individu arti subyektif, tipe ideal, tipe tindakan

individu, stratifikasi, tipe otoritas dan orientasi agama: pandangan tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan pola tindakan sebelum reformasi.

Sebagaimana diketahui ilmu sosial mempunyai perhatian pada masalah kehidupan manusia (individu), kehidupan masyarakat dan berbagai prakonsepsi tentang disiplin ilmu sosial. Akibat perhatian tersebut menghasilkan berbagai refleksi pemikiran dari perjalanan atau pengalaman hidupnya, baik yang berdimensi material maupun spiritual. Perkembangan ilmu sosial berkaitan dengan sistem berpikir, dimana teori dan asumsi yang mendasar senantiasa dalam konteks sejarah dan biografi.

Demikian pula tradisi “paradigma pluralis” (artinya lebih dari satu) sebagai label ditunjukkan bagi karya dan pemikiran Max Weber, berhubungan dan terkait dengan keadaan masyarakat modern yang terdiri dari berbagai kelompok dengan berbagai minat dan perhatian yang berbeda-beda. Keadaan masyarakat atau kelompok-kelompok tidaklah sama, terdiri dari aneka ragam kekuatan dan pengaruh, cara dan tradisi, kekayaan dan kedudukan. Dengan demikian bagi pemikir pluralis tidak hanya keanekaannya saja, tetapi termasuk di dalamnya ada potensi disintegrasi, seperti perbedaan dalam hal kebiasaan, tradisi, nilai dan norma-norma. Keadaan demikian akan membentuk berbagai kelompok dan organisasi dalam masyarakat, sehingga perlu mencari jawaban model dari masyarakat yang heterogen dan kompleks.

Dalam ilmu sosiologi pluralis Weber, memandang ketidakteraturan (termasuk bentuk penyimpangan) merupakan kondisi umum dari masyarakat yang heterogen dan kompleks, seperti nampak dalam nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan kedudukan adalah suatu yang normal bagian dari kenyataan masyarakat. Sehingga banyak keteraturan dan kesesuaian akan menjadi problem pula bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan masyarakat akan mengalami saat kejenuhan, sebagai konsekuensi manusia berkreasikan dalam dinamika kehidupan sosialnya. Melalui kesadaran, pemaknaan

dan pemahaman simbol-simbol yang nampak dalam perilaku manusia, maka pandangan pluralis adalah mencari jawaban terhadap kumpulan- kumpulan yang berbeda tersebut bagaikan sebuah teka-teki (puzzle). Untuk menelusuri kembali teori sosiologi dapat mengikutinya dalam dua jalan yaitu mempelajari paradigma utamanya (pluralis), dan mengetahui asumsi utamanya dalam eksplanasi sosiologi. Melalui penelusuran asumsi konsep manusia, masyarakat dan ilmu sosial, dengan mempelajari berbagai contoh dan tipe-tipe ideal unsur kehidupannya.

10. Akar Intelektual Pluralis (Weber)

Untuk mengetahui konstruksi paradigma pluralis, maka dapat dilakukan dengan menganalisis asumsi-asumsi yang mempelajari sifat dasar manusia. Kant seorang filosof menyatakan konsep dasar manusia sebagai dasar: (1) Manusia mempunyai keinginan untuk bersatu dengan manusia lain. (2) Manusia selain memiliki keyakinan akan kepuasan untuk dirinya juga selalu bersaing dalam berbagai hal (3) keadaan manusia ada dalam suatu keadaan konflik yang mempunyai dorongan konflik positif dan negatif. Dari pandangan tersebut nampak adanya sifat paradoksal manusia. Dengan demikian asumsinya sifat dasar manusia adalah terbagi (*divided human nature*), sehingga berpengaruh terhadap pemikiran filsafat dan akhirnya kepada pemikiran sosiologi. Menurut Kant, kemudian sifat dasar manusia tersebut nampak dalam relitas yang dapat diumpamakan seperti berikut: (1) Bahwa dunia adalah nampak dapat dipelajari seperti binatang di langit yang dapat dikaji secara ilmiah. (2) Realitas kehidupan manusia dibimbing oleh hukum dan moral sehingga realitas etika adalah berbeda. Pandangan tersebut jelas mempengaruhi terhadap sosiologi positivistik. Demikian juga pandangan tersebut mengembangkan berfikir deduktif.

Kemudian Kant merasa tidak puas terhadap pandangan yang ekstrim rasionalis dan empiris (*John Locke*). Alasan Kant adalah empirisme memberikan kepada kita hanya putusan-putusan yang

sintesis, yang tidak mungkin empiris memberikan pengetahuan yang bersifat umum dan perlu mutlak. Sebaliknya rasionalisme memberikan kepada kita putusan-putusan yang analitis, jadi tidak mungkin memberikan pengetahuan yang baru. Dengan demikian baik empirisme maupun rasionalisme tidak memenuhi syarat yang dituntut ilmu pengetahuan (Hadiwijono,1980:66). Sehingga Kant mengembangkan filsafat idealisme seperti ditulis dalam bukunya “Critique Of Pure Reason” (Kritik Atas Rasio Murni,1781). Kant membedakan pengertian antara “Noumena dan Phenomena”. *Noumena* yaitu benda-benda sebagaimana adanya dalam dirinya sedangkan *phenomena* adalah benda-benda yang nampak dalam pikiran. Oleh karena itu ilmu pengetahuan lebih memfokuskan pada *phenomena* atau penampakan. Dengan pikirannya manusia dapat menentukan keteraturan dari penampakan yang kacau, akan tetapi tidak ada kesepakatan dengan noumena apalagi manusia mempunyai kapasitas bawaan apriori yang mengembangkan prinsip-prinsip. Berdasarkan pandangan demikian Kant mengembangkan pandangan idealismenya. Buku keduanya berjudul “Critique of Practical Reason” (Kritik Atas Rasio Praktis,1790). Kant memberi dasar beberapa teori sosiologi pluralis diantaranya: (1) Bahwa rasio merupakan dasar utama tindakan manusia, dengan rasio mampu mengkategorisasikan kewajiban etis. (2) Nilai individu adalah mutlak, bahwa seseorang bertindak untuk dirinya atau orang lain.

Dari pandangan-pandangan tersebut jelas bahwa tindakan seseorang menurut Kant adalah tindakan yang oenuh arti (meaningfull) dan bermakna karena didasari oleh rasio dan sangat jelas kalau tidak untuk dirinya adalah untuk orang lain. Demikianlah kaitan pandangan filsafat Kant dengan Sosiologi pluralis.

Sumbangan pemikiran Jean Jaques Rousseau bagi sosiologi pruralis, adalah sesuai dengan fokus pemikirannya yaitu pada organisasi politik masyarakat. Menurutnya citra masyarakat adalah pluralis seperti ghambaran keteraturan sosial dilengkapi pula dengan minat-minat yang berbeda, antara aturan dengan yang

diatur, antara keinginan bebas dengan hukum, badan politik dengan bidang asosiasi, kelompok dan organisasi dengan minat yang khusus. Dengan dilatarbelakangi dengan kondisi pergolakan masyarakat Perancis, Rousseau menyampaikan pemikirannya yang pokok yaitu (1) Bahwa manusia dilahirkan dengan status bebas.(2) Bahwa pengetahuan seni dan sastra merendahkan jiwa manusia, mengarah kepada kondisi perbudakan manusia yang pada dasarnya mempunyai kebebasan. Kemudian tahun 1762 ia menulis tentang “de Social Contract” (kontrak sosial) menyatakan bahwa “manusia dilahirkan bebas, tetapi dimanapun terikat”. Hal ini berarti manusia itu tidak bebas dengan gambaran sederhana sampai masyarakat modern-teknologi, selain ada persatuan harmoni, tetapi nampak ada permusuhan, dan pertentangan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan manusia yang terus meningkat, yang sekaligus ,menginginkan adanya aturan yang melindungi. Selain nampak esensi manusia itu penuh dengan paradoks, oleh karena itu diperlukan negoisasi.

Untuk mempertahankan dasar pemikiran “Egalitarian” diperlukan aturan yang melindungi hak atau pemikiran. Adanya pertentangan antara kepentingan umum (public) dengan kepentingan kehendak semua orang (suara terbanyak), maka diperlukan kontrak sosial. Kontrak sosial sebagai solusi bagi konflik kepentingan antara penguasa disatu pihak dengan yang dikuasai dilain pihak. Kontrak sosial sebagai upaya pelimpahan kekuasaan mutlak, sebagai sesuatu paradoksal dari kebebasan memilih dan juga pembatasan kehendak. Kontrak sosial sebagai sesuatu paradoksal dari kebebasan memilih dan juga pembatasan kehendak. Kontrak sosial sebagai solusi politik untuk mencari kebebasan dan memilih tindakan individu, serta menghindari ketidakadilan dan ketidaksamaan, sebagai pengikat sosial terhadap perbedaan kekuasaan dan kekayaan. Sehingga kehidupan kolektif berkembang dan berkeinginan bebas terlindungi.

Visi utama Rousseau tentang masyarakat pemikirannya ditunjukkan kepada masyarakat, sedangkan Kant pada citra sifat

dasar manusia keduanya sebagai pemikir tipe ideal yang menampakkan pandangan rasionalis, bebas, aktor bertujuan kontrak dengan yang lain dalam suatu masyarakat yang terdiri dari macam-macam kelompok minat. Posisi kedua tokoh pada paradigma pluralis adalah Kant ada pada kesadaran manusia dan pemaknaan, sedangkan Rousseau memperhatikan pada kebebasan politik dan kebebasan.

11. Interpretatif Max Weber

Pemikiran sosiologi Weber dipengaruhi oleh cara berpikir Kant dan Jean Jaques Rousseou yaitu idealis. Kedua pemikir tersebut memberi inspirasi kepada Weber tentang cara berpikir idealis. Pendekatan sosiologi Weber dapat dikaji dari wawasan karyanya sebagaimana pendekatan Weber dalam eksplanasi teorinya. Teori eksplanasi yang dilakukannya adalah metode interpretatif, yaitu untuk mengungkapkan maksud dari tindakan yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mengartikulasikan struktur simbolik yang mendasari tindakan orang dalam latar sosial tertentu. Dengan pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial maka akan menghasilkan penjelasan kausal apa yang dilakukan dan akibatnya.

Konsep pengetahuan manusia dari weber dapat ditelusuri dari pendekatan sosiologinya yang bersifat historis dan sikap membandingkan (comparative manner). Studi historis dilakukan Weber dalam menjelaskan sosial, politik, agama, pendidikan dan organisasi ekonomi dari masyarakat. Sosiologi Weber dicirikan dengan cara gaya berfikir meneliti dan difokuskan pada ide-ide tentang relitas (idealisme). Dalam pemahaman terhadap hubungan sosial, weber mereduksi sejarah kepada pikiran dari aktor-aktor individu (reduce history to the maind of individual actors). Studi tentang masyarakat adalah studi mengenai sejarah, khususnya dalam bidang gagasan-gagasan, yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya dalam batas-batas generalisasi kausal yang tetap melalui cara pengambilan dari dalam, akan diperoleh pemahaman bagaimana orang-orang menginterpretasikan dan

mengkonstrusikan kelembagaan-kelembagaan, pola-pola, kebiasaan dan hal lain yang merupakan realitas sosial. Secara sederhana pendekatan sejarah Weber diartikan sebagai uji-coba imajinasi.

Weber tidak tertarik kepada kelakuan dalam arti kelakuan orang perseorangan, tetapi dalam pengertian tingkah laku sosial (social conduct). Maksud tingkah laku di sini adalah yang mengandung makna subyektif dari aktor juga tingkah lakunya berorientasi kepada yang lain. Cara demikian akan memahami hubungan sosial melalui cara pengambilan dari dalam (getting inside), yang secara umum diketahui dalam bidang “versthen” atau pemahaman. Proses memadukan dengan sesuatu ketentuan antara kejadian-kejadian dan ide-ide sejarah, maka Weber punya sistem yang lebih kuat yang mampu menjelaskan kehidupan sosial.

Dengan sosiologinya, Weber mengembangkan sistem ekspansi dengan tetap konsisten pada citra manusia menurut Kantian. Sebagaimana diketahui bahwa Kant menekankan pentingnya kesadaran dan pemaknaan terhadap eksistensi manusia dan menempatkan pengalaman atau fenomena sebagai kajian utama pengetahuan.

Weber tampil dengan memberikan keunggulan pada pemikiran yang menjadikan suatu kenyataan dari kejadian-kejadian menjadi obyektif. Dengan demikian filsafat idealisme menjadikan “objek luar”, hanyalah merupakan persepsi, refleksi, atau sebuah konsep yang telah dikuasai pikiran manusia. Oleh karena itu pikiran manusia harus mencari pengetahuan bagaimana orang-orang mendefinisikan kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa, dan benda-benda. Jika mengikuti ide-ide tersebut tentang benda yang dimaksud maka lebih penting bila dibandingkan dengan benda-benda itu sendiri.

Ada ciri-ciri asumsi sosiologi dari Weber yaitu: melakukan pengklasifikasian yang penting, kemudian menyusun secara sistematis dari ide-ide dan mengembangkan klasifikasi serta

melakukan analisis terhadap kategorisasi utama dan memberikan pengertian secara deskriptif. Tipe ideal Weber memperlihatkan penggunaan klasifikasi untuk penyusunan teori. Tipe ideal juga diartikan sebagai bentuk yang jelas atau sebagai kategori dari hasil “pemurnian”(purifies) sebagai aspek penting dari kehidupan sosial contoh dalam tipe ideal yaitu konsep kepemimpinan (seperti tradisional, kharismatik, dan legal rasional). Tipe tersebut tidak nampak dalam kehidupan sosial, tetapi ide-idenya dapat digunakan sebagai alat identifikasi.

Citra Pengetahuan weber meliputi dimensi penting suatu pemisahan dari bentuk penialian logis pribadi dan kebenaran. Hal ini mengacu kepada sosiologi bebas nilai atau bersifat netral etik, pendekatan menempatkan penilaian tentang “what ought to be apart from what is”. Pendapat Weber tentang nilai bukan untuk mengganti logika dan relevansinya dengan kebenaran. Ada kemungkinan bias pribadi berimplikasi terhadap asumsi-asumsi. Dengan kata lain pengetahuan yang baik adalah seperti sebaik sifat dasar manusia dan masyarakat yang terlibat (inheren) dalam paradigma dimana teori itu dibangun. Oleh karena itu asumsi sosiologi dapat menentukan (predisposisi) yang mengarah kepada isu tertentu, tetap konsisten tidak memadukan dengan isu lain yang bertentangan. Sosiologis bebas nilai merupakan kritik untuk memperoleh hasil yang bermanfaat dan meningkatkan daya refleksi bidang sosiologi.

Weber memfokuskan pada keteraturan sosial, aspek penting subjek, meskipun yang dikajinya dalam skala besar seperti agama ekonomi dan kekuatan politik. Yang sejalan dengan eksplanasi Weber adalah “interaksionisme simbolik” yang memerhatikan pada interpretasi intim dalam hubungan sosial.

12. Beberapa Asumsi Paradigma Pluralis

Sifat dasar manusia:

- (1) Konsep interaksi dari sifat dasar manusia sebagai keintiman yang kuat, sebagai kehidupan pribadi aktor (private world)
- (2) Tingkah laku manusia adalah intensional dan voluntaris
- (3) Sifat dasar manusia adalah kebebasan
- (4) Manusia mempunyai kemampuan sosial dan ketegasan diri.

13. Sifat Dasar Masyarakat

- 1) Masyarakat sebagai kenyataan sosial yang ditegaskan berdasarkan kesadaran, pembagian ide dan makna dari anggotanya. Keberadaan masyarakat tidak dari luar, tetapi dari dalam. Esensinya bahwa kenyataan subjektif sebagai definisi dari persepsi yang dihasilkan akibat kontak dengan yang lain.
- 2) Dasar masyarakat resiprositas. Masing-masing anggota kelompok mempunyai basis pada apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pikirkan, yang ada dalam hubungan resiprokal.
- 3) Pemaknaan dari hubungannya yang bersifat resiprokal, simbol-simbol dan konsep-konsep diri yang harus dipahami sebagai bagian dari gambaran keseluruhan.
- 4) Pola kelembagaan masyarakat seperti negara agama, pendidikan, ekonomi dan keluarga, dikonsepsikan sebagai peran-peran dari organisasi.
- 5) Pandangan pluralis masyarakat adalah suatu yang heterogen yang ditunjukkan oleh banyaknya budaya-budaya dan kelompok-kelompok minat. Masyarakat dalam posisi berjalan yang terdiri dari kelompok-kelompok minat dan pertentangan budaya-budaya.
- 6) Visi masyarakat yang ambivalens menuju adanya aturan yang konsisten dengan visi yang pluralis. Masyarakat sebagai gambaran-gambaran kerjasama yang antagonistic menuju keseimbangan kekuatan terjadi pertarungan organisasi di satu

pihak, dan di pihak lain terjadi kesepakatan atau kontrak sosial.

14. Sifat Dasar Ilmu Pengetahuan

- 1) Idealisme sebagai basis pengetahuan manusia.
- 2) Tindakan manusia sulit diprediksi (Weber, nomotetis dan ideografis).
- 3) Unit analisis utama adalah individu targetnya adalah suatu kesadaran yang dimiliki pribadi.
- 4) Teori sosiologi tidak menjawab pertanyaan yang sifatnya model absolut, sebab tidak ada teori yang tangguh dan tahan untuk difalsifikasi. Sistem pemahamannya pada tindakan interpersonal dan realitas konstruksi sosial. Dengan cara demikian akan terungkap ide-ide yang mempertinggi kesadaran bagaimana interpretasi terhadap aktor-aktor sosial yang membuat kehidupan empirik tentang mereka.

15. Paradigma Pluralis

1. Citra dari sifat dasar manusia. Asumsinya yaitu intensional, aktif, voluntaris, dan rasional. Tipe idealnya kesadaran dari Kant.
2. Citra masyarakat. Asumsinya: kerjasama antagonistik, kekuatan pikiran, pemebrian makna-makna, terbentuk dari dalam ke luar. Tipe idealnya kontrak sosial dari Rousseau.
3. Citra pengetahuan. Asumsinya: tindakan manusia yang tidak diprediksi, diambil dari dalam, kualitatif. Tipe idealnya adalah pemahaman (verstehen)

16. Pokok Pemikiran Weber

- 1) Tindakan individu dalam arti subjektif. Menurut posisi nominalis termasuk Weber bahwa hanya individulah yang riil secara objektif, sedangkan masyarakat hanyalah satu nama yang menunjuk pada sekumpulan individu. Pemahaman subjektif (verstehen) adalah sebagai metode untuk

memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti subjektif tindakan sosial. Dalam hal ini yang penting adalah empati: yaitu kemampuan menempatkan diri pada kerangka berpikir orang lain yang berperilakunya mau dijelaskan juga situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif. Pandangannya mengenai pengetahuan ilmiah, bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan nilai (*value Judgment*). Pengetahuan ilmiah adalah bersifat netral dalam menilai posisi-posisi moral, tetapi dalam aplikasinya tidak bebas nilai.

- 2) Tipe ideal menurut Weber adalah suatu teknik metodologi dengan cara penekanan yang berat sebelah (*berpihak*) mengenai suatu pokok pandangan atau lebih, sintesa gejala-gejala individual kongkrit, tersebar, sifatnya sendiri-sendiri yang ada atau tidak ada, kurang lebih diatur menurut titik pandang yang diberi tekanan secara berat sebelah ke dalam suatu konstruksi analitis yang terpadu. Tidak mengandung nilai karena tipe ideal digunakan untuk pertimbangan analisis bukan evaluasi. Contohnya birokrasi sebagai tipe ideal untuk kelancaran suatu organisasi, meskipun dalam prakteknya adalah instrumen kolusi, korupsi dan nepotisme. Birokrasi sebagai tipe ideal dasarnya peraturan, keahlian yang cirinya sistematis, berfungsi, tunduk pada kondisi terbatas, hirarkis, norma teknis dan staf administrasi terpisah dengan alat produksi.
- 3) Tipe-tipe tindakan sosial. Tipe tindakan sosial dasarnya adalah rasionalitas, yang dibagi menjadi:
 - (a) Rasional instrumen adalah tindakan rasional paling tinggi, pertimbangan dan pemilihannya secara sadar berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya.
 - (b) Rasional yang berorientasi nilai adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Tujuan-tujuannya sudah ada dalam

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai akhir ini bersifat nonrasional, sehingga tidak dapat memperhitungkan secara objektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Pertimbangan nilai rasional seperti kegunaan, efisiensi dan lainnya tidak diperhitungkan.

- (c) Tindakan Tradisional adalah tindakan sosial yang bersifat nonrasional, seperti tindakan kebiasaan, tanpa refleksi sadar atau perencanaan.
 - (d) Tindakan Afektif adalah tindakan yang ditandai dengan dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tidak hanya pertimbangan logis, ideologis atau kriteria rasionalitas lainnya.
- 4) Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dasarnya adalah ekonomi, budaya dan politik. Ukuran ekonomi dasarnya sumber dalam kesempatan hidup, pemilikan benda untuk memperoleh kesempatan, kondisi komoditas dalam pasar tenaga kerja. Untuk kelompok status dasarnya kehormatan atau *prestise*.
- 5) Tipe otoritas meliputi: (a) Otoritas Tradisional dasarnya kekudusan tradisi jaman dulu, legitimasi status menggunakan otoritas yang dimilikinya. Ada *gerontokrasi* yaitu kelompok orang tua yang berkuasa. *Patriarkalisme* yaitu satuan kekerabatan (otoritas warisan) dan *patrimonialisme*, dimana staf administrasi yang punya hubungan pribadi dengan pemimpinnya. Seperti pegawai pemerintah yang lahir dalam rumah tangga pemimpin. *Feodalisme* adalah sistem dominan tradisional, dimana otoritas patrimonial berkurang hubungan administratif dikendalikan kontrak bukan oleh pegawai. Sedangkan *sultanisme* adalah sistem patrimonial, kekuasaan dan otoritas penguasa adalah maksimal. (b) Otoritas Kharismatik, dasarnya mutu atau kualitas luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi (c) Otoritas Legal Rasional adalah otoritas yang didasarkan terhadap

seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal, contohnya organisasi birokrasi.

- 6) Orientasi Agama. Maksudnya bahwa ide agama mempunyai pengaruh independen terhadap perilaku manusia. Ide agama berperan dalam meningkatkan perubahan sosial. Contohnya ada hubungan antar keyakinan Protestan dengan perkembangan kapitalisme. Hal ini terjadi karena konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik. Etika protestan memunculkan kapitalisme akibat etikanya yang memperlihatkan suatu orientasi agama bersifat asketik dalam dunia (*inner worldly*). Menolak kesempatan menuruti keinginan fisik atau inderawi/kenikmatan yang bersifat materi untuk mengejar suatu tujuan yang lebih tinggi yang bersifat spiritual. Tujuan yang bersifat spiritual ini harus dicapai melalui suatu komitmen yang sistematis dan rajin dalam melaksanakan tugas di dunia. Konsep sebaliknya dari “*inner worldly*” adalah “*other worldly*”. Etika protestan (*Calvinisme*) menyatakan harga pantas adalah mempertahankan status tradisionalnya, dilarang membangun uang (*riba*), kegiatan ekonomi sebagai keharusan dalam mempertahankan hidup, manusia kedudukannya sama di hadapan Allah, bekerja sebagai tugas agama dan kegiatan ekonomi adalah menegakkan moral individu dan mencari orang pilihan. Orientasi agama seperti demikian, nampaknya ada juga dalam ajaran agama lain, contohnya dalam agama islam dari Al-Quran dan Al-Hadist banyak memberikan inspirasi untuk keberhasilan dalam kerja, bisnis atau dalam prestasi ilmu pengetahuan. Hal tersebut telah dibuktikan jaman keemasan oleh umat Islam pada sekitar millineum pertama.

C. Pengantar Teori Ilmu Sosial Dan Realitas Sosial

Menyatakan betapa luasnya khazanah teori ilmu sosial, akan tetapi dituntut sebagai perspektif dalam pengkajian Ilmu

Sosial Dasar. Maka untuk kepentingan tersebut, diambil beberapa teori ilmu sosial yang dirasakan penting untuk mengkaji realitas sosial. Hal ini tentu tidak disajikan secara lengkap dan utuh, yang tentu bukan tujuan dari Ilmu Sosial Dasar itu sendiri. Akan tetapi teori yang disajikan dalam porsi sederhana dan ringkas sifatnya. Untuk mencapai tujuan materi Bab II ini, mencoba menghubungkan berbagai paradigma ilmu sosial dengan berbagai tingkat analisis realitas sosial. Melalui usaha ini, diharapkan para mahasiswa tidak terseret di “rimba raya” teori ilmu sosial maupun realitas sosialnya. Minimal tahu berangkat dari teori apa (dedukasi) atau sebaliknya dari hal-hal yang spesifik menuju ke hal-hal yang bersifat umum (induksi).

Masyarakat sebagai realitas sosial, apabila dihubungkan dengan paradigma ilmu sosial wawasannya sangat luas. Paradigma realitas sosial, artinya melihat gambaran yang mendasar mengenai realitas sosial (masyarakat) menurut kacamata ilmu sosial. Tingkatan kenyataan sosial. Tingkatan kenyataan sosial ada empat tingkatan yaitu :

1. Tingkat individual

Tingkat ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian untuk analisa. Tingkat individual ini, analisisnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: tingkat perilaku (behavioral) dan tingkat subjektif. Tingkat individual ini banyak dikaji ahli psikologi.

Teori dasar-dasar psikologi (sosial) yang mengkaji tingkat individu ini, meliputi teori *stimulus-respons* (S-R), teori sikap, teori peran, dan teori lapang (medan). Teori *stimulus-respons* (S-R), sebenarnya adalah teori *stimulus organisme respons* (S-O-R) sebab diakui adanya intervensi organisme antara stimulus dan repons. Tokoh teori ini adalah Watson, yang menyatakan bahwa objektivitas perilaku individu hanya berlaku pada perilaku yang nampak (overt). Setiap perilaku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respons) terhadap rangsang (stimulus), karena itu rangsang mempengaruhi tingkah laku atau bahkan

menentukan tingkah laku. Intervensi organisme terhadap stimulasi-rangsang, individu (organisme) ini memiliki potensi berupa kognisi sosial, persepsi sosial, nilai dan konsep.

Teori lainnya adalah *teori sikap*, sikap dalam hal ini adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi apabila ada stimulasi, komponen kognisi, afeksi konasi akan menentukan suasana sikap.

Teori peran, beranggapan bahwa peranan seseorang itu merupakan hasil interaksi dari diri (self) dengan posisi (status dalam masyarakat) dan dengan peran (menyangkut norma dan nilai). Yang penting dalam teori peran ini adalah aktor (pelaku) dan target (sasaran) yang mempunyai hubungan dengan aktor.

Teori medan (field-theory), beranggapan bahwa ruang kehidupan (life space) merupakan penentu dari perilaku seseorang. Ruang kehidupan ini merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya.

Teori yang mengkaji individu adalah psikoanalisa dari Freud. Ia membedakan tiga sistem dalam hidup psikis yaitu, *ide, Ego, dan Superego*. Istilah dalam psikoanalisa dikenal sebagai tiga “instansi” yang menandai hidup psikis.

Instansi pertama Id adalah lapisan psikis yang paling dasar terdiri dari naluri-naluri bawaan (seksual dan agresif) dan keinginan-keinginan yang direpresi. Id tidak terpengaruh kontrol *Ego* dan prinsip realitas. Pada Id yang berkuasa prinsip kesenangan yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal hukum-hukum logika.

Instansi kedua *Ego* adalah hasil deferensiasi dari Id karena kontak dengan dunia luar. *Ego* (bukan pengertian Aku) aktivasnya dapat sadar, prasadar atau tidak sadar. Contoh aktivitas sadar adalah persepsi lahiriah, persepsi batiniyah, dan proses-proses intelektual. Aktivitas prasadar contohnya fungsi ingatan. Aktivitas prasadar contohnya fungsi ingatan. Aktivitas tak sadar *Ego* dijalankan dengan mekanisme-mekanisme

pertahanan (defence mechanisms). Potensi *Ego* dikuasai oleh prinsip realitas seperti pemikiran objektif yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan sosial dan rasional dan diungkapkan melalui bahasa. Tugas *Ego* adalah mempertahankan kepribadiannya, adaptasi dengan lingkungan, menghilangkan konflik dengan realitas dan mendamaikan konflik-konflik berbagai keinginan agar selaras. *Ego* berfungsi pula sebagai filter apa-apa yang masuk ke sifat sadar dan apa-apa yang masuk ke sifat sadar dan apa-apa yang akan dikerjakan. Dapatlah dikatakan bahwa *Ego* berfungsi sebagai penjamin kesatuan pribadi dan alat sintesa.

Instansi ketiga *superego* terbentuk hasil internalisasi, yaitu pembatasan dari norma-norma atau nilai-nilai yang datang dari luar, diolah sedemikian rupa sehingga terpancar dari dalam. *Superego* adalah potensi hasil dari proses internalisasi, sehingga menjadi miliknya berasal dari subjeknya sendiri, meskipun sebelumnya berasal dari luar dirinya. Aktivitas *superego* dinyatakan dengan konflik dengan *Ego* yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal dan lain sebagainya. Sikap mawas diri, kritik diri dan *inhibisi* adalah berasal dari *superego*.

Ketiga instansi, *Id*, *Ego* dan *Superego* potensinya pada setiap individu berbeda-beda. Ada individu yang tekanannya lebih kuat pada *Superego* dan lemah pada *Id* dan *Ego*, pokoknya ketiga instansi itu bervariasi kekuatannya pada setiap individu.

Teori ini, dapat membantu menjelaskan bagaimana interaksi individu dengan dirinya sendiri atau peranan lingkungan dalam memengaruhi potensi ketiga instansi tersebut.

Ajaran (Islam) yang dikemukakan oleh Al-Ghazali (abad ke 11) tentang *konflik dalam fitrah manusia* 8 abad lebih dulu dari pada teori psikoanalisis Freud, yang mengemukakan bahwa manusia mempunyai tiga tahap perkembangan jiwa yaitu:

- 1) *Nafs-al-amarah bil alsu*, yaitu nafsu jahat yang mendesak agen moral untuk melampiaskan tuntutan-tuntutan yang tidak terkontrol atau nafsu aku yang mengendalikan kejahatan. Individu tunduk kepada tujuan-tujuan yang

didasari oleh sikap emosi, hatinya diperbudak oleh tujuan tersebut. Dalam Al-Qur'an dinyatakan :

“...*nafsu ini selalu menyuruh kepada kejahatan... (QS. 12:53)*”

- 2) *Nafs-al-lawwamah* atau nafsu yang disalahkan, yaitu nafsu yang sadar apabila tuntutan-tuntutan naluriah dilampiaskan atas pengaruh *nafs-al-amarah*. Nafs ini, berusaha melawan *nafs-al-amarah*. Perkembangan jiwa sehat terletak pada aksi timbal balik, dimana *nafs-al-lawwamah* mengalahkan *nafs-al-amarah*. Sekali nafsu jahat ini dikalahkan, maka manusia memasuki tahap jiwa di atas nafsu yang sadar yaitu nafsu yang ketiga. Al-Quran menyatakan:

“*Dan aku bersumpah dengan jiwa (nafsu) yang amat menyesali (dirinya sendiri)*”. (QS.75:2)

- 3) *Nafs-al-muthmai'annah* (nafsu yang tenang tentram), merupakan keadaan kepuasan tertinggi dari *nafs*. Keadaan nafsu atau jiwa ini, betul-betul memperoleh kepuasan yang lengkap dan bebas dari semua keputus-asaan dan penderitaan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

“*Hai Jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya*”. (QS.89:27-28).

Antara Al-Ghazali dan Freud sama-sama mengungkapkan spektrum kesadaran. Hanya kesadaran yang dikemukakan Freud terjadi dari proses perjalanan dan mekanisme otak yang kompleks, sehingga tidak mengandung kepribadian baru di luar dunia materi sebagaimana yang diterangkan Al-Ghazali. Konsep Al-Ghazali dalam spektrum kesadaran ini sampai pada hakikat kesadaran spiritual. Kedua teori ini sangat menarik untuk mengkaji interaksi individu dengan dirinya sendiri.

2. Tingkat Antarpribadi (Interpersonal)

Tingkat ini meliputi interaksi antarindividu dengan semua arti yang berhubungan dengan kerjasama, konflik, adaptasi, negoisasi komunikasi simbolis dan hal ini yang mempunyai arti hubungan. Tingkatan ini banyak dipelajari ahli sosiologi (interaksionisme simbolik).

Teori Interaksionisme Simbolis dipelopori oleh George Herbert Mead (1863-1931), seorang “Professor of Philosophy” di Universitas Chicago. Tulisanya banyak dikembangkan oleh muridnya Herbert Blumer. Blumer berperan dalam memberikan interpretasi dan mengintegrasikan pemikiran Mead, sehingga mempunyai ciri pemahaman khusus tentang perspektif. Interaksionisme Simbolis muncul sebagai pandangan atas “realitas sosial”. Teori ini lebih banyak memperhatikan dimensi subjektif, seperti hubungan antara proses-proses simbol subjektif dan interaksi antar pribadi, kenyataan sosial yang muncul dari interaksi dilihat sebagai kenyataan yang dibangun dan bersifat simbol. Inilah yang membedakan kenyataan sosial dengan kenyataan fisik objektif.

Interaksionisme Simbolis memperhatikan dinamika-dinamika interaksi tatap muka, saling ketergantungan yang erat antar konsep diri individu dan pengalaman kelompok kecil, negoisasi mengenai norma-norma bersama dan peran-peran individu, serta proses-proses lainnya yang mencakup individu dan pola-pola interaksi dalam skala mikro. Tetapi konsep pokoknya diuraikan melalui pengertian-pengertian: “Self”, “Mind”, “Society” dan “Action”.

Pikiran, diri, dan masyarakat (mind, self and society) nyata memberi hak kepada masyarakat. Diri dan pikiran ada sejak individu-individu dilahirkan pada suatu masyarakat, dan apa yang nampak karakteristik manusia sebagai “self” dan “mind”. Tentu dalam hal ini simbol-simbol menjadi pokok apa yang timbul dan interaksi. Manusia juga merupakan “sosial”, di mana masyarakat memecah unsur-unsur dasar, simbol-simbol, “self” dan “mind”.

“Self” di dalam perspektif Interaksionisme Simbolik sebagai objek sosial, semua objek sosial dibentuk melalui interaksi dengan yang lain. Ketika dikatakan suatu diri (self) maka ini adalah suatu objek sosial. Pertama kali kita katakan semua individu datang untuk melihat dirinya berinteraksi dengan yang lain. Begitu individu keluar maka mulai dengan pengertian ”Kamu Andrew”, “kamu orang menyenangkan”, kamu seorang laki-laki” dan lain-lain. Individu menjadi objek bagi dirinya sebab dari yang lain. Diri (self) adalah suatu proses sebagaimana objek sosial terbentuk melalui interaksi dalam keluarga, misal dengan orang tua, atau dengan yang lain, terus dalam keadaan berubah individu berinteraksi dengan berbagai macam situasi.

G.H.Mead membuat tahapan tentang pengembangan diri sebagai berikut :

1. *Tahap Persiapan.* Tahap ini merupakan tahap peniruan (imitation) murni dan sebagai objek sosial termasuk “self” dan semua pengertian yang belum sempurna dalam kata-katanya.
2. *Tahap bermain.* Tahap ini merupakan tahap mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan. Tahap ini berasumsi bahwa perspektif hanyalah satu kenyataan lain pada suatu saat. Saat ini individu belum sanggup melihat diri-diri orang lain dan perspektif yang rangsangannya sangat banyak dari banyak orang.
3. *Tahap permainan.* Tahap ini menggambarkan organisasi dan kebutuhan berasumsi perspektif dari banyak rangsangan. Seperti kerja sama dalam kehidupan kelompok perlu suatu perangkat pengetahuan tentang posisi dalam suatu hubungan yang kompleks. Pada tahap ini “self” yang dewasa mencoba membuat “yang lain digeneralisasi”, lebih menyatu tidak self yang bersifat segmental (terputus-putus). Suatu generalisasi berupa “mereka” atau “masyarakat”.
4. *Tahapan kelompok referen.* Dalam tahap ini individu mempunyai banyak kelompok referen (masyarakat) dan

masing-masing dari mereka membentuk sebuah perspektif, termasuk perspektif, termasuk perspektif pada “self”. Diri sebagai objek sosial terus menerus dalam perubahan interaksi dan berubah.

“Mind” (pikiran) adalah suatu kesadaran untuk memudahkan pemahaman. “Mind” adalah integrasi dari konsep simbol dan self.

Pikiran adalah tindakan, tindakan yang menggunakan simbol. Pikiran adalah interaksi simbolik dengan diri, aktivitas simbolik organisasi yang langsung di arahkan pada diri sendiri. Mead menggambarkannya sebagai suatu keadaan mental yang terwujud melalui pembicaraan, yang merupakan respon intelegen. Blumer menyatakan, bahwa pikiran adalah aktivitas tersembunyi kesadaran. Pikiran membuat kemungkinan untuk tindakan berulang-ulang. Mead menggunakan istilah sikap untuk mengartikan suatu jalan tindakan di mana individu memutuskan untuk bergerak kepada suatu objek.

Pikiran tidak melalui tindakan individual, namun menyangkut interaksi dengan orang-orang lain. Di sini pikiran berfungsi untuk mendefinisikan situasi-situasi sosial, yang berarti bahwa kata-kata orang-orang lain harus dimengerti dan diinterpretasikan. Sebaliknya juga, orang-orang lain harus dimengerti dan diinterpretasikan. Sebaliknya juga, orang-orang lain berlaku seperti kita. Pikiran adalah interaksi simbolik dengan diri, dan ini terjadi dari interaksi dengan orang-orang lain. Dalam interaksi-interaksi itulah pikiran berproses untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan untuk kembali menyesuaikan diri pada situasi-situasi sosial.

Dalam pandangan interaksionisme simbolik setiap interaksi dan kelompok-kelompok organisasi bersifat sementara, atau sedikitnya suatu masyarakat berada dalam suatu tingkatan perkembangan. Semua kelompok terbentuk dari individu-individu yang berinteraksi. Masyarakat didefinisikan sebagai orang-orang dalam interaksi.

Sjibutani menekankan bahwa masyarakat sebagai dunia sosial yang terbentuk oleh individu-individu yang berkomunikasi dengan simbol-simbol. Kelompok adalah tindakan sosial yang timbal balik, yang berarti masing-masing orang berhubungan. Blumer menandai bahwa kelompok adalah tindakan-tindakan bersama. Sebagai suatu tindakan kerjasama.

Masyarakat diartikan juga sebagai tindakan kerja sama dalam memecahkan masalah. Kerja sama di sini melulu harus memiliki tujuan yang sama bisa saja memiliki tujuan yang berbeda. Di sini berarti bahwa masyarakat berpokok pada kesaling-bergantungan di mana masing-masing anggotanya saling membantu untuk memecahkan permasalahan dengan demikian bahwa masyarakat dibentuk oleh orang-orang yang mampu membawakan peran lain, dan mengerti tindakan-tindakan.

Namun *interaksionisme simbolik* pun melihat bahwa seseorang dibuat oleh masyarakat. Kita dilahirkan dalam kelompok dan kelompok itu mempengaruhi pertumbuhan kita. Berarti di sini individu dibatasi oleh masyarakat, misalnya oleh bahasa dan sejarah atau oleh aturan yang telah ada.

Tindakan adalah pola kelakuan yang terorganisasikan. Tindakan ditandai objek-objek dan contoh yang paling baik dari objek-objek sosial, karena seperti disebutkan Warriner, tindakan-tindakan *sosial* didefinisikan oleh orang dan diberi nama. Realistis suatu tindakan berlangsung terus-menerus, suatu proses konstan yang tidak pernah berakhir, kecuali kita mati.

Tindakan dibentuk dalam situasi-situasi, dimana seseorang membatasi tujuan, memasuki dan menjaga *jarak*. Masing-masing tindakan dimulai dengan suatu tujuan dan berakhir dengan hasil-hasil tujuan. Objek tindakan tentu saja dalam hal ini menyangkut orang lain.

Mengapa manusia bertindak. Ada tiga alasan: *pertama*, karena dia memerlukan untuk bertindak; *kedua*, *karakteristik-karakteristik* pribadi, sikap, kepentingan, *image* diri

mendorongnya untuk bertindak; dan *ketiga* faktor lingkungan yang mendorongnya untuk bertindak.

Menurut konsep Mead tindakan menyangkut empat tingkatan: tingkat pertama, gerak hati (*impulse*), yakni menempatkan diri secara untuk bertindak (*impulse is a "generalized disposition to act"*). Tingkatan kedua, persepsi, dimana seseorang mendefinisikan situasi yang akan dimasuki. Tingkatan ketiga, manipulasi, yakni me manipulasi situasi dengan kontak yang berhubungan *dengan* aspek-aspek yang relevan dalam situasi. Dan tingkatan keempat, pertempuran (*consummation*), yakni merupakan akhir tindakan di mana tujuan berhasil atau memperbaiki keseimbangan.

Menurut Mead, tindakan dimulai dengan aktivitas tersembunyi yang kemudian mengalir menjadi aktivitas terbuka. Namun dalam tindakan yang sudah terbiasa (*habitual action*) lebih *berhubungan* dengan tindakan yang terbuka., yang tanpa berfikir dahulu, karena didasarkan pada pengalaman masa lalu, meskipun tindakan yang tersembunyi pun turut mempengaruhi misalnya dalam mendefinisikan situasi, menganalisa masa lalu dan masa depan. Tindakan yang terbiasa lebih menyangkut pada tindakan tanpa perlu menunggu proses pikiran.

Tindakan dipengaruhi oleh masa lalu dan masa depan. Masa lalu dan masa depan adalah bagian dari *tindakan*. Keduanya adalah bagian dari tindakan karena kita memiliki rencana untuk bertindak dan konsepsi ini mempengaruhi tindakan. Disamping masa lalu pun menjadi kekuatan yang mempengaruhi tindakan. Disamping itu tindakan ini berhubungan pula dengan motif-motif, yakni keadaan internal yang menjadi arah situasi-situasi bagi aktor.

Seperti diketahui bahwa setiap tindakan selalu tindakan sosial apabila seseorang mengarahkan pada orang-orang lain. Dan tindakan sosial ini adalah tindakan orang-orang lain dalam pikiran. Dalam pengertian ini biasanya adalah usaha mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain.

Membawakan peran orang lain berarti melihat dunia dari perspektif orang lain. Ada empat tingkat yang berhubungan dengan proses ini: *pertama* adalah tingkat persiapan, yakni meniru tindakan orang lain; *kedua*, memainkan, yakni membawa peran orang-orang lain; *ketiga*, bermain (game) yakni telah memasuki situasi-situasi; *keempat*, tingkat kelompok referen, yakni bahwa seseorang memiliki banyak dunia sosial yang harus dipertimbangkan dalam membawakan peran-peran itu.

Ada beberapa poin yang perlu dicatat mengenai pentingnya membawakan peran orang lain ini:

1. Untuk timbulnya kekuatan diri,
2. Untuk menjadi diri dalam segala sesuatu,
3. Untuk mempelajari perspektif-perspektif mengenai segala hal,
4. Untuk bekerja dalam segala situasi-situasi sosial,
5. Untuk menolong seseorang dalam situasi interaksi melalui pengetahuan bagaimana memanipulasi, mengarahkan dan mengontrol
6. Untuk mencintai orang lain,
7. Sebagai dasar untuk kerjasama,
8. Sebagai dasar untuk komunikasi simbolik manusia. Selain konsep pokok “self”, “mind”, “society” dan “action” yang dibahas interaksionisme simbolik, juga teori ini membahas interaksionisme individu, masyarakat dan pikiran. Pendapatnya dikemukakan dalam lima hal berikut:

1. Individu tidak konsisten, pribadinya terbentuk mesti dalam suatu proses dinamik, pelaku berubah, tidak pernah menjadi sesuatu, tetapi dalam keadaan menjadi, individu bukan hasil sosialisasi, bukan perangkat yang tetap, tetapi dalam keadaan berubah dalam proses interaksi.
2. Masyarakat dan kelompok dikonsepsikan tidak sebagai yang statis, terpengaruh, tetapi dalam proses interaksi. Masyarakat adalah individu dalam proses interaksi,

dinamis dengan pola-pola yang tampil dan konstan berubah atau dibetulkan setiap saat. Apa yang dimaksud dalam masyarakat adalah pola yang disimpulkan dari proses interaksi.

3. Mempunyai ciri-ciri memiliki suatu pikiran dan diri, tetapi keduanya dikonsepsikan sebagai proses bukan sebagai kesatuan yang statis. Orang yang tidak mempunyai pikiran tetapi harus dalam proses berfikir, pengertian pada kesanggupan untuk berbicara dengan dirinya, dan kesanggupan memberikan rangsangan selektif dari lingkungannya, menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dari dirinya.
4. Manusia mempunyai banyak diri, masing-masing berhubungan dan berinteraksi, tetap dalam perubahan proses interaksi.
5. Kebenaran, ide-ide, sikap, persepsi dan perspektif semuanya sebagai proses berpendapat dari perubahan yang dinamis oleh organisme didalam berhubungan dengan apa yang akan diselidiki. Manusia otaknya tidak dicuci atau dikondisikan.

Asumsi interaksionisme simbolik yang sederhana dikemukakan oleh Blumer sebagai berikut :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial” seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut dimodifikasi (disempurnakan) melalui suatu proses penafsiran oleh individu dalam keterikatannya dengan simbol-simbol yang dihadapi.

Nampak bagi kita, bahwa pemahaman teori interaksionisme simbolik tentang tingkat antar pribadi lebih menekankan pada segi pemahaman makna (kesamaan makna) dari simbol. Sehingga, teorinya sulit disimpulkan, tidak memperhatikan motivasi, persepsi intuitif, penghayatan,

penentuan diri dan penilaian etis pelaku. Teori ini kurang memberikan sumbangan bagi pengkajian perilaku yang realistis, sebab lebih memusatkan diri pada kesadaran subjektif dan interaksi setingkat mikro. Tetapi, teori ini membimbing kearah metode penelitian dan merangsang penelitian yang bersifat empiris.

Teori lain yang mengkaji masalah hubungan antar pribadi (interpersonal) adalah teori *interaksi* dari Simmel (1858-1918). Penjelasan Simmel tentang interaksi adalah sebagai berikut : (1) Masyarakat terbentuk dari jaringan relasi-relasi antar orang, sehingga mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam jaringan relasi tersebut terjadi aksi dan reaksi yang tak terbilang banyaknya, sehingga masyarakat merupakan proses dinamis yang ditentukan oleh perilaku anggotanya. (2) Jaringan relasi-relasi itu tidak sama sifatnya, artinya dari jaringan relasi tersebut dapat terbentuk komunitas asosiasi. Bahkan ada tendensi ada pergeseran dari pola relasi afektif dan personal menjadi fungsional dan rasional. (3) Dalam jaringan relasi tidak selamanya terbentuk integrasi dan harmonis, tetapi dapat pula terjadi kritik. Oposisi, konflik dan lain-lain. Bagi strukturasi sosial yang sehat maka kritik, oposisi, persaingan sama-sama diperlukan, sebagaimana halnya kesesuaian paham, persahabatan dan partisipasi. Keduanya, baik hal negatif atau positif menurut pandangan sepintas sebenarnya mempunyai efek positif dalam proses interaksi. Tindakan yang dianggap negatif menurut individu-individu, sebenarnya mempunyai akibat positif bagi keseluruhan relasi yang ada dalam masyarakat atau organisasi. (4) Frekuensi interaksi dan kadar interaksi bervariasi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Semakin penting hal yang mempertemukan orang dalam relasi timbal balik, semakin cepat relasi-relasi itu dilembagakan.

Jadi pada intinya Simmel memandang masyarakat sebagai *produk* dari proses interaksi individu-individu. Terjadinya interaksi akibat dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga akibatnya ada kesatuan sosial yang sifatnya dapat lama

atau sementara. Tujuan dan dorongannya itu sendiri bukan sosial tetapi sebagai isi sosialisasi. Proses sosialisasi itu sendiri terdapat bentuk-bentuk yang berupa interaksi.

Teori yang mengkaji antarpribadi dalam sosiologi adalah Homas, dikenal dengan *Teori Pertukaran (exchange theory)* antarpribadi. Antar pribadi terjadi pertukaran karena keadaan internal (tidak mampu mengatasi keinginan atau kondisi), dan keadaan eksternal (ada konsensus nilai,pelebagaan).

Dasar psikologis pertukaran, karena dukungan sosial dan faktor penguat, sehingga terjadi transaksi atau saling memberi, timbal balik, memperoleh keseimbangan emosional atas dasar pribadi. Teori sosiologi lainnya tentang individu, adalah *Teori Dramaturgi* dari Goffman. Teori ini menyatakan bahwa individu senantiasa akan mengontrol kesan-kesannya dalam hubungan sosialnya yang diberikan kepada orang lain. Contohnya, terjadi pada saat pesta atau adanya stigma yang menghambat interaksi sosial, aktor senantiasa akan menutupi segala kekurangannya.

3. Tingkat Struktur Sosial

Tingkat struktur sosial bersifat abstrak, perhatiannya atau analisisnya ditunjukkan pada pola-pola tindakan, jaringan-jaringan interaksi yang teratur dan seragam dalam waktu dan ruang, posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Tingkat struktur ini dapat pula menyangkut institusi-institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori yang membahas tingkat struktur ini, dipelopori oleh tokoh klasik seperti Durkheim, Marx dan tokoh modern melanjutkan pemikirannya. Pelanjut tokoh klasik ini diantaranya adalah Parson, Merton, Cosser, Michel Collins, dan lain-lain. Tingkat analisis struktur ini, secara garis besarnya memandangi struktur sosial (masyarakat) sebagai berikut:

a. Masyarakat sebagaimana halnya organisme hidup

Konsep ini hanyalah metafor dalam rangka memudahkan analisis sosiologis. Meskipun ada juga para ahli dengan sebenarnya , bahwa masyarakat itu sama

halnya dengan organisme biologis. Seperti pendapat Radcliffe Brown bahwa struktur sosial itu mempunyai unit yaitu individu (sama dengan sel), mempunyai struktur hubungan antar individu (sama dengan hubungan antar sel), mempunyai aktivitas berupa tingkah laku dan kolektivitas (sama dengan tingkah laku sel), dan mempunyai fungsi berupa pemeliharaan struktur sosial (sama dengan penyesuaian dan pemeliharaan aktivitas sel bagi strukturnya).

Ahli lainnya, Durkheim mengajukan beberapa konsep tentang masyarakat. Pertama bahwa masyarakat merupakan asas solidaritas, memiliki perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkokoh oleh adanya pengalaman emosional. Konsep ini sebenarnya, jauh sebelumnya pada abad ke-13 sudah diungkapkan oleh sosiologi Muslim Ibnu Chaldun dengan teorinya tentang “ashabiyah” atau perasaan cinta golongan. Menurut Ibnu Chaldun solidaritas sosial muncul karena mengutamakan segi akhlak atau moral dan menempatkan orang pada peranannya yang tepat serta faktor geneologis atau keturunan. Pemikiran Ibnu Chaldun ini memberikan inspirasi bagi sosiolog generasi selanjutnya.

Menurut Durkheim masyarakat menampilkan aspek solidaritas organis dan aspek solidaritas mekanis. Solidaritas organis adalah hasil evolusi dari solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis terjadi dalam masyarakat maksudnya adanya kesadaran kolektif, kepercayaan, sentimen ruang lingkup hukum yang menekan (refresif) dan komitmen moral. Keadaan demikian terjadi pada masyarakat yang homogen. Sedangkan solidaritas organis, setiap anggota masyarakat merasakan adanya saling ketergantungan kompleks, ada saling kebergantungan fungsional, menganut nilai dan norma umum bersama serta ruang lingkup hukum bersifat memulihkan (resitutif).

Solidaritas organis ini, dirasakan pada masyarakat heterogen. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi, pada solidaritas mekanik akan terjadi kelompok-kelompok kecil hasil perpecahan, sedangkan pada solidaritas organis akan muncul sikap individualisme, adanya deferensiasi pembagian kerja yang menyebabkan kesadaran kolektif berkurang sehingga timbul anomie atau kehidupan yang mengatur kehidupan sosial.

b. *Masyarakat sebagai sistem sosial*

Sistem sosial merupakan pendekatan lain untuk menganalisis masyarakat, tetapi masih merupakan pengembangan dari teori struktur sosial Brown, Malinowski dan Durkheim. Teori sistem sosial ini, merupakan teori yang dikembangkan Talcott Parson sehingga mencapai puncak yang paling berpengaruh dalam sosiologi di Amerika. Teori sistem sosial dikenal dengan teori struktural-fungsional, yang menganggap masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (equilibrium). Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Keanekaragaman pandangan, etnis, agama, dan lainnya adalah “diperlukan” atau ada fungsinya dalam masyarakat. Kalau pun terjadi konflik maka yang diperhatikan adalah bagaimana cara mendamaikannya, sejauh dapat diatasi konflik itu selalu dihindari.

Pendekatan struktural-fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk keseimbangan, sehingga sering disebut pula pendekatan tertib sosial, pendekatan integrasi atau pendekatan keseimbangan. Asumsi dasar dari pendekatan struktural fungsional adalah:

- 1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- 2) Hubungan antar setiap bagian adalah bersifat saling mempengaruhi dan timbal balik.
- 3) Sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis, artinya menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan memelihara perubahan yang terjadi agar perubahannya terjadi secara minimal. Meskipun menyadari bahwa integrasi sosial tidak mungkin tercapai secara sempurna.
- 4) Sistem sosial selalu mengarah ke integrasi sosial, melalui penyesuaian ketegangan-ketegangan dan proses institusionalisasi.
- 5) Perubahan sosial terjadi secara gradul, melalui penyesuaian-penyesuaian. Walaupun terjadi perubahan secara drastis, maka yang berubah itu hanya bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang dasar tidak berubah.
- 6) Perubahan sosial yang terjadi, disebabkan oleh upaya penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap pengaruh yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional dan akibat adanya penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat itu sendiri.
- 7) Daya integrasi yang paling tinggi dari suatu sistem sosial, akibat adanya konsensus nilai-nilai yang merupakan prinsip dan tujuan dasar dari anggota masyarakat.

Teori struktural fungsional, sering pula disebut teori konsensus. Hal ini menurut Cohen (1968) teori struktural fungsional memiliki serangkaian asumsi eksklusif sebagai berikut:

- 1) Norma-norma dan nilai-nilai merupakan unsur-unsur dasar dari kehidupan sosial

- 2) Kehidupan sosial melibatkan komitmen
- 3) Suatu masyarakat memerlukan keadaan kohesif
- 4) Terwujudnya suatu kehidupan sosial bergantung kepada solidaritas.
- 5) Suatu kehidupan sosial didasarkan kepada respirositas dan kerjasama
- 6) Suatu sistem sosial selalu bertahan pada konsensus.
- 7) Suatu masyarakat selalu mengenal adanya otoritas legitimasi
- 8) Sistem-sistem sosial selalu terintegrasikan ‘
- 9) Sistem sosial cenderung untuk bertahan lama.

Asumsi –asumsi yang dijelaskan oleh pandangan bahwa masyarakat sebagai sistem sosial, pada intinya berfokus pada asumsi utama bahwa masyarakat adalah sesuatu yang terintegrasikan. Hal ini akan nampak jelas dari uraian tentang persyaratan masyarakat sebagai sistem sosial.

Masyarakat sebagai sistem sosial karena mempunyai persyaratan seperti: anggotanya lebih dari dua orang, terjadi interaksi di antara mereka dan memiliki struktur. Sistem sosial memiliki 10 unsur penting (Loomis, 1960 dan Bertrand, 1967) yaitu :

1. Keyakinan (pengetahuan), yaitu keyakinan atau pengetahuan yang dimiliki oleh warga masyarakat. Tentu, keyakinan atau pengetahuan ini beraneka ragam mulai yang berasal dari dukun sampai hasil penelitian empiris. Penerimaan keyakinan atau pengetahuan ini melalui pengesahan atau pemetaan pengetahuan, sebagai usaha pengujian sebelum diterima. Keyakinan atau pengetahuan ini berfungsi sebagai alat analisa dan pegangan hidup warga masyarakat.
2. Perasaan (sentimen), yaitu mengacu kepada bagaimanaperasaan anggota masyarakat dalam menghadapi berbagai peristiwa. Perasaan ini dapat membantu menjelaskan pola-pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Fungsi lainnya yaitu

- dalam proses komunikasi perasaan, membantu meningkatkan solidaritas.
3. Cita-cita atau tujuan, setiap individu yang berinteraksi tentu mempunyai tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Demikian pula suatu sistem sosial mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
 4. Norma, yaitu patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan didalam situasi-situasi tertentu. Norma merupakan indikator atau prediksi dalam memahami aksi atau tindakan manusia didalam suatu sistem sosial. Norma menggambarkan aturan-aturan permainan atau standar untuk berperilaku, juga sekaligus sebagai alat menilai tingkah laku. Ketaatan terhadap norma wujudnya dapat berupa:
 - a. *Usage*, yaitu cara dalam bertingkah laku, tetapi tidak ada sanksi yang ada hanya sorotan atau pandangan dari orang lain.
 - b. *Folkways*, yaitu aturan dalam melakukan sesuatu yang dibenarkan umum, tetapi tidak memiliki status paksaan atau keharusan dan mempunyai daya tingkat yang lebih kuat daripada *usage*.
 - c. *Mores*, adalah norma pengatur berperilaku yang harus diikuti oleh anggota masyarakat untuk membantu terciptanya ketertiban yang diharapkan masyarakat.
 - d. *Custom*, atau disebut pula adat istiadat merupakan norma yang kuat integrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sehingga, apabila ada pelanggaran terhadap custom akan dikenakan sanksi sosial.
 - e. *Hukum*, adalah norma-norma yang meliputi kekuatan yang diorganisir secara politis.
 5. Posisi Kedudukan/peranan. Status adalah kedudukan dalam sistem sosial yang tidak bergantung kepada para

pelakunya. Sedangkan peranan, merupakan bagian daripada status yang disertai dengan norma-norma sosial (terintegrasi dalam membentuk suatu peranan).

6. Kekuasaan. Kekuasaan diartikan kemampuan atau kapasitas dalam mempengaruhi atau menguasai orang lain. Tindakan sosial terwujud karena adanya perintah dari orang yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial berlanjut.
7. Tingkatan. Tingkatan dalam sistem sosial disebut kepangkatan sosial, yang ditentukan oleh posisi status dan hubungan peranan.
8. Sangsi. Sangsi merupakan sistem ganjaran (reward) dan sistem hukuman (punishment) dalam suatu sistem sosial. Keduanya ditentukan oleh masyarakat agar normal tetap terpelihara.
9. Sarana. Sarana merupakan cara atau jalan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan sistem sosial. Sarana ini dapat berupa fisik atau non-fisik seperti kelembagaan.
10. Tekanan Ketegangan. Setiap sistem sosial akan mengalami tekanan-ketegangan, hal ini disebabkan tidak ada sejumlah individu anggota sistem mempunyai interpretasi tersebut menjadi pola tindakan, atau adanya proses sosialisasi pada sistem sosial yang tidak merata, sehingga timbul konflik atau penyimpangan.

Kesepuluh unsur sistem ini, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, menyatu membentuk struktur sistem sosial itu sendiri. Proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem sosial tersebut adalah: komunikasi, memelihara tapal batas (boundary maintenance) atau mempertahankan identitasnya, penjalinan sistem (kerjasama mencapai kesatuan tunggal), sosialisasi (proses penyerapan warisan sosial-budaya, pelembagaan (pengesahan pola tingkah laku) dan perubahan sosial (perubahan dalam pola interaksional, nilai/budaya dan struktur).

Menurut Parson, bahwa sistem sosial itu akan bekerja secara normal apabila memiliki empat kondisi dasar sebagai

alternatif, atau sebagai empat kondisi dasar sebagai alternatif, atau sebagai empat masalah yang harus diselesaikan. Parson menyambutnya kondisi atau kewajiban fungsional (functional imperatives) atau persyaratan fungsional (function prerequisites) dan menyangkut tidak hanya organisasi tetapi juga banyak membutuhkan segi kepribadian sebagai anggota masyarakat. Keempat prasyarat fungsional sistem sosial tersebut adalah:

- 1) Adaptasi. Yaitu penyesuaian sistem terhadap tuntutan lingkungan (kenyataan) kondisi lingkungan, dengan memfungsikan sejumlah fasilitas fisik dan nonfisik
- 2) Pencapaian tujuan. Yaitu tujuan anggota suatu sistem sosial, merupakan hasil persetujuan dari prioritas para anggota.
- 3) Integrasi. Merupakan tingkat solidaritas anggota sistem sosial, memiliki ikatan emosional yang tidak bergantung pada segi keuntungan (pamrih). Keteraturan perlu eksistensi, masyarakat perlu menjamin koordinasi dan pengawas di antara unsur-unsur internal dari setiap bagian sistem sosial.
- 4) Pemeliharaan pola. Yaitu setiap masyarakat harus membuat anggotanya memiliki motivasi yang cukup untuk memrankan peranan yang dikehendaki dan menghasilkan komitmen paksaan terhadap nilai-nilai masyarakat. Masyarakat sebagai sistem sosial sanggup mengatur tekanan emosi yang berkembang di antara anggota selama berinteraksi dari hari ke hari.

Untuk melihat tingkat keseimbangan dan integrasi masyarakat, Parson mengajukan konsep variabel-variabel pola (pettern variables) untuk mengkalsifikasi atau mengkategorikan norma dan nilai setiap masyarakat.

Apakah individu atau masyarakat terindensinya ke arah :

- 1) Netralitas afektif (lawannya afektif)
- 2) Orientasi diri (lawannya orientasi kolektif)

- 3) Partikularisme (lawannya universalisme)
- 4) Askripsi (lawannya prestasi)
- 5) Spesifitas (lawannya kekaburan)

Setiap masyarakat mempunyai kekhasannya masing-masing apabila konsep ini digunakan dalam analisisnya. Bahkan mungkin ada nilai atau norma perantara dari konsep Parson ini, karena mengabaikan adanya unsur yang disintegratif dalam sistem sosial. Menurut Merton ada perilaku sosial yang difungsional dan alternatif fungsional yang harus diperhitungkan, hal ini disebut fungsi manifes (manifest) dan laten (latent). Fungsi manifes adalah sebab-sebab objektif yang membantu penyesuaian terhadap sistem yang dimaksud dan diketahui oleh partisipan dalam sistem. Sedangkan fungsi laten, berhubungan dengan hal yang tidak dimaksud dan tidak diketahui, seperti faktor tradisi, birokrasi dan lain-lain.

c. *Masyarakat sebagai tertib sosial (sosial order)*

Dalam keadaan normal, dapat pula terjadi perubahan atau disorganisasi sosial, yang menyebabkan terjadinya bermacam-macam peristiwa seperti berikut:

1. Konflik norma. Norma-norma dalam masyarakat dapat terjadi konflik dengan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola atau aspek lain dari kehidupan yang menyebabkan disorganisasi.
2. Tingkat perubahan budaya waktunya tidak semua sama, tetapi terjadi “cultural lag”, yaitu tidak sama perkembangan antara budaya materi dengan mental orang yang menerima budaya materi tersebut.
3. Peraturan (sistem) yang tidak baik atau konflik antara manusia dengan lingkungannya (fisik, sosial, ekonomi, politik dll)

Disorganisasi sosial tersebut, berkaitan dengan teori tertib sosial yang diterapkan dan bahkan menentukan arah perubahan sosialnya. Teori tertib sosial tersebut meliputi empat macam yaitu: teori paksa (coercion); teori kepentingan (cooperation or mutual

interest); teori konsesus (consensus) dan teori lambat/ continuity (Cohe, 1983).

Teori Paksa (Dwang Theory) berasumsi bahwa “power” adalah sarana ampuh untuk mencapai tertib sosial. Teori ini menolak tentang realitas keanekaragaman sosial dan budaya. Keteraturan sosial diperoleh dari paksaan fisik dan moral. Paksaan moral akan diterima, apabila nilai-nilainya diterima. Teori ini sering digunakan dengan dalih pembangunan yang mendesak. Akibat dari penerapan demikian, sering timbul gerakan-gerakan dibawah tanah, persengkongkolan kutukan, dan disorganisasi sosial, tertib semu dan ketegangan (laten). Keadaan demikian akan menimbulkan perubahan sosial.

Teori Kepentingan (belangen) berasumsi bahwa masyarakat dapat tertib karena ada kesepakatan sosial dan saling percaya. Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Teori ini hanya efektif bagi masyarakat pedesaan yang bersifat homogen. Tujuan tertib sosial kepentingan dapat tercapai apabila konsesus. Dampak dari teori kepentingan ini, tentunya budaya kritik, sehingga aspirasi tidak tersalurkan. Keadaan ini akan menimbulkan perubahan sosial dengan mental budaya yang kurang menguntungkan, misalnya apatis.

Teori Kesepakatan atau Konsensus berasumsi bahwa tertib sosial dapat tercapai karena manusia terikat akan norma dan nilai, sehingga terjadi konsensus yang bersifat moral. Kelemahan teori ini, konsensus akan dipaksakan pada masyarakat yang berassifat plurastik, seperti banyaknya unsur-unsur primordial.

Teori Lambat (traagheids) menekankan perlunya suatu kondisi yang dapat mempertahankan *status quo*. Teori ini berasumsi bahwa tertib sosial dapat dicapai dengan memperlambat perjuangan unsur pokok kehidupan melalui isu-isu kecintaan, kesetiaan, kesetiaan dan disiplin. Teori ini akan menimbulkan perubahan pada segi-segi personalitas, seperti sikap mementingkan segi formal (serba formalitas) tetapi tidak menyelesaikan masalah.

Untuk menganalisis arah perubahannya sendiri, dibantu dengan perangkat teori Parson tentang *teori* tindakan, berupa variabel-variabel berpola yang memperlihatkan lima pilihan dikotomi yang harus diambil seseorang secara eksplisit atau implisit, dalam menghadapi orang lain dalam situasi sosial apa saja. Teori Parson ini, hanyalah untuk menganalisis bagaimana tindak lanjut sikap sosial masyarakat, sebagai akibat penerapan teori tertib sosial. Hasil analisis teori tindakan Parson ini, membantu dalam memberikan alternatif penerapan teori tertib sosial yang tepat.

d. *Masyarakat sebagai sub-stratum yang melahirkan konflik*

Selain tertib sosial, maka konflik adalah kenyataan yang melekat pada masyarakat. Adanya tertib sosial seperti adanya sistem nilai yang disepakati bersama, tidak secara otomatis dapat menghilangkan konflik. Bahkan merupakan cerminan adanya konflik yang bersifat potensial dalam masyarakat. Kenyataan konflik ini, menurut David Lockwood dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Setiap struktur sosial di dalam dirinya mengandung konflik-konflik dan konterdiksi-kontradiksi yang bersifat internal, sehingga dapat merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.
- 2) Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat mengatur.
- 3) Sistem sosial dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat melekat (kronis).
- 4) Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu sistem sosial tidak selamanya bersifat perlahan (gradual), tetapi dapat pula terjadi secara revolusioner.

Pandangan konflik tersebut di atas, didasarkan atas anggapan bahwa masyarakat senantiasa selalu dalam keadaan berubah. Perubahan sosial yang terjadi dalam rangka sintesa dari tesa-tesa yang berkembang pada masyarakat senantiasa selalu dalam keadaan berubah. Perubahan sosial yang terjadi dalam rangka sintesa dari tesa-tesa yang berkembang pada masyarakat

yang bersangkutan. Proses sintesa yang terjadinya konflik. Oleh karena itu pandangan pendekatan konflik terhadap masyarakat bersumber dari anggapan dasar sebagai berikut :

- 1) Perubahan sosial merupakan proses yang melekat pada setiap masyarakat.
- 2) Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat.
- 3) Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan tertentu bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial
- 4) Terjadinya integrasi masyarakat, berada pada penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lainnya.

Pandangan lain tentang konflik, didasarkan pada struktur masyarakat sehingga asumsinya berbunyi demikian :

- 1) Kepentingan merupakan unsur dari kehidupan masyarakat.
- 2) Kehidupan sosial melibatkan dorongan dan perlu terbagi
- 3) Kehidupan sosial melahirkan oposisi dan konflik sosial
- 4) Kehidupan sosial melahirkan kepentingan bagian-bagian
- 5) Diferensial sosial melibatkan kekuasaan
- 6) Sistem sosial tidak terintegrasi dan ditimpa oleh kontradiksi
- 7) Sistem sosial cenderung untuk berubah

Walaupun teori konflik ini, menganalogikan masyarakat dengan medan pertempuran yang tidak habis-habisnya, namun teori konflik ini masih memberikan sumbangan bagi integrasi. Hal ini dikemukakan oleh Berghe yang dikutip Ritzer (1980) bahwa konflik mempunyai empat fungsi yaitu :

- 1) Sebagai alat memelihara solidaritas
- 2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
- 3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi
- 4) Sarana komunikasi dengan adanya konflik posisi masing-masing lawan yang berkonflik saling diketahui.

Kritik terhadap teori konflik yang utama, teori ini betul-betul mengabaikan nilai atau norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat dan memandang kurang penting adanya keteraturan dan stabilitas yang terjadi dalam masyarakat.

4. Tingkat Budaya

Tingkat budaya dalam hal kenyataan sosial maksudnya meliputi arti nilai, simbol, norma dan pandangan hidup umumnya yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat. Tingkat budaya artinya melihat realitas sosial menurut perspektif budaya. Istilah kebudayaan dalam arti yang luas adalah terdiri dari produk-produk tindakan dan interaksi manusia, termasuk karya cipta manusia berupa materi dan non materi. Kebudayaan non materi adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan kemampuan dan tata cara lainnya yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat (Tylor 1942)

Pengkajian tingkat budaya ini, dapat dipelajari dengan melepaskan diri dari struktur sosial atau hubungan antar pribadi yang tercakup dalam ciptaan atau penyebarannya. Hal ini dinyatakan oleh Sorokin (1957) bahwa kesatuan organis dari gejala budaya dan tingkat sosial budaya harus dianalisa terpisah dari tingkat individu. Pokok pikiran Sorokin tentang analisa tingkat budaya meliputi :

- 1) Teori kemajuan tahapan sejarah cenderung berulang dalam kaitanya dengan mentalitas budaya dominan, tanpa membayangkan tahap akhir yang final. Artinya perubahannya model siklus.
- 2) Integrasi sosial dan budaya arti nilai norma dan simbol merupakan kunci untuk memahami kenyataan sosio-budaya. Ada saling kebergantungan antara pola-pola budaya, masyarakat sebagai sistem interaksi dan kepribadian individual. Tingkat tertinggi integrasi sistem sistem sosial yang paling mungkin tercapai didasarkan pada seperangkat arti, nilai, norma hukum yang secara logis dan berarti konsisten satu sama lain. Dan mengatur interaksi antara kepribadian-kepribadian yang turut serta di dalamnya.

Pendekatan Sorokin nampaknya bersifat “integral” kebenaran itu meliputi kebenaran inderawi, kebenaran akal budi dan kebenaran kepercayaan atas intuisi yang melampaui, data inderawi dan rasionalitas. Sorokin mengkritik terhadap sistem budaya total atau sistem sosial bahwa teori-teori tersebut, terlamamu menekankan tingkat integrasi dan kesatuan organisasinya, mengabaikan himpunan-himpunan unsur yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari sistem yang terpadu, meskipun himpunan-himpunan itu hadir dalam ruang dan waktu.

- 3) Tipe-tipe mentalitas budaya. Mentalitas budaya merupakan kunci untuk memahami suatu supersistem budaya yang terintegrasi. Apakah hakikat kenyataan terakhir ? Jawaban logisnya adalah sebagai berikut :
 - a. Kenyataan akhir itu seluruhnya terdiri dari dunia materiil yang kita alami dengan indera.
 - b. Kenyataan akhir itu melampaui dunia materiil, artinya bersifat transenden tidak dapat ditangkap sepenuhnya dengan indera.
 - c. Di antara kedua kenyataan ekstrim tersebut, artinya kenyataan itu cukup itu mencakup dunia materiil dan transenden.

Atas dasar tersebut di atas timbul pertanyaan :

Apakah kebutuhan manusia itu bersifat fisik atau spiritual ?

Seberapa jauh luas kebutuhan yang harus dipenuhi ?

Apakah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus mencakup penyesuaian diri atau penyesuaian lingkungan ?

Atas dasar pertanyaan pertanyaan tersebut maka diperoleh tiga tipe mentalitas budaya:

1. Kebudayaan ideasional. Dasar pikiran dari tipe ini bahwa kenyataan akhir itu bersifat nonmateriil transeden dan tidak dapat ditangkap dengan indera. Dunia ini dilihat sebagai suatu ilusi, sementara dan bergantung pada dunia transenden, atau sebagai aspek kenyataan yang tidak sempurna dan tidak

lengkap. Kenyataan akhir merupakan dunia Allah, kekal tidak materil. Tingkat ini terdiri dari :

- a. Kebudayaan Ideasional Asketik. Mentalitas ini memperlihatkan suatu ikatan tanggungjawab untuk mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan materil manusia supaya mudah diserap ke dalam dunia transenden.
 - b. Kebudayaan Ideasional Aktif. Mentalitas yang selain mengurangi kebutuhan inderawi juga berusaha mengubah dunia materil agar selaras dengan dunia transenden.
2. Kebudayaan Inderawi (Sensory Culture) Dasar pemikirannya bahwa dunia materil yang kita alami dengan indera kita merupakan satu-satunya kenyataan yang ada. Jadi menyangkal terhadap kenyataan akhir transenden. Mentalitas ini meliputi :
- a. Kebudayaan Inderawi Aktif. Mentalitas ini mendorong secara aktif dan giat untuk memenuhi kebutuhan materil dengan mengubah dunia fisik sehingga memperoleh kepuasan dan kesenangan manusia. Mentalitas ini telah mendasari tumbuhnya teknologi dan kemajuan ilmiah dan kedokteran.
 - b. Kebudayaan Inderawi Pasif. Mentalitas ini adalah hasrat untuk memperoleh kesenangan hidup setinggi-tingginya prinsipnya makan, minum, dan kawin, sebab besok akan mati, hal ini disebut “eksploitasi parasit” Mengejar kenikmatan tidak dipengaruhi oleh tujuan jangka panjang.
 - c. Kebudayaan Inderawi Sinis. Mentalitas ini memperlihatkan secara mendasar usaha yang bersifat munafik (hipokrit) membenarkan pencapaian tujuan materialistis atau inderawi dengan menunjukkan sistem nilai transenden yang sebenarnya tidak diterimanya.
3. Kebudayaan Campuran. Dasar pemikirannya bersandar pada mentalitas ideasional dan inderawi. Tipe ini terdapat dua macam mentalitas :
- a. Kebudayaan Idealistik. Mentalitas ini merupakan campuran organik dari mentalitas idealis dan

inderawi, sehingga kelihatan sedemikian rupa keduanya dapat dilihat sebagai pengertian yang benar dari aspek-aspek tertentu dari kenyataan akhir.

- b. Kebudayaan Ideasional Tiruan (Pseudo-Ideational Culture) Tipe ini mentalitasnya didominasi oleh pendekatan inderawi, tetapi unsur-unsur ideasional hidup secara berdampingan dengan yang inderawi, sebagai suatu perspektif yang berlawanan, tidak terintegrasi secara sistematis hanya sekadar hidup berdampingan.

Teori Sorokin ini sangat idealis dan ambisius untuk aplikasinya perlu duungan kejelian empiris. Teori ini bersifat luas, dapat digunakan untuk analisis mentalis budaya pada masyarakat pluralitas, yang memperlihatkan berbagai kecenderungan atau pergeseran secara siklus. Contoh sekarang ramainya kembali mesjid dikunjungi anak muda, dengan berbagai kegiatan, memperlihatkan adanya siklus tingkatan mentalitas budaya seperti digambarkan Sorokin.

Tingkat analisis budaya dari segi sosiologis, telah dianalisis oleh Ogburn (1964) yang membicarakan perkembangan teknologi dan ketinggalan kebudayaan. Titik berat pengkajiannya adalah masalah perubahan sosial. Ia menegaskan bahwa perubahan sosial selalu ditandai oleh ketegangan antara kebudayaan materil dan nonmateril. Jadi yang penting dalam segi perubahan sosial adalah kemajuan dalam kebudayaan materil, termasuk penemuan-penemuan dan perkembangan teknologi. Ogburn berbeda dengan Comte dan Sorokin dalam hal konsep budaya, sedangkan Sorokin dan Comte menekankan jesatuan organis dari gejala budaya, dimana tingkat sosio budaya harus dianalisa terpisah dari tingkat individu. Untuk memperoleh gambaran yang jelas perlu mengkaji perubahan dalam dimensi kultural atau budaya.

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil (invention) teknologi kontak dengan kebudayaan lain yang

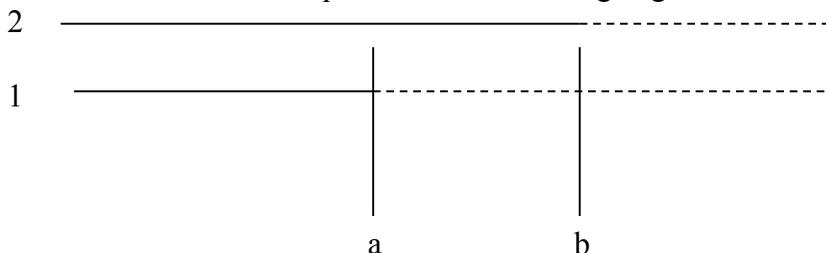
menyebabkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan, bentuk-bentuk sama diganti dengan bentuk-bentuk baru, yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk baru dari unsur baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus-menerus.

Secara ringkas dimensi perubahan kultural meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Inovasi kebudayaan seperti penemuan, peniruan atau meminjam alat-alat.
- b. Difusi seperti penyimpangan kebudayaan dan difusi secara sadar.
- c. Integrasi seperti penolakan terhadap bentuk-bentuk baru duplikasi cara hidup lama dan baru bersama-sama dalam variabel pola-pola penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk baru.

Analisis perubahan sosial dalam dimensi kultural ini telah dilakukan oleh Ogburn dengan konsepnya “cultural lag”. Menurut Ogburn kebudayaan itu dibagi dalam dua kategori yaitu kebudayaan materi dan kebudayaan non materi. Biasanya yang pertama terjadinya perubahan adalah pada kebudayaan materi, dan kebudayaan non materi perubahannya mengikuti kemudian. Perubahan dalam kebudayaan materi adalah penyebab perubahan non materi. Perubahan non materi lebih lambat jauh di belakang dalam proses penyesuaian bentuknya. Keadaan demikianlah yang disebut dengan “cultural lag”. Dalam hal ini penemuan teknologi menjadi faktor utama terjadinya perubahan sosial. Kebudayaan non materi mempunyai tujuannya sendiri yang dapat dicapai dengan mempergunakan kebudayaan materi dalam berbagai lingkungan. Perbedaan hakikat bagian-bagian kebudayaan non materi menyebabkan pentingnya analisis terhadap bagian non materi yang paling dekat hubungannya dengan kebudayaan materi. Kebudayaan demikian disebut kebudayaan adaptif. Kondisi materi berubah sebelum kebudayaan adaptif diubah agar sesuai dengan kondisi materi.

Keadaan ini dapat diilustrasikan dengan gambar berikut :



Garis nomor 1 memperlihatkan kondisi material hutan di Amerika Serikat. Garis nomor 2 memperlihatkan kebudayaan adaptif, kebijaksanaan pemanfaatan hutan-hutan. Garis yang tidak putus-putus memperlihatkan banyaknya hutan dengan populasinya yang kurang dan banyak eksploitasi. Garis putus-putus adalah kondisi baru dari hutan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah hutan dan kebijaksanaan penyelamatan (konservasi) hutan. Ruang antara a dan b memperlihatkan periode ketika kebudayaan adaptif terdahulu, nampak lebih nyata dengan kondisi-kondisi perubahan materi, yang merupakan suatu periode ketidaksesuaian. Memang agak sulit dalam menentukan titik a dan titik b, tetapi keadaan ini perlu perhatian.

Tesis utama Ogburn adalah berbagai macam kebudayaan modern tingkat kebudayaannya tidak sama, ada yang lebih cepat ada yang lebih lambat, adanya saling hubungan dan saling kebergantungan tiap bagian, perubahan cepat pada suatu kebudayaan, menimbulkan kebutuhan penyesuaian melalui perubahan lain, melalui berbagai macam korelasi hubungan setiap kebudayaan. Contohnya perubahan dalam industri, akan menimbulkan penyesuaian yang perlu dalam sistem pendidikan.

Analisis perubahan sosial budaya juga telah dilakukan oleh Pitirin Sosokin, yang mengatakan bahwa dalam jangka panjang pola-pola kebudayaan berubah secara siklus arah-arahannya berubah, proses-proses sejarah dan sosial terus menerus

mengalami variasi-variasi baru, disertai dengan hal-hal yang sulit diduga dan sulit diramalkan secara keseluruhan, bahkan bersifat unik. Perubahan sosial menurut Sorokin sebagai proses siklus, yang didasarkan pada pandangan dunia dasar atau corak pemikiran yang dominan yaitu mentalitas budaya. Ada tiga mentalitas budaya yang menentukan kenyataan sosial yaitu : ideasional, idealistik dan inderawi. Hal ini telah dikupas pada pembicaraan sebelumnya (Pada uraian teori Sorokin).

Analisis tingkat budaya ini sangat luas, masih banyak pendekatan lain atau teori lain untuk membahasnya. Pendekatan teori antropologi mungkin lebih tepat untuk mengkaji realitas budaya. Untuk tujuan itu akan diperkenalkan beberapa aliran teori antropologi secara singkat meskipun sebelumnya pernah disinggung secara spintas dalam mengkaji masalah realitas tingkat struktur.

Evolusi menurut arti kata dapatlah diartikan suatu proses peningkatan ke arah peningkatan yang lebih sempurna. Artinya evolusi berasumsi bahwa ada suatu kepastian dalam tata tertib berkembang, melalui lintasan sejarah kebudayaan dengan kecepatan yang lambat (berevolusi). Pandangan ini berangkat dari teori evolusi Darwin (1809-1881), yang inti teorinya menyatakan: Terdapat variasi-variasi antara individu-individu jenis tertentu, dimana varian-varian lebih tahan terhadap keadaan lingkungan lebih berhasil mneembangkan diri dari varian-varian lain. Dengan cara demikian, terjadilah seleksi yang merupakan hukum alam yang tidak dapat dielakkan. Varian-varian yang mempunyai kemungkinan hidup dapat terwariskan, sehingga dapat mengalami perubahan dalam jenis-jenis tertentu.

Propagandis besar lainnya teori evolusi adalah Herbert Spencer (1820-1903). Meskipun dikenal adanya *Darwinisme sosial*, tetapi Spencer memberikan dorongan kuat terhadap evolusi, terutama pendapatnya mengenai perjuangan hidup. Hukum evolusi dari Spencer berbunyi: Pada setiap kenyataan terjadi peralihan dari homogenitas tak terpadu yang tak pasti (undefinit, incoherent homogeneity). Evolusi tidaklah tentu harus

garis lurus. Proses kosmis menimbulkan kemunduran dan kemajuan, bergantung dari kondisi yang memungkinkan. Evolusi tidak mengandung implikasi suatu kecenderungan laten untuk maju dimanapun hukum itu beroperasi. Tidak ada gerak naik yang seragam dari rendah ke tinggi, tetapi hanya ada penciptaan suatu bentuk sewaktu-waktu yang disebabkan oleh kecocokan dengan kondisi-kondisi yang lebih kompleks, menjadi mampu untuk bertahan lebih lama dalam kehidupan yang lebih lama (Spencer, 1971).

Ciri-ciri umum dari evolusi adalah: (1) Orientasi holistik. (2) Proses evolusi timbul dari kekuatan intern, perubahan adalah endogen, tetapi tidak menolak pentingnya lingkungan. (3) Perubahan yang terjadi adalah bersifat kontinyu dan kumulatif. (4) Entrosentrisme, artinya masyarakat sendiri dipandang sebagai titik puncak setiap perkembangan dan dijadikan teladan bagi masyarakat lainnya yang belum berkembang. Ciri umum evolusi ini (khususnya yang ke 3) sepadan dengan hasil penelitian Morgan yang menyatakan masyarakat berevolusi mulai dari keliaran (savagery), kemudian barbar (barbarism) di tiga tahap artinya tanpa peradaban. Keduanya dibagi menjadi tiga tahap: rendah, menengah, tinggi. Akhirnya masyarakat peradaban (civilization). Hal ini senada pula dengan pendapat Redfield tentang kontrasnya masyarakat rakyat. (folk society) dengan masyarakat kota (urban society). Juga pendapat Durkheim tentang masyarakat mekanis menuju masyarakat organik, dalam konteks integrasi sosial. Morgan evolusinya bercorak garis lurus, sedangkan Tylor tidak terbuka dengan variasi sejarah.

Evolusi masyarakat yang dipelopori Tylor dan Morgan beranggapan bahwa kebudayaan berputar dan bertukar dari keadaan sederhana ke keadaan yang kompleks. Kemajuan masyarakat kini merupakan peningkatan yang lalu yang telah tercatat. Menurut Morgan (1877) bahwa tahap-tahap teknologi mempunyai hubungan yang erat dengan pola kebudayaannya. Kritik terhadap aliran ini, mereka tidak menjelaskan secara tuntas

tentang adanya pembangunan yang tidak sama antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, serta tidak dapat menentukan arah perkembangan masyarakatnya.

Pendekatan partikularisme sejarah yang dipelopori Boas (1986) menentukan pentingnya data yang memadai untuk membuat generalisasi yang menyeluruh dan berguna. Kebudayaan harus dikaji dalam proses masyarakat yang wujud dan berlangsung. Adanya perbedaan dalam kebudayaan, maka terlalu riskan untuk membuat teori yang berlaku sejagad.

Pendekatan difusi dikembangkan oleh Smith, Perry dan Rivers. Difusionisme menganggap bahwa kebudayaan itu berkembang melalui proses dari penyebaran masyarakat maju, masyarakat itu ada pada pokoknya kurang mencipta tetapi lebih suka meminjam dari ciptaan kebudayaan asing. Kebudayaan itu berkembang di pusat-pusat kebudayaan. Contohnya Mesir sebagai pusat kebudayaan dunia, melalui proses difusi menyebar ke daerah lain.

Pendekatan lainnya adalah Fungsionalisme, tokohnya adalah Malinowski (1884-1942). Menurut Malinowski bahwa semua kebudayaan adalah berfungsi dalam masyarakat, seperti yang nampak berperan pada masyarakat tersebut. Semua yang mencangkup nilai, norma, simbol, pola, adat istiadat, sistem kepercayaan dan sebagainya merupakan bagian-bagian kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam suatu kebudayaan. Untuk menyederhanakan pengertian tentang fungsionalis kebudayaan, maka respons kebudayaan itu sama halnya dengan kebutuhan dasar manusia. (1) Metabolisme (penyerapan zat makanan) sebagai ilustrasi proses pemeliharaan kebudayaan. (2) Reproduksi sebagai gambaran keluarga dalam kebudayaan. (3) Kenyamanan tubuh (kondisi normal tubuh) sama halnya dengan usaha kebudayaan untuk melindungi akibat pengaruh dari luar agar lingkungan tetap terjamin. (4) Keamanan adalah mengacu kepada adanya perlindungan terhadap perilaku individu yang membahayakan, misalnya adanya sangsi sosial. (5) Gerakan sebagai gambaran ada aktivitas kebudayaan. (6) Tumbuh

sebagai gambaran adanya proses latihan kebudayaan atau dengan proses sosialisasi dan internalisasi. (7) Kesehatan mengacu kepada menjaga kondisi normal suatu kebudayaan, responsnya dalam bentuk organisasi atau upacara-upacara agar kebudayaan terpelihara.

Tugas kebudayaan adalah memenuhi keperluan asasi individu dalam masyarakat, sehingga kebudayaan mempunyai manfaat praktisnya bagi masyarakat.

Teori lain yang mirip dengan aliran fungsionalis adalah struktur fungsional dari Radcliffe Brown (1952). Ia menyatakan bahwa komponen atau unit-unit struktur sosial adalah manusia-manusia yang mempunyai peranan yang mempunyai dan posisi dalam struktur sosial. Hubungan sosial yang merupakan jaringan kontinyu dari struktur sosial, bukan merupakan hal kebetulan kerja sama, melainkan ditentukan oleh proses sosial, macam-macam hubungan melalui perilaku orang-orang yang berinteraksi yang diatur oleh norma-norma, hukum-hukum dan berbagai pola. Apabila norma telah stabil akan menjadi lembaga atau institusi, yang akan menentukan tipe atau kelas dalam hubungan atau interaksi. Pengertian fungsi beraneka ragam, ada fungsi yang mengacu pada fungsi matematik dan adapula yang mengacu pada fungsi fisiologis. Dalam fisiologi konsep fungsi sangat pokok dan penting untuk memungkinkan penyesuaian dengan hubungan kontinyu dari struktur dan proses dalam kehidupan organisasi. Pengetahuan fungsi dalam sistem sosial sama dengan pengertian fungsi dalam pengetahuan fisiologis. Hal ini mengacu kepada antarhubungan diantara struktur sosial dan proses dari kehidupan sosial. Tiga konsep seperti proses, struktur dan fungsi merupakan komponen dari teori sebagai gambaran dari interpretasi sistem kehidupan sosial. Fungsi merupakan fungsi yang digunakan dalam kaitannya dengan proses dan struktur. Secara kontinyu struktur dipelihara oleh proses kehidupan sosial, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas dan interaksi manusia sebagai individu dan

pengaturan kelompok yang menuju ke satu satuan. Jadi, fungsi proses kehidupan sosial adalah memelihara keseluruhannya.

Analisis tingkat budaya juga dilakukan peningkatan Psikologis. Pelopornya adalah Ralph Linton (1930-1940) menyatakan adanya hubungan antara kepribadian dan kebudayaan. Suatu masyarakat mempunyai kepribadian pokok yang menjadi bentuk dari kebudayaan mereka, seperti kebiasaan tertentu yang dilakukan melalui latihan-latihan ketat (Cardiner). Masyarakat ini ada kecenderungan tanggung jawab dalam masa mendidik anak-anaknya, bila dibandingkan dengan masyarakat pemburu atau nelayan yang menekankan sifat bebas dalam mendidiknya (Barry, Child dan Bacon, 1959).

Teori evolusi abad ke-19 yang menekankan prinsip unilinear, menimbulkan ketidakpastian bagi generasi berikutnya. Maka muncul Leslie White dengan pandangan evolusi baru (neoevolusionisme), yang hanya memperkuat evolusi dengan memperkaya data lebih banyak. Kebudayaan merupakan sistem penguasaan atau kekuatan atau energi, artinya kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Kemudian muncul Steward yang menekankan bahwa kebudayaan itu berkembang dengan multilinear dan multikausal disamping evolusi linier dan evolusi universal. Dengan pelopornya Morgan dan Tylor, meletakkan kebudayaan tertentu dalam tahap tertentu bagi tingkat-tingkat perkembangan kebudayaan. Demikian halnya White sebagai tokoh perkembangan kebudayaan universal (umum), pandangan kebudayaannya luas. Ia beranggapan bahwa evolusi disebabkan oleh keadaan tertentu, seperti oleh teknologi yang ada dalam masyarakat tersebut, bukan karena pengaruh alam atau sejarah. Jadi nampaknya adanya prinsip monokausal. Menurut White kebudayaan sebagai pemenuh kebutuhan manusia secara luas. Pemanfaatan tiap bagian kebudayaan akan ditentukan atau diartikan oleh kondisi lingkungan setempat. Evolusi multilinear yang dipelopori Steward (1955) menekankan bahwa kebudayaan berkembang tidak dari tahap yang sama, artinya tidak dapat dikelaskan menurut tahapan-tahapan. Dalam hal hukum-hukum

rkebudayaan atau formulasinya ada kesamaan dan kesejahteraan. Jadi evolusi kebudayaan tidak hanya disebabkan oleh teknologi tetapi banyak variabel lainnya.

Pendekatan teori strukturalisme dalam mengkaji tingkat budaya, dikembangkan oleh Levi-Strauss. Strukturalis Strauss berbeda dengan Strukturalis Brown. Brown lebih menekankan fungsi unsur-unsur didalam masyarakat. Sedangkan Strauss menekankan pada asal-usul sistem itu sendiri. Menurut Strauss bahwa kebudayaan itu terstruktur dalam pikiran manusia, sedangkan kesenian, ritual dan pola kehidupan sehari-hari hanya merupakan lambang dari struktur proses kognitifnya. Apa yang nampak hanyalah pernyataan yang dari keharusan yang ada di belakangnya. Yang menentukan adalah keteraturan dan yang menjadi soal adalah mengenai keteraturan itu, yang disebut dengan struktur. Jadi, struktur adalah sedikit lebih daripada apa yang ada dipermukaan gejala itu, yang diduga ada dibelakangnya, suatu kebutuhan atau kekuasaan tertentu. Dengan ringkas struktur adalah rasionalitas dari objek (artinya objek pengamatan). Kalau menganalisa masyarakat primitif dalam hal peralatannya (teknologi) bukan hanya tujuan segi praktisnya, tetapi segi keintelektualannya.

Pendekatan teori tingkat budaya Etnosains (etno-metodologi kalau dalam sosiologi), menekankan bahwa dalam memahami suatu fenomena alam itu diperoleh dari orang yang dikaji. Mereka yang memperlihatkan perilaku atau peraturan sebagai kebudayaan, maka mereka pun dapat melaksanakan aktivitas kebudayaan tersebut dan selanjutnya dapat menjelaskan mengapa melakukan aktivitas tersebut. Dapat pula mereka itu menjelaskan mengapa individu-individu bertindak mengikuti pikiran yang terpendam dalam pikiran mereka. Jadi, objek pengamatan mempunyai potensi untuk menjelaskan aktivitas kebudayaannya sendiri.

Pendekatan teori yang sedang populer pada saat sekarang adalah pendekatan teori Ekologi Budaya. Tokoh pendekatan

ekologi budaya adalah Julian H. Steward (1955). Pendekatan ini berbeda penjelasannya dengan ekologi manusia atau sosial dalam hal bagian tanda-tanda kebudayaan pola-pola dalam situasi lingkungan kebudayaan. Ekologi budaya mempunyai implikasi suatu masalah dan metoda. Masalah menyangkut penyesuaian masyarakat manusia terhadap lingkungan yang diperlukannya dengan macam-macam perilaku. Menurut pandangan holistik, semua aspek budaya adalah fungsional saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tentu derajat dan macam-macam saling ketergantungan tidaklah sama tanda-tandanya. Konsep “inti kebudayaan” (cultural core) mempunyai konstelasi yang lebih erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan dan penyusunan ekonomi. Inti kebudayaan itu meliputi pola-pola sosial, politik dan agama yang secara empiris ditetapkan bahwa hubungannya dengan penyusunan-penyusunan itu adalah erat. Unsur-unsur lain yang tak terbilang banyaknya mungkin mempunyai variabilitas yang lebih besar, tidak begitu erat terikat pada inti. Unsur-unsur yang sekunder agak banyak ditentukan oleh faktor-faktor kultural-historis dengan inovasi secara acak atau dengan difusi dan unsur-unsur ini memberikan perbedaan wajah pada berbagai kebudayaan yang berinti sama. Ekologi kebudayaan memusatkan perhatian pertama-tama pada unsur-unsur dari analisis empiris telah terbukti paling erat bersangkutan dengan pemanfaatan lingkungan menurut cara-cara yang dipastikan secara kebudayaan. Jadi, untuk analisis tingkat budaya menurut pendekatan ekologi kebudayaan harus mampu mengisolasi mana yang merupakan “inti kebudayaan” dan mana yang bukan atau “aspek kebudayaan selebihnya”. Pendekatan *ekologi kebudayaan* adalah relevan dengan konsep “inti kebudayaan”, yang secara eksplisit terlihat ikatan fungsionalnya dengan alam sekitarnya, pola-pola kebudayaan dan organisme lingkungannya. Kasus di Indonesia sebagai inti kebudayaan adalah ekonomi pertanian pola ladang dan sawah, yg sangat penting dan menentukan berbagai hal (Geertz, 1963). Pendekatan ekologi kebudayaan, memiliki kesan kuat tentang cara *adaptasi* dengan alam sekitarnya. Sifat adaptasinya mungkin segi

geografis atau segi budaya. Dalam ekosistem, variabel-variabel kebudayaan, biologis dan fisis yg tertentu jelas saling berhubungan. Pandangan ini melahirkan pendekatan *antropogeografis* dan pandangan *posibilis*. *Antropogeografis* menyatakan bahwa kebudayaan itu dibentuk oleh kondisi lingkungan, faktor-faktor geografis memainkan peranan dinamis perkembangan kebudayaan. *Posibilis* menyatakan bahwa lingkungan itu tidak sebagai sebab, melainkan hanya sbg pembatas atau penyeleksi kebudayaan. Pendekatan ini tidak dapat dipertentangkan, sebab memisahkan konsep kebudayaan dengan lingkungan, memisahkan karya manusia dengan proses alam yang dihindari oleh pendekatan ekologi budaya.

D. Refleksi Atas Realitas Sosial (Era Reformasi Pasca Tahun 1998) Ketegangan Struktural dan Gerakan Reformasi Sosial Pengantar

Peristiwa monumental yg akan dicatat dalam sejarah kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia menjelang masa milenium ketiga adalah kerusuhan sosial dan terjadinya gerakan reformasi “total”. Peristiwa tersebut mengandung makna sosiologis yang mendalam tentang struktur sosial dan tatanan sosial masyarakat, yang dapat menimbulkan banyak tafsir sosial tentang realitas masyarakat Indonesia, apabila tidak dilakukan kajian secara seksama. Realitas dinamika sosial masyarakat Indonesia tersebut, memberikan peluang berbagai disiplin ilmu atau paradigma ilmu dari suatu disiplin tertentu untuk memberikan jawaban ilmiahnya, termasuk disiplin sosiologi. Seandainya kita meyakini tentang tesis determinisme historis melalui pendekatan “historis materialis” dari Marx, maka peristiwa tersebut dapat ditelusuri dan ada kaitannya dengan sistem bermasyarakat atau bernegara sebelumnya, yaitu masa pemerintahan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Oleh karena itu untuk tujuan mengungkap peristiwa kerusuhan dan gejolak reformasi total yang dimotori oleh para

mahasiswa diseluruh perguruan tinggi di Indonesia, kaum intelektual, tokoh masyarakat, para aktivis LSM dan warga masyarakat reformis, maka perlu mempelajari sistem kekuasaan dan proses pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru sebelumnya.

Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru pada dua dasawarsa terakhir ini, berorientasi kpd upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kemudian sebagai strategi orientasi pembangunan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan rakyat, menimbulkan perhatian dan dijadikan asumsi bahwa hnya dengan stabilitas sospol, maka pembangunan akan berhasil. Hal tsbt dilakukan denagn menata sistem politik yg memutamakan integrasi nasional dg prinsip harmoni, selaras, srsi, seimbang. Kelembagaan birokrasi, parpol dan militer merupakan kelembagaan politik yang menjadikan stabilitas, letertiban dan keamanan sebagai obyek dr pembangunan itu sendiri. Orde baru menciptakan suatu masyarakat baru yang aman dan tertib dan mengejar kemajuan pembangunan dlm iklim stabilitas (Schiller, 1978). Orientasi kelembagaan yg demikian dg sendirinya akan mengesampingkan atau menolak adanya kodrat perbedaan dlm diri manusia atau dlm garis-garis perjuangan kelompok.

Dampak dari orientasi kelembagaan demikian, menimbulkan ketegangan struktural akibat kurang terakomodasinya aspirasi arus bawah dari berbagai kelompok sosial dan organisasi masyarakat, yang mempunyai kekuatan masa namun tidak berperan dalam tatanan politik secara formal. Sehingga timbul kesenjangan dalam komunikasi dan interaksi sosial antara masyarakat dan negara dalam hal ideologi pembangunan dan kebijakan publik. Kondisi demikian diperburuk oleh proses pembangunan yang tidak berwawasan sosial budaya dan hanya menutamakan kepentingan ekonomi politik kelompok penguasa.

Karena pembangunan tidak lain adalah proses perubahan sosial yang menyebabkan adanya stabilitas yang digoyahkan, seperti timbulnya dampak modernisasi yang nampak dalam

masyarakat dengan terganggunya institusi yang telah ada, ketidakserasian sosial, dan perasaan yang tidak aman dan frustrasi dikalangan luas (Kartodirdjo, 1984). Pada saat yang bersamaan, proses pembinaan format sosial dengan prinsip ketertiban dan keamanan dengan stabilitas politik semakin intensif, melalui prakarsa konsensus dan rekayasa sosial politik. Maka terjadinya ketidakseimbangan kekuatan atau konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti suasana adanya kesesuaian struktural, ketegangan struktural, pengawasan sosial yang lemah terhadap berbagai penyimpangan sosial dengan masyarakat yang rentan isu disertai adanya faktor pemicu maka akan mudah terjadinya perilaku kolektif kerusuhan sosial (Horton dan Hunt, 1989).

Sebagai contoh peristiwa perilaku kolektif kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 26 Desember 1996 di kabupaten Tasikmalaya telah mengguncang tatanan sosial (social order) masyarakat agamis. Peristiwa tersebut dapat dipandang penting dan menarik, karena masyarakat Tasikmalaya yang semula dipandang sebagai masyarakat agamis yang santun dengan nilai-nilai agama yang kuat dan meresap kedalam masyarakat dapat berubah berbalik untuk melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan. Hal tersebut selain merupakan gambaran relaitas sosial yang paradoksal, juga berdimensi dan bermakna sosial, politik, ekonomi, budaya, agama yang menantang pemikiran para akademisi untuk diungkapkan secara ilmiah.

Kerugian ekonomi akibat peristiwa tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan materi (85 milyar). Dari segi budaya betapa rendahnya nilai-nilai kemanusiaan, dari segi sosial yang rentan terhadap berbagai peci isu SARA. Hal tersebut sebagai pemicu seolah-olah merupakan akumulasi dari puncak ketegangan struktural, sebagai akibat kondisi sosial ekonomi, adanya ketidakadilan dan adanya rasa kekhawatiran masyarakat akan hilangnya hak dan kedudukannya sebagai warga negara serta adanya pemicu yang menimbulkan energi menguatnya solidaritas sosial keagamaan, sehingga timbul keberanian untuk

menghancurkan tantangannya. Tentu hal ini tidak dapat dipisahkan dari politik atau kebijakan pemerintah (birokrat) dalam mengelola hubungannya dengan warga negara, dengan pola kekerasan dan arogansi kekuasaan.

Peristiwa perilaku kolektif kerusuhan sosial yang tragis dan mengukir sejarah perjalanan bangsa sejak peristiwa kerusuhan Liquisa Tim Tim tahun 1995 sampai kerusuhan Ambon 19 Januari 1999, dan peristiwa sambas yang terulang kembali, menantang pemikiran akademisi karena jawaban ilmiah sampai saat ini masih bias politik, belum sampai pada pengujian teoritis. Jawaban berdasarkan pengamatan terhadap fenomena masyarakat kerusuhan sosial disebabkan oleh terakumulasinya ketidakpuasan terhadap adanya kesejangan sosial ekonomi, juga akibat kelembagaan masyarakat yang tidak mampu menampung aspirasi warganya, pertarungan elit politik, adanya solidaritas sosial yang ditunggangi kepentingan lain dan akibat pengelolaan negara oleh birokrat yang arogan, akhirnya meledak menjadi sebuah kerusuhan dan proses reformasi terus berjalan. Semua jawaban tersebut hanyalah tentatif untuk kepentingan rasionalisasi terhadap peristiwa luar biasa yang belum terselesaikan permasalahannya.

Dengan menggunakan teori konstruksi realitas sosial sebagai dari Berger dan Luckman (1966) sebagai alat analisis, maka kerusuhan sosial dan munculnya gerakan reformasi total adalah merupakan kenyataan objektif hasil eksternalisasi proses institusionalisasi dan legitimasi dari format sosial yang ada (Orde Baru), yang dianggap masyarakat untuk objektivisasi yang tersedia secara objektif, untuk kemudian menjadi kenyataan subjektif (masuk akal secara subjektif). Melalui internalisasi atau menyerap dunia objektif kedalam kesadaran sehingga subjektif individu, dipengaruhi struktur dunia sosial (yang diciptakan birokrat), untuk melakukan suatu tindakan analog terhadap simbol-simbol kekuasaan negara. Sedangkan tindakan kesadarannya adalah melakukan perlawanan, sebagai bentuk kesadaran untuk membebaskan diri dari penindasan pemerintah Orde Baru dalam bentuk gerakan reformasi sosial. Gerakan

reformasi kalau mengikuti teori kritis adalah menggunakan pendekatan dialektika yang selalu curiga terhadap kenyataan-kenyataan aktual seperti manipulasi, ketimpangan dan kontradiksi-kontradiksi, yang mendorong agar terjadi transformasi masyarakat (Habermas dan Horkheimer, 1985), tentu tidak dapat dilakukan dengan praktis gerakan reformasi.

Oleh karena itu pemerintah Orde Baru dengan segala kebijakan politiknya tidak dapat dipisahkan dari timbulnya perilaku kolektif kerusuhan sosial dan gerakan reformasi total. Reformasi total yang masih dlm proses mulai dihembuskan sejak pemerintah Indonesia mengalami krisis moneter awal Juli 1997, sampai jatuhnya pemerintah Soeharto tanggal 21 Mei 1998, hingga sekarang tuntutanannya masih dikumandangkan. Tuntutan terakhir para mahasiswa reformis dari 12 kampus se-Jawa berupa enam visi reformasi dikukuhkan pada tanggal 5 Juni 1999 pada “patung selamat datang” Jakarta berupa (1) Cabut dwifungsi ABRI. (2) Tegakkan supremasi hukum. (3) Amandemen UUD 1945. (4) Otonomi daerah seluas-luasnya. (5) Budayakan demokrasi egaliter. (6) Pertanggungjawaban Orde Baru dan reinkarnasinya.

Dengan demikian letak permasalahannya menjadi jelas yaitu adanya ketegangan struktural yang diciptakan pemerintahan Orde Baru, sehingga membuat semacam hegemoni kekuasaan yang senantiasa akan menentang segala macam suara dari arus bawah. Kondisi demikian yang terus dibiarkan akan sampai pada suatu kondisi dimana akan berhadapan pemerintah penguasa atau birokrat dengan warga masyarakat. Dengan sendirinya biaya sosial yang harus dibayar adalah terjadinya kerusuhan sosial dan munculnya gerakan reformasi sosial sebagai alternatif untuk menyelamatkan bangsa. Alasan lainnya yang lebih penting dan mendorong untuk melakukan penelitian masalah reformasi sosial ini adalah proses reformasi ini masih terus berlangsung, dan terjadi polarisasi antara kaum/kelompok reformis dengan kaum/kelompok yang pro *status quo*.

Permasalahan Ketegangan Struktural

Untuk menguji ketegangan struktural, kerusuhan dan reformasi sosial sebagai realitas konstruksi sosial dan juga reformasi sosial adalah bentuk kritis dialektika terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial seperti KKN dan hegemoni kekuasaan, maka perlu mencari jawaban terhadap permasalahan yang menjadi penuntun pengujian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi realitas objektif adanya homogen kekuasaan yang dapat menimbulkan adanya ketegangan struktural? Apa yang terjadi pada masa kepemimpinan Orde Baru dalam hal ideologi pembangunan dari pandangan elit penguasa sampai masyarakat tingkat bawah? Institusionalisasi dan legitimasi bagaimana yang menimbulkan adanya jalinan kolusi dan nepotisme, yang membentuk adanya hegemoni birokrasi aparat?
2. Bagaimana proses internalisasi adanya hegemoni birokrasi aparat (kekuasaan) sampainya diserap menjadi bagian subjektif warga masyarakat, sehingga diserap menjadi bagian subjektif warga masyarakat, sehingga menjadi masuk akal secara subjektif? Bentuk-bentuk tindakan bagaimana mulai dari yang persuasif sampai pada tindakan ancaman dan kekerasan, sehingga realitas sosial menjadi kenyataan subjektif dan masuk akal serta sadar dan diterima sebagai bagian dari subjek? Apakah dalam hal ini subjektif individu dipengaruhi oleh struktur realitas sosial (dunia sosial) adanya hegemoni kekuasaan dan arogansi kekuasaan?
3. Apakah akibat dari proses objektifikasi eksternalisasi melalui proses legitimasi dan justifikasi dengan kekuatan superstruktur dan infrastruktur yang membentuk adanya hegemoni kekuasaan dapat menimbulkan ketegangan struktural? Kalau memang adanya hegemoni kekuasaan dan arogansi kekuasaan sebagai dunia objektif, apakah kerusuhan sosial yang terjadi itu sebagai hasil dari penyerapan dari

duniaobjektif yang terserap ke dalam kesadaran subjek individu?

4. Apakah gerakan reformasi sosial juga merupakan akibat dari adanya ketegangan struktural yang menyebabkan adanya kelas sosial yang termarginalisasi, terdominasi, tereksploitasi, dan teralienasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik?
5. Sejauh mana justifikasi teori sosiologi dalam perspektif struktural konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam teorinya tentang eksploitasi, kontradiksi, tekanan dan ketegangan dalam sistem, kelas sosial, kekuasaan dan alienasi sebagai ketegangan struktural yang mendorong timbulnya reformasi sosial?
6. Sampai sejauh mana justifikasi Teori Kritis Masyarakat dari Habermas mengenai adanya ketimpangan sosial ekonomi, kedok-ideologi, manipulasi dan arogansi kekuasaan yang menyebabkan timbulnya reformasi sosial?

Pendekatan dan Tafsir Teoritis

Karakter pemerintah Orde Baru dalam penyelenggaraan kekuasaan terefleksikan dalam kegiatan pembangunan sebagai sebuah keniscayaan, yang ditunjukkan dengan usaha intensif dan progresif seperti mengamankan, mensuseskan, stabilitas, birokrasi, regulasi dan korporatisasi. Sehingga pembangunan sebagai ideologi berkoinidensi dengan peranan negara yang besar, kuat dan diterminan dalam penyelenggaraan pembangunan (sutrisno, 1998). Dampak positif masyarakat menjadi berkesadaran tinggi terhadap pembangunan, namun sekaligus menimbulkan masyarakat menjadi tidak kritis terhadap makna, arah dan tujuan pembangunan. Kesadaran yang diperoleh masyarakat hanyalah bersifat sloganistis, reotoris, tetapi tidak realitis dan kritis (abar, 1990: XV).

Karena mangedepankan stabilitas maka data dan fakta subjektif serta kreatifitas atau kritis masyarakat selalu direduksi

dan diminimalisasikan. Sehingga pembangunan kurang melibatkan dan tidak memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah lebih mengandalkan parameter kuantitatif, dimana biaya sosial (kualitatif) tidak diperhitungkan seolah telah dicukupi dengan parameter kuantitatif. Padahal pembangunan melibatkan faktor-faktor kompleks sosial, politik, lingkungan dan juga ekonomi (Conyers, 1991:6). Pemerintah Orde Baru yang digerakkan pembangunannya lebih bersifat pragmatis dan “top down planning” ternyata menyebabkan masyarakat teralienasi dari perencanaan dan sumber daya pembangunan. Akibatnya pembangunan tidak terkendali lepas dari logika dan kemauan masyarakat, posisi tawar (bargaining position) masyarakat sangat lemah dan terjadi kontradiksi kepentingan, distribusi dan kekuasaan yang tidak adil.

Orientasi pembangunan Orde Baru, menciptakan perilaku birokrasi yang amat paternalistik sebagai sistem politik yang patrimonial, yang tidak simpati kepada proses demokrasi (Effensi, 1989). Sedangkan pembangunan di bidang politik, dilakukan dengan proses depolitisasi masa yang sistematis. Hal tersebut dilakukan dengan depotisasi argumen (toleran rendah terhadap kritik, ide atau pendapat yang berbeda dengan pemerintah) dan masa mengambang (floating mass), yaitu memutuskan hubungan elit partai dengan massa (Gaffar, 1989). Sebaliknya hubungan massa dengan penguasa (Golkar) sangat intensif melalui “cekakan” ideologi pembangunan, sloganis dan life service. Di lain pihak birokrasi yaitu aparat pemerintah, sipil atau militer, yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, ternyata semakin memperkuat posisinya. Karena birokrasi yang dibangun adalah patrimonial dimana jabatan dan perilaku dalam hirarki birokrasi didasarkan pada hubungan familier, hubungan bapak anak (patron klien) (Muhaimin, 1989).

Peran militer dengan konsep difungsi ternyata menjadi bias dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para militer, sementara mereka mempraktekan peran sosial politik dan difungsi dengan mengangkat personal ABRI menjadi penguasa mulai dari

kepala desa sampai gubernur,serta mempraktekan cara paksaan atau cara militer dalam berhubungan dengan rakyat (Singh,1995). Keadaan birokrasi yang semakin kokoh, menyebabkan lepas kontrol yang sering memperlihatkan arganisasinya. Birokrasi menjadi “surplus kekuasaan”, yang dengan mudah mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya. Birokrasi membangun ekonomi dan dinamika politik ada dalam dominasi negara. Negara bersifat “omnipoten”. Negara sekaligus perencana investasi, pemasok utama dana investasi, penyedia prasarana produks,pelaksana produksi dan bahkan sebagai konsumen utama hasil pembangunan. Negara sangat kuat dengan para birokrat pengelola negara sebagai kelompok yang terkonsolidasi dan kuat, bebas dari pengaruh lain. Kemudian para pengusaha, usahawan raksasa dipercaya birokrasi menangani pekerjaan pembangunan yang dibimbing pemerintah (Mas’oed,1998). Kalau menggunakan pendekatan struktural konflik (Marx dalam Dahredorf,1986 dan dalam Grusky,1994:65-79),maka nampak ada dua kekuatan besar disatu pihak adalah negara yang terwakili oleh para birokrat kelompok elit politik yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik yang surplus kekuasaan, dilain pihak adalah kelompok termarginalisasi, terkooptasi dan tereksplorasi dalam berbagai sumber daya.

Sebagai contoh kasus, karakteristik pemerintahan Orde Baru yang menggejala secara nasional tersubordinasi pula di kota kabupaten Tasikmalaya, sebelum terjadi kerusuhan tanggal 26 Desember 1996. Sebelum terjadi kerusuhan sosial tanggal 26 Desember 1996. Sebelum terjadi kerusuhan ada semacam prakondisi “sine quo non” (syarat mutlak) untuk terjadinya kerusuhan sosial. Ada sesuatu proses yang sifatnya kontinum dari sistem pemerintahan Orde Baru sampai terjadinya kerusuhan sosial,bahkan mungkin suatu produk dari sistem pemerintahan kerusuhan sosial,bahkan mungkin suatu produk dari sistem pemerintahan Orde Baru (pandangan diterminisme historis). Dari aspek historis daerah kabupaten Tasikmalaya tentang budaya

protes ketidakpuasan atas perlakuan sewenang-wenang penguasa penjajah Jepang, pernah dilakukan oleh kelompok pesantren Singaparna dengan tokohnya K.H. Zainal Musthopa ba'da jum'at tanggal 25 Februari 1994.

Prakondisi masyarakat Tasikmalaya sebelum terjadinya kerusuhan dalam aspek sosial diciptakan kondisi untuk stabil, selaras, serasi dan seimbang tanpa konflik. Aspek ekonomi pada awalnya ada kegairahan dikalangan pengusaha lokal di sektor industri kecil (rakyat) seperti pengrajin, petani, peternak dan pedagang di pasar. Namun lama kelamaan dengan fasilitas birokrasi, maka pemodal besar mulai menguasai hajat mereka, pengusaha kecil punya nama dan pemodal besar yang beruntung. Aspek politik yang dikembangkan birokrasi adalah usaha memenangkan Golkar dengan cara repressif terhadap masyarakat pesantren, seperti adanya penahanan terhadap *Kyai anti Golkar*, adanya perlawanan santri terhadap koramil, gerakan pembangunan di setiap pembangunan yang mendukung Golkar, stempel PPP sulit mendapat fasilitas pemerintah, anggota DPRD yang hanya berfungsi stempel kebijakan, serta arogansi anggota ABRI sampai terjadinya pemukulan oleh anggota Polri terhadap seorang guru mengaji (ustadz) di Pesantren Condong yang sekaligus sebagai pemicu terjadinya kerusuhan sosial (ISAI, 1998). Lepas dari ada atau tidak adanya provokator pemercepat terjadinya perilaku kolektif kerusuhan sosial, tetapi yang penting kontradiksi dan konflik yang terjadi sebagai hasil proses sejarah orde baru di Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan prakondisi untuk terjadinya kerusuhan sosial.

Dari berbagai argumentasi di atas nampak bahwa ada dua masalah pokok yang perlu dikaji dalam peristiwa kerusuhan ini:

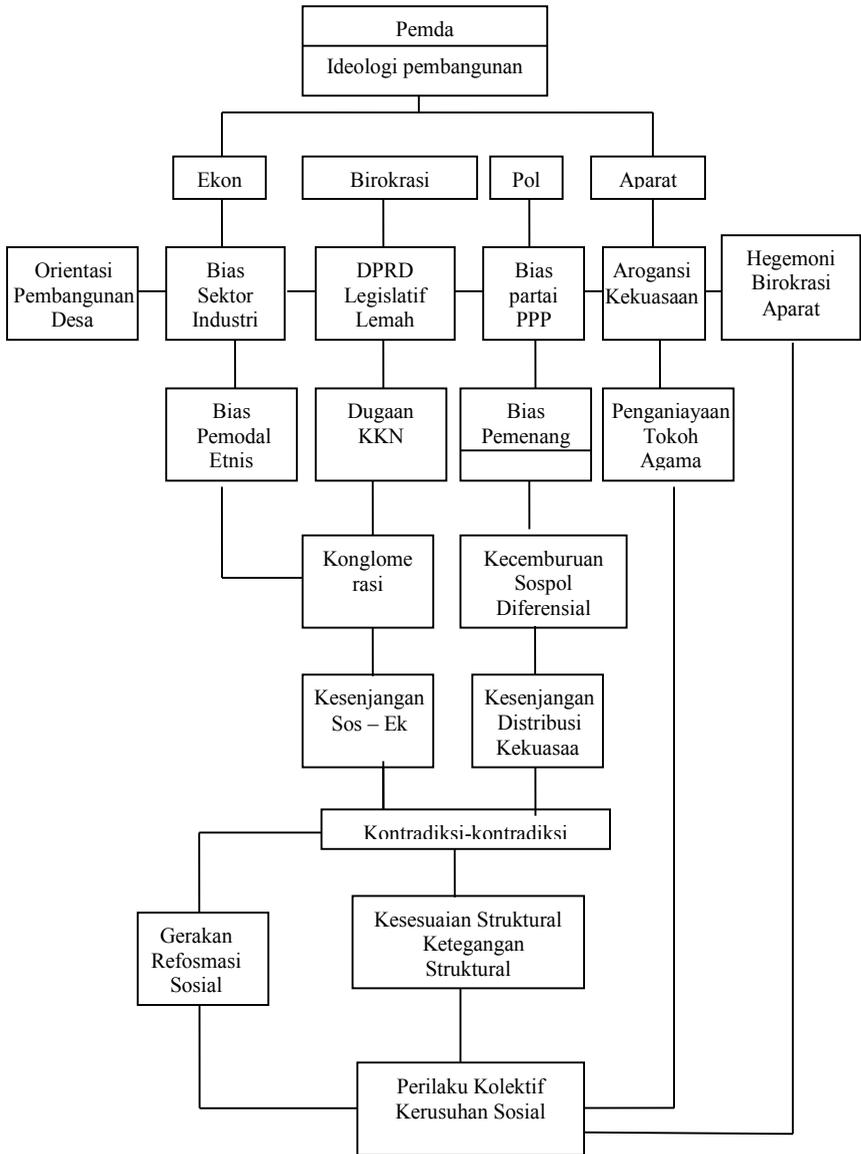
- 1) Prakondisi struktur kondisi masyarakat di bawah sistem yang dikembangkan oleh pemerintahan orde baru, yang memiliki surplus kekuasaan dan yang melahirkan ketegangan struktural yang menimbulkan adanya gerakan reformasi sosial.

- 2) Faktor penyebab dan pemicu serta yang mempercepat merupakan proses mekanisme terjadinya kerusuhan sosial.

Faktor kondisi struktur sosial masyarakat mengakumulasi ketidakpuasan masyarakat dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Karakter masyarakat basis pesantren dengan solidaritas sosial keagamaan yang kuat, disertai faktor pemicu arogansi kekuatan aparat, maka meletuslah peristiwa perilaku kolektif kerusuhan sosial. Sedangkan pada skala nasional menimbulkan adanya ketidakpuasan seperti adanya krisis moneter, ekonomi sosial, kepercayaan pemerintah, ABRI, keadilan dan integrasi (Soemardjan, 1999:xix). Keadaan demikian mendorong untuk timbulnya reformasi yang dimulai dengan gerakan moral dari mahasiswa.

Gambaran kondisi kontradiksi dan kesesuaian struktural serta ketegangan struktural yang dapat menimbulkan adanya kerusuhan dan diiringi dengan gerakan reformasi sosial nampak pada bagan skematis berikut :

Skema Kontradiksi Dan Ketegangan Struktural



Beberapa pendapat yang masih merupakan hipotesis menyatakan bahwa yang mematangkan terjadinya kerusuhan sosial disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Terakumulasinya berbagai ketidakpuasan, sehingga sampai pada titik batas ambang toleransi sehingga meletus kerusuhan sosial (teori balon).
- 2) Kesenjangan ekonomi yang sangat tajam sehingga sampai pada batas daya tahan mental ekonomi (teori rumput kering).
- 3) Proses modernisasi melalui ideologi pembangunan, yang menyebabkan adanya diferensiasi sosial dan terjadinya manipulasi dan eksploitasi.
- 4) Karena adanya solidaritas sosial dengan pengikat nilai agama yang kuat (islam) yang terdeviasi.

Beberapa faktor tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya pemicu utama tindak kekerasan yang tidak menusiawi dan kebetulan menyangkut aspek sentimen agama yang dapat mengakibatkan terbakarnya emosi masyarakat agamis.

Pandangan sosiologis terhadap tindakan kekerasan atau kerusuhan dikemukakan oleh Marx tentang dua kelas sosial yang anatonistis. Kelas atas terdiri dari pemodal dan birokrat di satu dan di lain pihak adalah kelas masyarakat bawah (buruh) yang termarginalisasi. Keadaan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep “mode of production”, yaitu cara-cara produksi yang meliputi “forces of production” yaitu kekuatan-kekuatan produksi yang terdiri dari tanah, teknologi, modal yang dikuasai oleh para kapitalis. Penguasaan kekuatan-kekuatan produksi ini dengan sendirinya akan menghasilkan kekayaan atau hasil-hasil produksi, yang apabila terus dikuasai akan timbul nilai surplus (surplus value) bagi kapitalis. Untuk selanjutnya dampak dari keadaan demikian akan mempengaruhi adanya hubungan-hubungan sosial dari produksi (social relations of production) yang mengalienasikan para buruh, tereksploitasi dan termarginalisasi. Gambaran tersebut nampak pada masa Orde Baru, meliputi

berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan agama pun kelembagaannya terkooptasi oleh hegemoni birokrat aparat, yang sekaligus menimbulkan adanya penyimpangan KKN. Realitas objektif demikian yang menimbulkan adanya multifungsi berbagai kelembagaan pemerintah, maka merebak ketidakpuasan dan ketidakadilan sehingga timbul gerakan reformasi total.

Kajian sosiologis mengartikan kerusuhan dengan perilaku kolektif yang diartikan sebagai mobilisasi berlandaskan pandangan yang mengidentifikasikan kembali tindakan sosial (Semelser, 1963). Menurut Perry dan Pugh (1978:3), perilaku kolektif merupakan pola-pola interaksi sosial yang tidak terorganisir dalam kelompok manusia sebagai suatu perilaku yang lahir secara spontan relatif tidak terorganisir dan hampir tidak bisa diduga sebelumnya, tidak terencana dan tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para pelakunya (Milgram dan Touch, 1969:507). Sedangkan penyebab perilaku kolektif kerusuhan sosial menurut Semelser (1963: BAB 1) adalah sebagai berikut : (1) kesesuaian struktural. (2) Ketegangan struktural. (3) Kemunculan dan penyebaran pandangan. (4) Faktor pemercepat. (5) Mobilisasi tindakan. (6) Pelaksanaan kontrol sosial.

Mengingat kondisi masyarakat produk Orde Baru banyak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi antara birokrasi dengan rakyat, maka peristiwa perilaku kolektif kerusuhan sosial yang terjadi lebih tepat dikaitkan dengan teori adanya kesesuaian struktural dan ketegangan struktural disamping faktor non struktural. Kesesuaian struktural yaitu adanya struktur masyarakat yang menunjang timbulnya kerusuhan sosial. Sedangkan ketegangan struktural yaitu adanya pencabutan hak dan kekawatiran akan hilangnya sesuatu dan adanya ketidakadilan mendorong untuk melakukan tindakan ekstrim. Kelas sosial bawah kelompok minoritas tertekan dan kelompok yang hasil jerih payahnya terancam, serta kelompok sosial atas yang khawatir akan kehilangan hak-hak istimewanya merupakan kelompok

manusia yang berkemungkinan melahirkan perilaku kolektif (kerusakan sosial) (Semelser, 1963: BAB I).

Teori sosiologi dalam perspektif struktural konflik, tokoh utamanya adalah Karl Marx (1818-1883). Konsep yang mungkin dapat digunakan sebagai alat analisis tentang eksploitasi, kontradiksi, tekanan dan ketegangan dalam sistem, kelas sosial, kekuasaan dan anilesi (Cupp and Payne, 1979:36-73). Beberapa pandangan Marx yang mendorong timbulnya reformasi sosial adalah berangkat dari konsep struktur masyarakat yang dipilih menjadi dua bagian yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Infrastruktur atau dasar ekonomi (economic base) merupakan penentu dari suprastruktur (nilai, norma, ideologi dan politik serta segala macam aturan). Dasar ekonomi tersebut merupakan “mode of production” yang terdiri dari kekuatan-kekuatan produksi, dimana kekuatan-kekuatan produksi pada saat Orde Baru dikuasai oleh hegemoni birokrat dan aparat yang melalui proses kolusi dan nepotisme dikuasai oleh kelompok konglomerat. Sehingga konglomerat tersebut merupakan bagian dari hegemoni kekuasaan tersebut. Pada saat demikianlah suprastruktur tadi dibuat untuk memihak kepada kekuatan hegemoni birokrat aparat, sehingga banyak terjadi penyimpangan berbagai peraturan dan sekaligus membuat kelompok lain termarginalisasi. Kekuatan hegemoni birokrat-aparat mendominasi (Marx) atau “dominasi amoral” (Durkheim) dan “dominasi administrasi” (Weber) sehingga menjadi mayoritas tunggal.

Akibat demikian maka kekuatan-kekuatan produksi akan menekankan hubungan-hubungan sosial sehingga timbul kelompok yang “teralienasi” (Marx) atau “kelompok rendahan” (Weber), yaitu yang tidak terikat (the unattached), pinggiran (the marginal), yang menggoda (the obsessive), ketidadaan norma (the normless) dan terisolasi (the isolated). Seperti terjadi pada masa Orde Baru yang disikapi sebagai *organisasi tanpa bentuk* (OTB), *ekstrim kiri* atau *ekstrim kanan*. Kelompok yang teralienasi yang meliputi para mahasiswa, kaum intelektual,

tokoh masyarakat dan lainnya membentuk barisan bersama sebagai kelompok atau kaum reformasi, yaitu kelompok yang tadinya teralienasi oleh sistem Orde Baru. Kekuatannya terakumulasi seiring dengan merebaknya ketidakpuasan masyarakat atas kegagalan pemerintah Orba dalam mengatasi berbagai hal, terutama ekonomi. Timbulnya tindak kekerasan bahkan adanya korban kasus Semanggi (Trisakti) menimbulkan kebencian terhadap pemerintahanb Rezim Soeharto . kesumpekan, kekecewaan yang terus bertumpuk karena kesenjangan dan ketidakadilan, yang akhirnya menggumpal dalam suatu kata mempersatu perjuangan yang digerakkan dan disurakan mahasiswa mempersatukan aspirasi rakyat, maka ledakan gerakan yang bernama “reformasi” (Sutrisno dalam Malik, 1998:304). Dengan demikian merebaklah semangat gerakan reformasi total, yang pada tanggal 21 Mei 1998 dapat menjatuhkan kepamimpinan Presiden Soeharto. Sampai sekarang perjuangan kaum reformasi belum selesai.

Reformasi diartikan sebagai suatu gerakan pembaharuan yang bertujuan mengkoreksi bekerjanya berbagai institusi dan berusaha menghilangkan berbagai kebobrokan yang dianggap sebagai sumber “malfunction” nya institusi-institusi, dalam suatu tata-sosial yang ada. Jadi tujuannya lebih kepada memperbaharui fungsi daripada memperbaharui struktur. Inilah salah satu ciri yang membedakan “reformasi” dari “revolusi” (Hoult, 1969:274,302). Revolusi diartikan sebagai implemintasi (yang purposif) dari suatu strategi kekuasaan yang ditunjukkan untuk mendorong timbulnya perubahan dalam struktur sosial (Johnson dalam Skocpol,1991:9). Perbedaan reformasi dengan revolusi dijelaskan Skocpol (1991:9) sebagai berikut:

Apabila pemegang otoritas fleksibel,cerdik dan terampil dalam mengatasi situasi tersebut, mereka akan melancarkan reformasi untuk “menyelaraskan” kembali nilai-nilai dengan lingkungan. Tetapi apabila para penguasa keras kepala dan tak kenal kompromi, maka revolusi akan muncul sebagai upaya untuk melakukan perubahan sistematis dengan cara kekerasan. Ini akan

terjadi segera setelah “faktor-faktor keberuntungan” (factors contributed by fortune) berhasil melumpuhkan kemampuan penguasa untuk menggunakan kekerasan. Pandangan Skocpol ini sangat penting karena akan menjadi acuan tentang lingkup penelitian dari gerakan reformasi sosial, yang dimulai dengan adanya tahapan dari adanya ketegangan struktural berupa krisis, tingkat fleksibilitas pemegang otoritas, dan upaya penyelesaian kembali nilai-nilai dengan lingkungan. Tetapi apabila penguasa keras kepala ingin mempertahankan status quo, maka revolusi sosial tidak dapat dihindari. Yang masih menjadi pertanyaan dari reformasi sosial sekarang adalah tingkat penyelesaian dengan lingkungannya, yang sekarang terus menjadi kaum reformis.

Jadi apa yang dilakukan oleh gerakan reformasi hanya membongkar sebagian nilai-nilai dasar tidak seluruhnya, mungkin hanya menyeleksi sebagian aspek saja. Reformasi sosial yang diharapkan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah reformasi hukum dalam kepastian hukum dan keadilan untuk menyelesaikan konflik-konflik kepentingan, reformasi ekonomi untuk membuat struktur pemerataan dan menghilangkan monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme dan akhirnya reformasi budaya, yaitu proses transformasi budaya dari penyakit-penyakit feodalistik, peternalistik, sehingga menjadi iklim beradab, beda pendapat, menghormati oposisi dalam wacana akal sehat dan bingkai penghormatan pluritas demokrasi (Sutrisno dalam Malik, 1993:304).

Maka sebagai alat analisis selanjutnya digunakan teori kritis masyarakat emansipatoris dan Habermas (1971). Saran dari Habermas bahwa konsep Marx perlu diadaptasikan kembali disebabkan karena: (1) Pemisahan negara dengan masyarakat (periode kapitalisme liberal) tidak berlaku lagi politik bukan lagi merupakan superstruktur masyarakat; (2) standar hidup masyarakat sudah berkembang, kelas sosial semakin terintegrasi ke dalam masyarakat, bentuk penindasan hak atas masyarakat tidak hanya dirasakan hanya oleh kaum buruh tetapi oleh

kelompok sosial lainnya, sehingga teori kelas sosial lainnya, sehingga teori kelas sosial perlu modifikasi; (3) Kontradiksi kelas sosial dan tumpuan harapan “revolusi” tidak pada kaum buruh lagi. Oleh karena itu menurut Habermas kritik terhadap Marx perlu mengolah: (a) menemukan pertautan teori dan praksis. (b) materialisme sejarah.

Menurut Habermas, pelaku-pelaku praksis emansipatoris adalah kaum cendekiawan dan mahasiswa yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengadakan emansipasi revolusioner berdasarkan paradigma kerja, yaitu melalui dialog-dialog komunikatif dan tindakan komunikatif (bukan revolusi politik tetapi dengan perbincangan nasional). Sedangkan materialisme sejarah menurut Habermas, pandangan Marx mengandung pengandaian antropologis dan genetis tertentu yang bereferensi pada paradigma kerja yang merupakan teori revolusi sosial. Sejarah menurut Marx, sebagai tahapan perkembangan cara-cara produksi. Habermas ingin membebaskan teori ini dari dogmatisme, untuk diformulasi baru menjadi konsep kerja sosial dan sejarah spesies, yang menentukan pandangan tentang basis dan suprastruktur. Menurut Habermas, materialisme sejarah yang merupakan proses evolusi sosial dalam dua dimensi, yaitu: (1) proses perkembangan kekuatan-kekuatan produksi yang tergantung pada penerapan pengetahuan yang dapat dikelola secara teknis (ekonomi); (2) proses perkembangan pranata-pranata yang tergantung pada pengetahuan moral psikis, berupa tafsiran budaya mengenai apa yang dimengerti tentang hidup yang baik (politik) (Habermas, 1971, yang disitir Hardiman, 1990:80-105). Pandangan-pandangan teori dari Habermas tersebut, merupakan proses yang dilakukan oleh kelompok gerakan proreformasi, yang diperjuangkan untuk mengubah keadaan.

Karakter teori kritis menurut Horkheimer (1985:188-243), yang disitir Hardiman (1990:58), adalah: (1) bersifat historis artinya dikembangkan pada situasi yang konkrit dan berpijak di atasnya; (2) disusun dalam kesadaran akan keterbatasan historis para pemikrnya dan kritis terhadap dirinya (evaluasi, kritis dan

refleksi diri); (3) metode dialektika sehingga merasa curiga terhadap kenyataan aktual (menelanjangi kedok-kedok ideologi yang digunakan menutup-nutupi manipulasi, ketimpangan dan kontradiksi-kontradiksi di dalam masyarakat); (4) teori yang bermaksud praktis, yaitu untuk mendorong transformasi masyarakat.

Uraian selanjutnya bagaimana gerakan reformasi yang dikaji dari perspektif teori kritik masyarakat menurut Habermas dan Horkheimer. Gerakan reformasi yang dikumandangkan oleh kelompok reformasi para mahasiswa, tokoh masyarakat, para pensiunan dari kalangan ABRI, para aktivis LSM dan seluruh warga masyarakat telah melakukan kritik terhadap kenyataan aktual masyarakat. Pada masa Orde Baru yang tabu dengan berbagai perbedaan pendapat dan kritik, banyak dari kelompok reformasi yang telah menjadi korban atau tumbal Orde Baru. Penindakan yang dilakukan berupa teror mental, penahanan, ancaman terhadap dirinya dan keluarga, pengasingan dari hajat hidupnya, penyiksaan dan penganiayaan, pemberhentian sebagai anggota legislatif (*recalling*), dihilangkan hak pribadinya sebagai warga negara sampai terjadinya penculikan serta penghilangan nyawa seseorang, merupakan peristiwa dalam pergumpulan antara kaum reformis dengan penguasa Orde Baru.

Namun sedikit demi sedikit upaya kaum reformasi yang gencar melakukan kritik mulai dapat membuka menipulasi berbagai peraturan dan kebijakan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum dan budaya (nilai). Hasil usaha kaum reformasi tersebut telah tersosialisasikan kepada masyarakat melalui media dan berbagai kegiatan kelompok atau aktivis LSM, sehingga mulai timbul keberanian warga masyarakat menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah.

Kebijakan birokrasi pada masa Orde Baru merupakan realitas objektif sebagai institusi yang dapat legalitas yang harus diterima sampai pada tingkat individu, yang dengan sistem pemerintahannya yang kontroversial, melahirkan gerakan

reformasi total. Untuk menjelaskan hal demikian, maka digunakan teori sosiologi pengetahuan realitas konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann(1966). Teori ini dapat menjebatani penjelasan dari tingkat institusi sampai pada tingkat individu. Menurut Berger (1966:17), bahwa sosiologi pengetahuan memperoleh proporsi akarnya dari Marx, yakni bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya. Mengenai kesadaran sosialnya, maka Berger mengemukakan teorinya sebagai berikut: (1) bahwa masyarakat merupakan kenyataan objektif yang berkembang melalui institusionalisasi melalui aktivitas dan tradisi, kemudian melalui legitimasi dengan simbolisasi serta konsep mekanik dan organisasi sosial;(2) bahwa masyarakat merupakan kenyataan objektif diinternalisasi melalui proses sosialisasi.

Kenyataan objektif sistem kekuasaan pemerintahan Orde Baru, menghasilkan sekelompok elit penguasa dalam bidang politik dan ekonomi. Artinya menciptakan kelompok warga masyarakat yang mempunyai kesadaran materi dan penguasa materi yang dominan. Kenyataan demikian dilanggengkan dengan mendapat legitimasi dan justifikasi pemerintah melalui jalinan bisnis penguasa-pengusaha dalam kerangka demi pembangunan. Kenyataan objektif demikian sama halnya dengan konsep Marx tentang “mode of production” yang menentukan proses sosial politik dan kehidupan intelektual secara umum. Melalui simbolisasi pembangunan serta konsep mekanik yang menyebabkan seluruh komponen bangsa tergantung kepada penguasa tunggal, maka hal demikian akan menjadi kenyataan subjektif (masuk akal). Kemudian terinternalisasi, artinya kesadaran penguasaan materi dan kekuasaan terserap ke dalam kesadaran individu (kaum reformis), dipengaruhi oleh dunia sosial yang diciptakan penguasa, sekaligus menimbulkan rangsangan untuk memposisikan kesadaran terhadap suprastruktur dan infrastruktur yang berimbang, tidak termarjinalisasi, tidak teralienasi, tidak tereksplorasi, tidak direndahkan partisipasinya dalam menentukan kebijakan publik. Bentuk kesadaran tersebut adalah ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan Orde Baru,

sehingga perlu mereformasi sistem tersebut. Maka lahirlah gerakan reformasi total yang masih berlangsung hingga saat ini. Demikian perspektif teori konstruksi realitas sosial tentang gerakan reformasi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Bahwa terdapat hubungan kausalitas antara ketegangan struktural dengan terjadinya kerusuhan sosial dan terjadinya gerakan reformasi sosial. Ketegangan struktural timbul sebagai akibat adanya sistem kekuasaan yang menguasai infrastruktur dan superstruktur, yang mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terdominasi, teralienasi, tereksplorasi, tertindas haknya sebagai warga negara dan termarginasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya juga agama. Kenyataan demikian adalah realitas objektif hasil eksternalisasi proses institusionalisasi dan legitimasi dari format sosial pemerintahan Orde Baru, yang kemudian diserap menjadi kenyataan subjek (masuk akal secara subjektif). Melalui proses internalisasi atau menyerap dunia objektif ke dalam kesadaran, sehingga dunia subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial objektif. Kondisi dunia sosial demikian yang menimbulkan adanya kerusuhan sosial dan gerakan reformasi total. Gerakan reformasi total timbul oleh adanya kesadaran kaum reformasi terhadap dunia sosialnya. Jadi dunia sosialnya yang menimbulkan kesadarannya.

E. Involusi Etika Sosial Masyarakat

Ada beberapa pertimbangan mengapa etika sosial Indonesia perlu dibangun kembali. Pertama mengenai berkembangnya tesis-tesis masa depan peradaban, dan kedua mengenai realitas kehidupan masyarakat.

Tesis yang mengkhawatirkan dan akan mempengaruhi terhadap orientasi etika sosial masyarakat adalah tesis Samuel. P.

Huntington dan tesis Francis Fukuyama. Tesis Huntington mengatakan bahwa sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru ini tidak lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya, yang menarik tesis dari Francis Fukuyama yang lebih terkait dengan etika sosial. Menurut Fukuyama akhir dari sejarah adalah demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi itu diterobos oleh kultur dan tergantung pada ikatan moral kepercayaan sosial. Ini adalah ikatan tak terucap dan tak tertulis antara kreativitas perorangan dan menjadi alasan bagi aksi kolektif.

Pandangan tersebut sekaligus mengukuhkan betapa menentukannya masalah etika sosial, dalam hal ini adalah kepercayaan, kejujuran (sosial), nilai-nilai sosialisasi, nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai moralitas.

Demikian pula realitas kehidupan masyarakat, dimana ada empat alasan peran etika semakin penting, yaitu :

Pertama, kehidupan masyarakat semakin pluralistik menyebabkan nilai-nilai moralpun semakin heterogen. Tatanan normatif dan pandangan moral saling bertentangan dan mengajukan klaimnya, sehingga membingungkan moralitas mana yang akan diikuti. Budaya munafik, *vested interst*, terpisah nya ucapan dengan perbuatan kelompok elit penguasa, menyebabkan semakin bingungnya norma sosial.

Kedua, saat ini hidup pada masa transformasi masyarakat, menyebabkan terjadi perubahan berpikir yang radikal, rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme, religius serta sistem pendidikan yang merubah lingkungan kita. Tiga processual (Spesialisasi fungsionalis proses sosial, Abraham, 1980:9), tidak terencana dengan jelas, transformasi struktural mengarah kepada pemusatan kekuasaan, orientasi ke arah maju yang titik tolaknya tidak berbasis pada budaya lokal, sehingga melemahkan nilai-nilai budaya sendiri. Transformasi processual lebih banyak dimanipulasi (live service) tidak maknawi, bahkan dilakukan dengan intimidasi dan ancaman hak asasi manusia.

Ketiga, pada saat ini sedang menghadapi proses perubahan proses perubahan sosial budaya dan moral. proses pembangunan dengan introduksi teknologi syarat nilai yang akan berbenturan dengan nilai-nilai dan pedoman hidup yang bersumber dari agama. Pada kemunculannya agama sering tampil dalam wajah yang eksklusif.

Etika dan ajaran moral bangsa kita perlu rekatulisasi dan revitalisasi kembali. Etika yang diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, adalah untuk mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. yang terjadi sekarang mengapa bangsa ini tidak mengerti ajaran moralnya sendiri seperti perilaku menjarah, tindak kekerasan dan lain-lain. Sedangkan ajaran moral adalah ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan ataupun tulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah masyarakat-lembaga, ideologi dan peran moral sendiri. Masyarakat atau lembaga meliputi institusi yang menyangkut kepentingan kehidupan manusia mulai dari unit sosial keluarga sampai negara Sumber ideologi meliputi segala macam ajaran, teori, agama, politik dan kepercayaan, kode etik dan lainnya. Peran moral sendiri adalah berupa *super-ego*, polusi batin dan pengawasan moral (Suseno, 1998).

Sumber moral lembaga bagi individu pada saat ini banyak terjadi distorsi. Misi lembaga sebagai upaya mengejawantahkan aspirasi, cita, tujuan bahkan hati nurani, ternyata banyak diselewengkan menjadi aspirasi personal, kelompok atau *golongan vested interst*. Lembaga terkooptasi oleh pribadi, bahkan mempersonifikasikan lembaga menjadi milik paten aspirasi pribadi. Dengan sendirinya lembaga tidak lagi menjadi inspirasi dan pengayom ajaran moral, bahkan hukum orde baru,

yang meninggalkan kasus dan luka bagi masyarakat seperti: Kasus Udin, Marsinah, kerusuhan, DOM Aceh dan lain sebagainya.

Gelombang budaya demokrasi, liberal, konflik peradaban, pluralistik budaya, transformasi sosial budaya, perkembangan sains dan teknologi yang menyebabkan perubahan sosial budaya, berujung pada runtuhnya moral dan etika sosial masyarakat. Bukannya menjadi kristalisasi yang semakin solid, melainkan munculnya “egoisme moral”, berupa kekerasan dan otoritas moral yang tidak terkontrol.

Involusi etika sosial diartikan sebagai keadaan mandeg, macetnya etika, norma-norma moral dan kesadaran moral masyarakat. Proses pembangunan yang telah dipimpin oleh Rezim Orde Baru Soeharto, mencapai anti klimaks dengan timbulnya involusi etika sosial, rendahnya harkat dan martabat manusia Indonesia dimata dunia Internasional.

Etika sosial adalah sangat luas menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung, maupun dalam bentuk kelembagaan, juga sikap kritis terhadap pandangan dunia dan ideologi serta tanggung jawab terhadap lingkungan (Suseno, 1996:7). Masyarakat nampaknya sudah kehilangan orientasi, sulit menentukan sikap dan tindakan, tidak mampu menjawab bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Artinya ajaran-ajaran moral seperti ini wejangan, khotbah da'i, patokan hidup, tata krama, sopan santun, peraturan dan ketetapan sudah tidak lagi menjadi milik dan orientasinya. Apalagi untuk beretika atau untuk mengerti mengapa harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kelompok perusuh, penjahat, tindak kekerasan, main hakim sendiri yang marak akhir-akhir ini diibaratkan sudah tidak menggunakan buku petunjuk bagaimana harus hidup bermasyarakat.

Kelompok perilaku negatif tersebut sudah tidak ada komitmen terhadap moral, artinya tidak tau acuan baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan betul dan salahnya sikap dan

tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas, nampaknya norma-norma pun mengalami involusi, kemandegan. Fenomena melanggar norma umum seperti sopan santun sikap lahir batin, norma khusus seperti permainan sepak bola yang curang, sampai pada norma hukum yang dituntut tegas untuk keselamatan dan kesejahteraan umum, sudah banyak yang menentang. Perasaan takut untuk keluar, rasa tidak nyaman belanja atau ke bank sebagai isyarat mulai tidak ada perasaan takutnya melanggar norma hukum oleh kelompok tertentu.

Seandainya tesis Fukuyama benar bahwa akhir dari sejarah adalah demokrasi liberal, apakah involusi itu sebagai akibat adanya kebebasan dan tidak tanggung jawab. Kalaupun ada kebebasan, maka kebebasan yang seharusnya adalah kebebasan eksistensial yaitu adanya kemampuan manusia untuk berfikir dan bertindak dan terwujud dalam tindakan. Pola berpikir nampaknya yang menyebabkan adanya distorsi dengan kebebasan eksistensial, manusia kita yang disosialisasikan pola berpikir sistematis, tergantung pada sistem, sehingga tidak ada kreativitas berfikir atau terbelenggu oleh keharusan untuk berfikir sama-sama sesuai petunjuk penguasa. Begitu selesai reformasi kebebasan eksistensinya melenceng atau mengikuti apa yang telah dipolakan (institutionalized) oleh rezim penguasa Orde Baru. Dengan sendirinya kebebasan sosial yang secara hakiki seharusnya dihayati dalam hubungan dengan orang lain, ternyata lewat begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab.

Selama 32 tahun Zaman Orde Baru, telah muncul “patologi” moralitas “heteronom” yaitu orang yang mentaati peraturan tetapi tanpa melihat nilai, atau maknanya (Immanuel Kant, 1724-1804). Hidup sesuai dengan tuntutan moral lingkungan, bukan karena kesadaran, melainkan karena rasa takut, tertekan, pada saat demikian sikap moral dinilai negatif karena heteronom (heterus=lain, nomos=hukum). *Heteronom* adalah distingsi dengan sikap moral otonom (autus, sendiri). Otonom

moral berarti bahwa manusia menjadi kewajibannya, karena ia sendiri sadar sehingga yang muncul heteronomi bukan otonom moral, karena sikap penyakit yang seharusnya jadi panutan malah bersikap hipokrit (munafik) yang dihiasi dengan bahasa penghalusan, eufimism (penghalusan). Banyak terjadi pelanggaran hukum yang justru dilakukan penguasa seperti KKN yang merebak di rezim Orde Baru dalam berbagai lapangan kehidupan.

Suara Hati dan Lembaga Normatif

Kemana larinya suara hati manusia Indonesia yang termasuk kelompok penyimpangan sosial? Suara hati yang diartikan sebagai kesadaran pribadi akan kenyataan dan tanggung jawab pribadi sebagai manusia dalam situasi konkrit (Suseno, 1989:54). Suara hati adalah sesuatu yang kompleks, berkaitan dengan lembaga normatif masyarakat yaitu masyarakat, ideologi, dan kemampuan diri sendiri berupa “*super-ego*”. Rendahnya moralitas bangsa karena rendahnya kualitas ketiga lembaga normatif tersebut, misalnya karena masyarakat yang sakit, ideologi yang kena polusi, dan *super-ego* yang inspirasinya dari masyarakat hasil rekayasa kelompok elit penguasa.

Masyarakat sakit artinya berlaku paham relativisme sosiologis, artinya bahwa tiap masyarakat adalah norma sejauh fungsi-fungsinya berjalan baik, dan patologi hanya individu terhadap cara hidup masyarakatnya (Erich Fromm, 1995:11). Pada masyarakat kita, kelembagaan normatif mengalami involusi, diantaranya karena ada yang memperdaya pemikiran anggota masyarakat yaitu “keabsahan konsensus” (Consensual validation). sebab sering konsensus itu hasil rekayasa elit pengusaha untuk kepentingan status quo, seperti anggota DPR yang diangkat, jabatan presiden yang lebih dari dua period, asas tunggal, sistem partai, sistem pemilihan dan lainnya. Kesemuanya menyebabkan warga masyarakat gagal mencapai kebebasan, pengungkapan diri yang asli, sportivitas, kreativitas, menungkapkan ide, gagasan dan seterusnya, maka warga tersebut mempunyai “cacat” (defect)

jika tujuan obyektif tersebut tidak tercapai seperti rezim Orde Baru Soeharto, maka timbul cacat yang terpolakan selain sosial. gejala yang muncul sebelum tumbanganya Soeharto adalah keserakahan, ambisi, intimidasi, pencekalan dan penculikan, maka ini adalah bentuk-bentuk masyarakat yang tidak sehat. Akibatnya demikian mayoritas menjadi apatis, lemah visi, tidak ada prakarsa dan keterampilan. Memang penguasa dapat mengeksploitasi rakyat, tetapi pribadi-pribadinya menjadi penakut, rasa curiga, kesepian, apabila situasi eksternal tidak dikuasai maka runtuhlah sistem tatanan kehidupan sosial. Masyarakat tidak mampu menjalankan fungsinya melayani penguasa, atau sebaliknya akan bereaksi dengan akumulasi kebencian dan pengrusakan, kerusakan, penjarahan yang menghancurkan diri sendiri, penguasa dan sistem yang berlaku. Gambaran tersebut nampak seperti yang telah dan sedang dirasakan sekarang.

Lembaga normatif Pancasila sebagai ideologi yang mengayomi masyarakat nampak mengalami suatu distorsi menjadi ideologi yang utopis. *Ideologi utopis* adalah jenis orientasi yang melampaui kenyataan dan sekaligus memecah belah batas-batas tatanan yang ada, suatu distings antara keadaan pikiran yang utopis yang ideologis. Pikiran yang bersifat utopis tidak sesuai dengan kenyataan tempat berlangsungnya pikiran itu (Manheim, 1991:209). Pembudayaan P4 selama orde baru dalam kurun 32 tahun, banyak tidak sesuai dengan kenyataan. Ideologi Pancasila hanya sebagai *slogan*, alat propaganda dan senjata pamungkas menghadapi tokoh kritis, seolah-olah dengan Pancasila telah membentuk kehidupan sosial yang aktual dan kongkrit, dibangun atas dasar keadaan pikiran yang bersifat ideologisasi dilakukan dengan represif, kondisi seperti ini maka ieologi (Pancasila) tidak akan menjadi sumber asas-asas moral, bangsa, melainkan memecah belah batas tatanan yang ada.

Lembaga normatif "*super ego*", merupakan istilah teknis suara hati dalam kajian psikologis. *Super-ego* merupakan jurusan

moral spontan, sebagai pernyataan diri dalam perasaan malu dan bersalah yang muncul secara otomatis dalam diri, apabila melanggar norma-norma yang telah terinternalisasikan. Biasanya muncul pada saat tidak ada pihak lain yang menyaksikan pelanggaran. *Super-ego* sebagai refleksi dari norma-norma lingkungan kita, baik itu masyarakat atau ideologi. Kelemahan *super-ego* yang menghinggapi kelompok perusuh adalah berbanding lurus dengan kondisi masyarakat yang sakit dan ideologi yang utopis. tetapi bahwa suara hati memuat tuntutan mutlak untuk selalu bertindak baik, jujur, wajar, adil, apapun biayanya dan apapun pendapat lembaga-lembaga normatif (Suseno, 1989:57). Namun sumber normatif *super- ego* telah dilumpuhkan dan terkontaminasi.

Tantangan lain membangun etika normatif adalah dalam proses awal pelembagaan normatif yang tergoda oleh arah kebahagiaan yang sifatnya *hedonisme* dan *utilitarianisme*. Hedonisme falsafah mencari nikmat dan menghindari perasaan yang tidak enak. Kecenderungan ini ada dengan menentang etika tradisional dan munculnya perilaku tidak mau menahan diri, berkorban dan perjuangan, terkadang juga rakus. Utilitarianisme adalah menyamakan kebaikan moral dengan manfaat. Kecenderungan utilitarian nampak pada sikap penguasa yang mmaksakan kebijakannya, hal tersebut sebagai akibat adanya perbedaan moral apakah tindakan saya berguna bagi saya atau bagi orang lain, tindakan yang berguna untuk masyarakat atau penguasa belum tentu baik bagi orang lain. Sifat utilitarianisme adalah universal artinya norma-norma bukanlah akibat bagi si pelaku, melainkan ada akibat baik bagi seluruh dunia, ada segi pertanggungjawaban dan moralitasnya, namun kelemahannya adalah tidak menjamin keadilan dan hak asasi manusia, karena yang penting adalah manfaat. Kasus demikian terlihat dalam proses pembebasan tanah dan penggusuran rumah penduduk untuk pembangunan.

Membangun Etika Sosial dan Modal Sosial (Social Capital)

Membangun etika sosial adalah membangun kembali sumber-sumber lembaga normatif masyarakat, ideologi dan *super-ego* manusianya. Arah reformasi adalah melakukan transformasi masyarakat dan ideologi. Keberhasilan transformasi lembaga normatif ini dengan sendirinya akan *membangun* pula *super-ego*. Hanya kendali sosialisasi yang cukup lama. Figur pemimpin dengan sikap kepribadian yang kuat yaitu yang dipercaya (jujur), niali otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, realistik dan kritis yang akan mampu membangun kembali keutuhan etika sosial masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan upaya membangun modal sosial yang telah rusak.

Untuk membangun kembali etika sosial, maka modal sosial (social capital) yang ada perlu direaktualisasikan kembali, sehingga aspek jaringan sosial, berbagai norma dan kepercayaan atau kejujuran (konsep Putnam) dapat diungkapkan dan dapat dijadikan model untuk menyelesaikan berbagai problem etika sosial. Akibat konflik yang terjadi yang menghancurkan etika sosial, maka bagaimana merehabilitasi kerusakan modal sosialnya, melalui pembangunan komunitas dengan mengembangkan hubungan dekat, partisipasi demokrasi dan penekana pada rasa memiliki komunitas serta kepercayaan. Modal sosial yang diperlukan adalah sifat dan sikap untuk saling percaya dan saling dipercaya baik dalam bentuk relasi vertikal maupun relasi horizontal, sehingga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi (high trust society), sebagai konsep modal sosial Fukuyama dalam bukunya: *Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, sehingga diperoleh kemampuan dijamin perolehan manfaat melalui jaringan sosial atau struktur sosial yang ada (konsep Alejandro Portes). Bagi masyarakat Indonesia sudah sejak dulu dimanapun modal kejujuran atau amanah, adalah nilai tradisional sebagai modal sosial yang selalu

dijadikan rujukan untuk memilih tokoh atau pemimpinnya, terutama pada masyarakat pedesaan.

BAB III PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI

A. Definisi Desa dan Kecamatan

Menurut UU No. 22 th 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.”

Sedangkan menurut UU No. 5 tahun 1979 “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Kepala Desa dalam bertugas dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- ◆ Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)

- ◆ Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- ◆ Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- ◆ Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

- Kedudukan dan susunan organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sedangkan camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Organisasi kecamatan dipimpin oleh (1) satu camat, 1 (satu) sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

B. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan

tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah berbagai urusan pemerintahan. Sedangkan Menteri merupakan Presiden dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintah tertentu.

Urusan Pemerintahan yang dimiliki pemerintahan pusat terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat, sedangkan urusan pemerintah konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik.

Untuk kedua Urusan Pemerintahan terakhir, yakni urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan untuk urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pemerintah pusat kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut.

a. Urusan Politik Luar Negeri

Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau dua untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.

b. Urusan Pertahanan

Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain-lain.

c. Urusan Keamanan

Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, dan lain-lain.

d. Urusan Yustisi

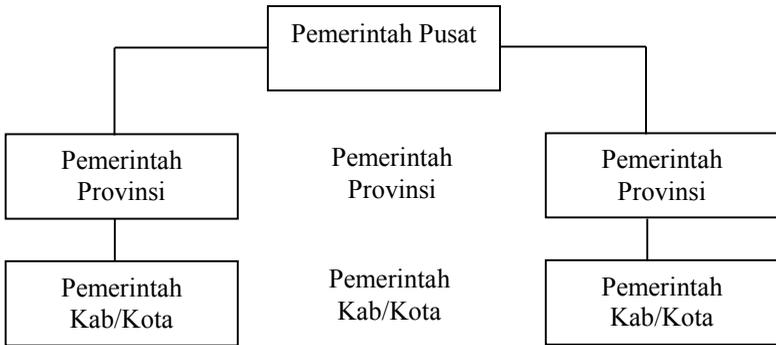
Yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan, pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga permasyarakatan, dan lain-lain.

e. Urusan Agama

Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari libur agama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lain-lain.

f. Urusan Moneter

Yakni urusan keuangan dan fiscal



Gambar: *Bagan Pemerintah Pusat*

C. Demokrasi dan Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos/cratein*. *Demos* artinya rakyat, sedangkan *kratos/cratein* adalah kedaulatan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok serta pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai.
- b. Berbagai prasarana pendapat umum yaitu pers, televisi, dan radio.
- c. Adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan adanya sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan.

Budaya demokrasi: mewujudkan pemerintahan demokratis memang tidaklah mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintahan demokratis akan terwujud. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis

diperlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi. Prinsip-prinsip ini terdiri dari :

a. Kebebasan

Yaitu kekuasaan memilih dengan bebas atau keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atau kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun.

b. Persamaan

Dalam setiap negara terdiri atas berbagai ras, suku dan agama agar upaya mewujudkan negara demokratis terwujud maka harus ada persamaan yang mengandung arti tidak ada keistimewaan bagi siapapun serta pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang atau tidak membedakan antar suku, ras dan agama.

c. Solidaritas

Rasa solidaritas harus ada dalam negara demokrasi. Adanya sistem solidaritas ini, amaka selalu ada perbedaan pandangan, dan bahkan kepentingan, tiap-tiap masyarakat akan tetap terikat karena adanya tujuan bersama. Adanya nilai solidaritas ini, maka akan tumbuh kemauan untuk lebih mengutamakan kebaikan/kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

d. Toleransi

Sikap menghargai (membiarkan dan membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya). Yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Inti dari toleransi adalah penghargaan terhadap perbedaan. Dengan bertoleransi berarti kita bersikap menghargai segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. Toleransi sangat penting diterapkan dalam negara yang masyarakatnya majemuk. Karena dalam masyarakat majemuk sangat berpotensi terjadi perselisihan akibat perbedaan pendapat, kepercayaan, pandangan, dan sebagainya.

e. Menghormati Kejujuran

Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak.

f. Menghormati Penalaran

Penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antar warga masyarakat demokratis.

g. Keadaban

Ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.

D. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat dimana anggota didalamnya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama, dan budaya, namun mereka dapat hidup dan bekerja sama secara damai, serta saling dapat menghormati dan tunduk pada hukum maupun pemerintahan. Masyarakat madani disebut pula dengan *civil society*. ***Civil Society*** berasal dari kata *civilis societas* yang merupakan bahasa latin. Masyarakat madani tidak terbentuk begitu saja karena ada persyaratan, seperti adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Civil society merupakan wilayah publik yang diciptakan dan dijalankan oleh warga negara biasa (bukan oleh pejabat pemerintah). Dalam *Civil society* warga negara memiliki peran dan andil besar dalam kehidupan negara.

dalam pelaksanaan pemerintahan ditunjukkan melalui ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan anggota masyarakat (*participation*).
- b. Tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dibawah (*responsiveness*).
- c. Bertumpu pada penegakan hukum atau aturan hukum (*law enforcement and rule of law*).
- d. Terbuka pada keanekaragaman anggotanya (*inclusiveness*)
- e. Bertumpu pada konsensus (*concensus*)
- f. Dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya (*accountability*)
- g. Efisien, efektif, stabil, dan bersih (*checks and balances*)
- h. Adanya proses yang transparan (*transparency*)

Masyarakat madani mencerminkan kehidupan masyarakat yang mandiri, cerdas, beradab, sejahtera, memiliki tingkat, kemampuan yang tinggi, serta mampu bersikap kritis/peka terhadap kehidupan sosial dan berpartisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Terwujudnya masyarakat madani bergantung pada kelompok pokok, yaitu masyarakat dan pemerintah. Kedua komponen tersebut harus saling mendukung dan bekerja sama. Situasi politik di Indonesia saat ini kita rasakan mulai mengindikasikan terwujudnya masyarakat madani.

Syarat untuk mewujudkan masyarakat madani:

- a. Keyakinan
Menumbuhkan keyakinan masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan suatu masyarakat madani.
- b. Kepercayaan
Rasa saling percaya dalam masyarakat sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat madani. Rasa saling percaya dapat ditumbuhkan dengan meningkatkan rasa keadilan dan kejujuran dalam berbagai dimensi kehidupan.
- c. Persamaan Tujuan dan Misi
Cita-cita masyarakat harus diupayakan adanya kesamaan pandangan mengenai tujuan dan misi.
- d. Satu hati dan Saling Bergantung

Apabila tercipta rasa satu hati, maka akan tercipta saling ketergantungan. Hal itu terlihat dari makin menguatnya rasa saling bergantung antara individu dengan masyarakat. Saling bergantung bukan berarti tidak bisa mandiri sehingga hanya bisa mengandalkan orang lain, melainkan diartikan sebagai saling membutuhkan serta terikat satu sama lain.

Meskipun aktivitas masyarakat madani terbilang bebas dari kekuasaan pemerintah, namun mereka tetap harus berada pada jalur yang benar, artinya mereka tetap patuh pada peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat madani juga dapat bertindak sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan hak asasi warga tidak terkekang. Karena untuk mewujudkan masyarakat madani, hak asasi warga negara harus terjamin pelaksanaannya.

Dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani, diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang maju, beradab, yang memiliki sifat-sifat peduli sosial, saling berbagi, dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terhadap diri sendiri maupun orang lain.

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara itu ada dua, yaitu pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Adapun pengertian negara menurut Munandar S. 2005 bahwa Negara merupakan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat, bisa juga dikatakan merupakan integrasi dari kekuatan politik, sekaligus organisasi pokok dan kekuasaan politik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi dari kelompok-kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia. terdapat beberapa elemen / unsur yang berperan dalam membentuk suatu negara yaitu:

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (*staatsleer*) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi).

Suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

b. Wilayah (*teritorial*)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

c. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

B. Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berarti “pembentukan”, berasal dari kata “*Constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Yang dibentuk adalah sebuah negara. Maka Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan aturan-aturan dasar (fundamental) yang dibentuk untuk mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Herman Heller, dalam bukunya *Staatlehre* mengemukakan bahwa konstitusi mempunyai tiga pengertian:
 - a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, belum dalam arti hukum. Konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politik.
 - b. Setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi, maka konstitusi menjadi suatu kaidah hukum (*rechtverfassung*).
 - c. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
2. Carl Schmitt, dalam bukunya *verfassungslehre* mengemukakan ada empat bagian besar pengertian konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Konstitusi dalam arti absolute
Dalam arti absolute konstitusi adalah sebagai berikut:
 - 1) Kesatuan organisasi yang nyata mencakup semua bangunan hukum dan organisasi yang ada dalam negara.
 - 2) Sebagai bentuk negara dalam arti keseluruhannya
 - 3) Sebagai faktor integrasi
 - 4) Sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara
 - b. Konstitusi dalam arti relatif
Dalam arti relatif konstitusi mengandung arti sebagai berikut:
 - 1) Sebagai tuntutan golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa
 - 2) Sebagai konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis.
 - c. Konstitusi dalam arti positif
Pengertian ini dihubungkan dengan ajaran tentang keputusan. Konstitusi merupakan keputusan politik yang tertinggi.

d. Konstitusi dalam arti ideal

Konstitusi merupakan idaman kaum borjuis liberal sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Pihak penguasa dituntut agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Sedangkan klasifikasi Konstitusi di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Konstitusi (hukum dasar) tertulis yang berwujud UUD 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundangan yang lebih rendah. Menurut UU No. 10 tahun 2004 tentang peraturan perundangan RI adalah:
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
2. Konstitusi (hukum dasar) tidak tertulis yang berwujud konvensi.

Contoh konvensi di Indonesia, yaitu:

- a. Pidato kenegaraan menjelang peringatan hari Proklamasi Indonesia
- b. Pidato Presiden di awal bulan Januari dalam rangka penyampaian nota RAPBN di depan sidang DPR
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat kenegaraan

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*)
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid contitution*). Konstitusi fleksibilitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok:

- Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah
 - Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (*Supreme and not supreme constitution*). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.
 4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (*Federal and Unitary Constitution*). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
 5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Parlementer (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*). Dalam sistem pemerintahan presidensial (*strong*) terdapat ciri-ciri antara lain:
 - a. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan
 - b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
 - c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.

Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare “Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlemerter (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlemerter. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

C. Tujuan dan Nilai Konstitusi

1. Tujuan konstitusi

- a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan

- dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
- b. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
 - c. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi
- Konstitusi yang dibuat oleh negara ada 3 nilai yaitu:
- a. Nilai Normatif
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
 - b. Nilai Nominal
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
 - c. Nilai Semantik
Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

D. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bangsa. Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang

mendasar yaitu aturan-aturan dan norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok dalam bernegara. Konstitusi memiliki kedudukan yang formal, yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi sebagai hukum dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang lembaga-lembaga negara dan sekaligus memberi kewenangan kepadanya. Dalam konstitusi biasanya akan ditentukan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki (tingkatan) mempunyai kedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.

E. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Negara dan konstitusi berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi). Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

Jika diibaratkan sebagai bangunan, negara adalah pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kaitan antara negara dengan konstitusi adalah keterkaitan antardasar negara dan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebatinan negara.

Pembukaan memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, serta menjadi dasar hukum dari undang-undang. Pancasila dengan batang tubuh merupakan wujud yuridis konstitusional tentang suatu yang telah dirumuskan dalam pembukaan. UUD 1945 adalah peraturan perundangan tertinggi negara Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila. Konstitusi menempati posisi sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.

F. Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara

Konstitusi negara Indonesia harus ditegakkan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum bagi rakyat dan penyelenggara negara. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi sebagai berikut:

1. Dalam keluarga
 - a. Menghormati HAM anggota keluarga.
 - b. Memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota keluarga
 - c. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya membayar pajak tepat waktu
 - d. Memberi pelajaran pada anggota keluarga untuk tertib berkendara di jalan umum
2. Dalam masyarakat
 - a. Anggota masyarakat saling menghormati HAM sesama anggota masyarakat
 - b. Menghormati hak hidup, beragama, kebebasan berpendapat
 - c. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
3. Di lingkungan sekolah
 - a. Menciptakan hubungan yang harmonis aktivitas akademis

- b. Taat dan patuh terhadap tata tertib di sekolah
 - c. Mengajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang
 - d. Selalu hormat pada guru dan menyayangi sesama teman
4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- a. Kewajiban membela dan mempertahankan tanah air
 - b. Perlakuan yang sama terhadap warga negara
 - c. Berpartisipasi dalam pembangunan bangsa
5. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat berupa:
- a. Ikut serta dalam pemilu
 - b. Tertib membayar pajak untuk turut serta dalam pembangunan bangsa
 - c. Menghormati HAM
 - d. Melestarikan budaya bangsa
 - e. Aktif dalam upaya melestarikan lingkungan hidup

BAB V

SISTEM POLITIK DAN BUDAYA POLITIK

A. Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.¹

¹ Wikipedia, Sistem politik https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik diakses pada tanggal 21 September 2015 pukul 18:11

B. Pengertian Sistem Politik

Secara umum pengertian sistem politik adalah sebuah sistem yang terdapat dalam suatu negara atau masyarakat yang telah memiliki badan atau organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang sistem politik, mari baca pendapat para ahli dibawah ini tentang pengertian sistem politik:

a. Pengertian sistem politik Oleh Samuel P. Huntington

Pengertian sistem politik menurut Samuel P. Huntington bahwa sistem politik terbagi atas 5 definisi sesuai dengan komponen yang dimilikinya yaitu:

- 1) Sistem politik sebagai kultur, yaitu nilai-nilai (*values*), sikap (*attitudes*), orientasi (*orientation*), mitos (*myths*) dan kepercayaan (*beliefs*) yang relevan terhadap politik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- 2) Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
- 3) Sistem politik sebagai Kelompok (*The political system as a group*) yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik.
- 4) Sistem politik sebagai kepemimpinan (*The political system as leadership*) bahwa individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai.
- 5) Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

b. Pengertian sistem politik Oleh Robert Dahl

Pengertian sistem politik menurut Robert Dahl bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.

c. Pengertian sistem politik oleh Sri Soemantri

Pengertian sistem politik berdasarkan Sri Soemantri bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (*the legislature with legislative power*), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (*the executive with the executive power*) serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudikatif (*judiciary with judicial powers*).

Pengertian infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media of political communication*), dan tokoh politik (*political figure*).

d. Pengertian sistem politik oleh David Easton

Pengertian sistem politik menurut David Easton bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. David Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalui makna nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

e. Pengertian Sistem Politik oleh Gambriel Almond

Pengertian sistem politik menurut Gambriel Almond bahwa sistem politik adalah sebuah sistem interaksi yang dapat ditemukan dalam masyarakat merdeka (*The political system is a system of interaction that can be found in a free society*), yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah sebuah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.

f. Pengertian sistem politik oleh Rusadi Sumintapura

Pengertian Sistem politik menurut Rusadi Sumintapura bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

g. Pengertian sistem politik oleh Sukarna

Pengertian sistem politik menurut Sukarna bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara.²

² Apapengertianahli, Pengertian sistem politik menurut para ahli <http://www.apapengertianahli.com/2015/06/pengertian-sistem-politik-menurut-para-ahli.html#> diakses pada tanggal 21 September 2015 pukul 21:18

C. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.³

a. Budaya Politik Menurut Para Ahli

Pammanent dan Whittington, mengatakan bahwa dalam membahas budaya politik kita harus melihat dua konsep, yaitu budaya politik struktural. Memandang dalam perspektif budaya budaya politik berarti melihat budaya politik sebagai bagian dari fenomena politik yang terdiri dari sikap (attitude), orientasi (orientasi), trust (percaya), emosi, dan imajinasi dalam masyarakat.

Lucian W. Pye, dalam hal budaya politik. Dia menjelaskan bahwa dengan budaya politik kita lebih sistematis dan eksplisit dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebagai ideologi politik, etos dan semangat nasional, psikologi politik nasional, dan nilai-nilai fundamental masyarakat. Aspek-aspek yang membentuk nilai-nilai politik.

Mr Gabriel Almond, Budaya politik sebagai sikap yang khas dan orientasi warga negara terhadap sistem politik dan berbagai bagian, dan sikap terhadap peran warga negara dalam sistem politik. Fungsi budaya politik juga ditentukan oleh tingkat keselarasan budaya nasional dengan struktur politiknya.

Menurut Chilcote (Budiarjo) bahwa pengertian budaya politik bermacam-macam. Secara umum pengertian budaya politik merujuk pada keyakinan (faith or believe), simbol dan

³ Wikipedia, Budaya politik https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik diakses pada tanggal 21 September 2015 pukul 21:37

nilai-nilai (baca pengertian nilai atau value). Menurut Wijaya (1982) bahwa pengertian budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang meliputi ide-ide, pengetahuan (*knowledge*), adat istiadat, mitos dan lain-lain yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal inilah yang memberi rasionalisasi apakah suatu norma-norma dapat diterima atau ditolak.

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga:

1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)

b. Tipe Budaya Politik

Budaya politik parokial, budaya politik tingkat partisipasi politik sangat rendah. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan sempit jika frekuensi orientasi mereka ke empat dimensi kritis budaya politik mendekati nol atau tidak ada perhatian sama sekali untuk dimensi keempat. Jenis budaya politik umumnya ditemukan di masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedesaan khusus. Kepala, kepala desa, agama, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang politik, ekonomi atau agama.

Subyek budaya politik (subjek), budaya politik telah masyarakat yang relatif maju terkait baik sosial dan ekonomi, tapi masih pasif. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan subjek jika ada orientasi frekuensi tinggi untuk sistem politik dalam pengetahuan dan output umum benda atau tidak ada pemahaman tentang penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi struktur dan peran dalam pemerintahan pembuatan kebijakan tidak terlalu banyak perhatian. Subyek menyadari otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas. Sikap masyarakat terhadap sistem politik ditunjukkan melalui kebanggaan atau

bahkan jujuk. Pada intinya, subjek budaya politik, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik pada umumnya dan penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Budaya politik partisipan, yang merupakan budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka dan secara aktif dalam kegiatan politik. Dan juga bentuk budaya politik masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik dari empat dimensi kritis budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan memperkuat itu, dan secara aktif berpartisipasi dalam proses politik yang sedang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka dari peran mungkin untuk menerima atau menolak.⁴

⁴ Aris Kurniawan, 4 pengertian budaya politik menurut para ahli <http://www.gurupendidikan.com/4-pengertian-budaya-politik-menurut-para-ahli/diakses> pada tanggal 21 September 2015 pukul 22:21

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara dan Penduduk

Warga Negara adalah penduduk suatu Negara yang berdasarkan hukum mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota suatu Negara. Sedangkan penduduk adalah seluruh penghuni Negara, baik orang Indonesia maupun orang asing yang dalam jangka waktu tertentu, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertempat di wilayah Republik Indonesia. Setiap warga Negara adalah penduduk suatu Negara dan setiap penduduk belum tentu warga Negara, karena bisa jadi orang asing.

Warga Negara menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat (1) adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Artinya yang menjadi warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan dari orang-orang bangsa yang lain yang:

1. Bertempat tinggal di Indonesia
2. Mengakui Indonesia sebagai tanah airnya
3. Bersikap setia kepada Republik Indonesia
4. Disahkan dengan undang-undang (Kaelan, 2007:117)

Selain Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing.

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dengan demikian, yang menjadi warga Negara Indonesia bisa berasal dari manapun tetapi harus sesuai dengan peraturan dan disahkan dengan undang-undang (Kemendikbud, 2014: 35-36).

B. Asas dalam Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah suatu proses yang digunakan oleh suatu negara sebagai dasar untuk menentukan seseorang termasuk atau tidak termasuk sebagai warga negara.

Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif adalah orang yang akan menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif; sedangkan stelsel pasif adalah orang yang akan menjadi warga negara suatu negara atau yang berada dalam suatu negara tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu telah menjadi warga negara.

Berdasarkan kedua stelsel tersebut, maka seorang warga negara akan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak opsi, yaitu untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

Disamping asas yang lazim digunakan tersebut diatas, ada asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan keturunan, yaitu:

1. Asas *ius soli*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau tempat ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A walaupun orang tuanya adalah orang negara B. Asas ini dianut Inggris, Mesir, Amerika.
2. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A tapi orang tuanya warga negara B,

maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B. Asas ini dianut oleh negara RRC.

Dengan adanya perbedaan penentuan kedua asas tersebut di berbagai Negara, maka akan mungkin menimbulkan kemungkinan *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (dua kewarganegaraan)

1. Apatride, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh: Seorang keturunan bangsa A (*ius soli*) yang lahir di Negara B (*ius sanguinis*) maka orang tersebut apatride (tidak memiliki kewarganegaraan).
2. Bipatride, yaitu seorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contoh: Seorang keturunan warga B (*ius sanguinis*) yang lahir di Negara A (*ius soli*). Oleh karena itu, ia keturunan bangsa B, akan tetapi Negara A juga menganggap sebagai warga negaranya karena kelahirannya (Wnarno, 2007:47).

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2)
2. Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2)
3. Hak berpendapat. Pasal 28
4. Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2)
5. Hak dan kewajiban dalam membela Negara. Pasal 30 ayat (1)
6. Hak untuk mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat (1) dan (2)
7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat (1)
8. Hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
9. Hak mendapatkan jaminan keadilan social. Pasal 34

Setiap warga Negara memiliki hak-hak konstitusional yang ada dalam UUD 1945. Warga Negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan

hak-hak konstitusionalnya. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki Negara terhadap warga Negara. Hak dan kewajiban terhadap warga Negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga Negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut:

1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
2. Hak negara untuk dibela.
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
4. Kewajiban negara untuk menjamin system hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang, antara lain: bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945. Misalkan dengan undang-undang.

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan:

1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam:

1. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
4. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
5. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain (Kaelan, 2007:119).

Sebenarnya hak selalu berjalan seiring dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Wajib menaati hukum dan peraturan. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan *“Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk*

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”* (Kemendikbud, 2014:49).

BAB VII

HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Hukum dan Penegakan Hukum

Pengertian dari hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau intuisi hukum. Dan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berkaitan dengan norma-norma yang terkandung dalam pengertian penegakan hukum, ada norma-norma yang kita kenal yang meliputi:

1. Norma Agama

Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran aqidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak yang mengharuskan ketaatan para penganutnya. Apabila seseorang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat, orang tersebut cenderung melanggar norma-norma agama.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Sumber dari norma kesusilaan adalah hati sanubari manusia itu sendiri, yang bersifat otonomo dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang bersifat lahir, tetapi ditujukan kepada sifat batin manusia itu sendiri. Sanksi norma kesusilaan lebih menekankan pada adanya penyesalan dalam diri atau batin seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

3. Norma kesopanan

Adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Menurut *Kansil*, norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolong manusia. Sumber dari norma kesopanan tidak terlepas

dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga sanksinya pun akan muncul dari masyarakat yang bersangkutan.

4. Norma Adat

Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan karena sebagai suatu kewajiban.

Norma adat bersifat relative, artinya apa yang diharuskan atau dilarang oleh suatu masyarakat belum tentu akan diharuskan atau dilarang oleh masyarakat lainnya. Sanksi dari norma adat berupa pengucilan dari masyarakat adat atau bahkan diusir dari masyarakat adat tersebut.

5. Norma Hukum

Adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara). Menurut *Soejono Soekanto*, norma hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kedamaian akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban yang bersifat lahiriah dengan ketenteraman batiniah.

B. Macam-macam Hukum

1. Hukum berdasarkan bentuknya

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan.

b. Hukum Tidak Tertulis

Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh: hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.

2. Hukum Berdasarkan Kepentingan Yang Diatur

a. Hukum privat

Adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa. Hukum privat terdiri atas:

1) Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

2) Hukum Dagang

3) Hukum privat internasional

b. Hukum Publik

Adalah hukum yang mengatur/melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa.

1) Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara.

2) Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara, termasuk bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Hukum tata usaha negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

3) Hukum Antarnegara

Hukum antarnegara adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara.

4) Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menyangkut sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dua macam hukuman, menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri dari: Hukuman pokok (Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) dan Hukuman tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim).

5) Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan (hukum) yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, persidangan, penuntutan, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus pidana di tingkat pengadilan.

3. Hukum Dilihat Dari Hubungan Antara Aturan-Aturan Hukum Satu Sama Lain

- a. Hukum Seragam mengandung pengertian bahwa hanya ada dan berlaku satu macam aturan hukum, baik dilihat dari faktor waktu, tempat atau wilayah berlakunya, dan orang-orang terhadap siapa aturan itu berlaku.
- b. Hukum Beraneka Ragam mengandung pengertian terdapat lebih dari satu macam aturan. Hukum beraneka ragam terdiri atas hukum antar waktu, hukum antartempat, hukum

antargolongan, hukum antaragama, hukum privat internasional.

C. Konsep-Konsep Peraturan Hukum

Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum meliputi norma, sanksi, delik (tindak pidana), kewajiban hukum, tanggungjawab hukum, dan hak hukum.

1. Norma

Norma perilaku yang diatur dalam peraturan hukum memuat keharusan-keharusan (*gebod*) atau larangan-larangan (*verbod*). Norma hukum memuat keharusan contohnya, keharusan untuk menolong seseorang yang terancam keselamatan jiwanya (pasal 531 KUHP). Norma hukum yang memuat larangan contohnya, larangan mencuri (KUHP 362), larangan membunuh (KUHP 338).

2. Sanksi

Sanksi merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindarkan. Sanksi merupakan tindakan memaksa untuk menjamin perbuatan manusia yang dikehendaki oleh peraturan hukum. Dalam hukum pidana terdapat dua jenis hukuman sebagai sanksi, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok tersebut meliputi:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Hukuman tambahan meliputi:

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

3. Delik

Dalam hukum pidana istilah delik atau "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana terjadi dengan

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan. Di pihak lain, tindak pidana dapat terjadi juga karena diabaikannya untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, seperti keharusan dalam menolong seseorang yang jiwanya dalam keadaan terancam atau keharusan memenuhi panggilan pengadilan untuk di dengar kesaksiannya dalam sidang pengadilan. Beberapa macam jenis delik, antara lain:

a. Delik formal

Delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

b. Delik material

Delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. Delik komisi

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang.

d. Delik omisi

Delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut undang-undang, yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan.

e. Delik kesengajaan

Delik yang mengandung unsur kesengajaan

f. Delik kelalaian

Delik yang mengandung unsur kelalaian.

g. Delik aduan

Delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan

h. Delik biasa

Delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan

- i. Delik umum
Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang
 - j. Delik khusus
Delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja
4. Tanggungjawab
Ada dua jenis tanggungjawab, yaitu tanggungjawab absolut dan tanggungjawab atas dasar kesalahan. Tanggungjawab absolut ialah menghubungkan sanksi dengan perbuatan tanpa memperhitungkan hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Jika sanksi dilekatkan hanya kepada delik yang diberi syarat psikologis maka disebut sebagai tanggungjawab atas dasar kesalahan.
5. Kewajiban
Kewajiban hukum menunjuk hanya kepada individu terhadap siapa sanksi ditujukan dalam hal dia melakukan delik. Menurut hukum dia diwajibkan menghindari delik, jika itu berupa tindakan positif maka dia diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan tersebut jika delik itu berupa kelalaian untuk melakukan suatu tindakan tertentu maka dia diwajibkan untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, kewajiban hukum adalah untuk menghindari delik adalah kewajiban si subjek untuk mematuhi hukum.
6. Hak hukum
Orang membuat perbedaan di antara dua macam hak, yaitu:
Just in rem, yaitu hak atas suatu barang
Just in personal, yaitu hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut suatu cara tertentu, yaitu hak atas perbuatan orang lain.

D. Lembaga Penegak Hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk lembaga penegakan hukum (*law enforcers*), antara lain:

1. Kepolisian

Kepolisian ialah alat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negara. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.

Wewenang penyelidik:

- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Menurut pasal 6 UU No. 8/1981 yang bertindak sebagai penyidik, yaitu Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahaan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyelidikan
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Berdasarkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1991 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia” pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan diselenggarakan oleh:

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas syarat (yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh materi kehakiman)

3. Kehakiman

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi, Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus, perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Menurut pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 14 Tahun 1970 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Bab VIII

PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

A. Pelapisan Soslai

Setiap masyarakat yang telah atau sedang menjalani masa transisi akan menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi oleh gejala-gejala dan masalah-masalah khusus, berkenaan dengan situasi geografis, ekonomis dan politis. Salah satu diantaranya adalah terjadinya pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dari gerak perubahan tersebut. Dari situasi semacam ini dapat diamati dan dipahami adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menciptakan golongan sosial terkemuka (elite), serta kegiatan golongan sosial tersebut dalam menjalankan transformasi masyarakat menjadi bangsa yang modern.

Perubahan masyarakat tradisional ke arah modern menimbulkan pergeseran peran serta fungsi dan lembaga-lembaga lama ke yang baru. Ada yang mempertahankan *status quo* dan memandang perubahan sebagai ancaman, dilain pihak terdapat golongan elite baru yang melancarkan pembaharuan. Pergeseran-pergeseran tersebut melahirkan sejumlah teori pelapisan sosial, ada yang menganggap sebagai sesuatu yang wajar, fungsional dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya pelapisan memacu kepada urutan atau tatanan yang hierarkis seperti tinggi-rendah, “unggul-biasa”, “priyayi-wong cilik”, “kaum ningrat-rakyat jelata”, selalu tercakup dalam lapisan sosial. Dan perbedaan itu juga mencerminkan pola masyarakat (social structure), masyarakat mengatur kedudukan dan peranan pelaku sosial sesuai dengan pola-pola tersebut.

Indonesia menjalani masa penjajahan selama 350 tahun yang penuh dengan penderitaan, menguatkan perasaan kesetiakawanan dan kesadaran akan kesamaan derajat. Demikianlah tidak henti-hentinya masyarakat dunia manapun memperjuangkan kesamaan derajat,

mengakui kelayakan martabat manusia, manusia adalah ukuran bagi sejalannya (antroposentris). Banyak tradisi yang mempengaruhi jalan pemikiran manusia seperti sumbangan Yunani, Islam (teosentris), tradisi humanistik, sampai kepada piagam-piagam mengenai hak-hak asasi manusia dalam kelayakan martabat, nilai pribadinya dan persamaan hak dalam mengusahakan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dan kebebasan luas.

Oleh karena itu perlu kejelasan tentang pelapisan sosial dan persamaan derajat, elite dan masa, baik dalam kegiatan maupun sebagai cita-cita atau hubungan antara keduanya. Agar diketahui dimana letak kewajaran fungsi dan “rekontruksi” masyarakat, atau generasi-generasi mendatang selamat, terhindar dari bencana konflik dan antagonisme.

Sebab asasi mengapa ada pelapisan sosial dalam masyarakat bukan saja karena ada perbedaan, tetapi karena kemampuan manusia menilai perbedaan itu dengan menerapkan berbagai kriteria. Artinya menganggap ada sesuatu yang dihargai, maka sesuatu itu (dihargai) menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai dapat berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam beragama, atau keturunan keluarga yang terhormat.

Tingkat kemampuan memiliki sesuatu yang dihargai tersebut, akan melahirkan lapisan sosial yang mempunyai kedudukan atas dan kedudukan rendah.

Proses terjadinya sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, atau sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sistem lapisan sosial yang sengaja disusun biasanya mengacu kepada pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal. Agar dalam masyarakat manusia hidup dengan teratur, maka kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi dengan teratur dalam suatu organisasi vertikal atau horizontal. Bila tidak, kemungkinan besar terjadi pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat.

Sifat dari sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Yang bersifat tertutup tidak

memungkinkan pindahnya orang seorang atau suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya ke atas ataupun ke bawah. Keanggotaan dari suatu lapisan tertutup, diperoleh melalui kelahiran. Sistem lapisan tertutup dapat dilihat pada masyarakat yang berkasta, dalam suatu masyarakat yang feodal, atau pada masyarakat yang sistem pelapisannya ditentukan oleh perbedaan rasial. Pada masyarakat yang sistem pelapisannya terbuka, setiap anggota mempunyai kesempatan buat berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik pelapisan sosial, atau kalau tidak beruntung, dapat jatuh ke lapisan bawahnya.

B. Kelas Sebagai Dimensi Pelapisan Sosial

Karl Marx beranggapan, bahwa masyarakat dan kegiatan-kegiatannya pada dasarnya merupakan alat-alat yang terorganisasi agar manusia dapat tetap hidup. Disana kelas merupakan kenyataan dalam masyarakat yang timbul dari sistem produksi, akibat ada anggota yang memiliki tanah dan alat-alat produksi, dan yang tidak mempunyai serta hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi. Kriteria lainnya ialah tingkat kebebasan pribadi sebagai pemisah antara kelas-kelas yang seharusnya, tetapi hanya dengan memiliki kriteria pemilikan alat produksi menjadi termasuk dalam kelas yang sama. Misalnya dibedakan antara budak dan proletar, yaitu budak menjadi harta atau kekayaan dari kelas lain, sedangkan proletar adalah orang bebas yang dapat menjual tenaga kerjanya. Jadi, kelas dalam hal ini digunakan dalam rangka ekonomi, dan berada dalam pertentangan untuk berebut kekuasaan. Kemudian Marx meramalkan akan terbentuk suatu masyarakat dimana semua kelas (Pengertian Marx) akan lenyap dengan sendirinya. Segala sesuatu yang masih berada diluar landasan produksi hanya mewujudkan lapisan atas yang ideologis saja, misalnya nisbah-nisbah dari sistem-sistem politik dan kehakiman, pandangan-pandangan, teori-teori, kesenian, filsafat dan juga agama. Lambat laun, atau mungkin cepat, semua itu akan

berubah, bersama-sama dengan perubahan-perubahan dalam tata masyarakat dan tata ekonomi.

Kaum protelar diperas tenaganya oleh kaum kapitalis dengan apa yang disebut “nilai lebih”, sebab pekerja memberi nilai kepada majikan dan pembayaran yang diterima pekerja lebih rendah daripada nilai produksi yang dihasilkannya. Kekuatan yang mendorong kaum kapitalis adalah keinginan untuk menambah milik mereka dari adanya persaingan diantara perusahaan-perusahaan. Akibatnya monopoli ada di tangan kaum kapitalis dan perusahaan kecil dan rumah gulung tikar. Jurang diantara yang kaya dan yang miskin akan menimbulkan krisis, dimana produksi melimpah dan daya beli tidak ada. Maka pada saat inilah, menurut Mark kaum proletar akan merebut kekuasaan dengan revolusi, menurut Marx, kaum proletar akan merebut kekuasaan dengan revolusi dan disusul oleh masyarakat tanpa kelas.

Kritik terhadap teori Marx menyangkutmenyangkuat beberapa hal. Dalam terminologi sebenarnya ada perbedaan antara model kelas yang murni, abstrak dan konkret. Model yang murni ialah yang menguasai hak kuasa atas sarana produksi dan nilai lebih, dan mereka yang menguasai langsung melalui pembelian tenaga kerja, serta yang tidak langsung berkat pemilikan tanah maupun modal. Kelas yang konkret ada kelas peralihan yang terbentuk didalam suatu tahap sejarah. Kemudian ada kelas semu seperti petani bebas, di Zaman pertengahan, yang memiliki kepentingan ekonomi tetapi marjinal. Terhadap hubungan-hubungan kelas yang sentral. Dan banyak lagi kelas menurut kualifikasi yang lain, di mana kelas sosial tidak lagi berdasarkan pemilikan sarana-sarana produksi. Hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas dan dalam masyarakat industri modern, pemilik semua produksi tidak penting mereka yang melaksanakan pengendalian atas sarana itu.

Istilah kelas terkadang tidak selalu mempunyai arti yang sama. Ada kalanya yang dimaksud dengan kelas ialah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya didalam suatu

lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Maka pengertian kelas paralel dengan pengertian lapisan, tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu uang, tanah, tanah kekuasaan, atau dasar lainnya. Dalam kajian sosiologi, kelas-kelas dapat hidup dan kerja bersama tanpa pertentangan, dan senantiasa ada sepanjang masa di dalam tiap-tiap masyarakat yang hidup teratur.

Pandang lain terhadap kelas-kelas ada yang menggunakan penilaian fungsional dan historis. Terbentuknya kelas-kelas, menurut aliran fungsional, diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata dan gejalanya dimengerti apabila diketahui riwayat terjadinya seperti dalam abad ke-19, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada awalnya manusia hidup berkelompok tanpa tatanan sosial tertentu. Setiap pribadi merdeka dan sama derajat. Sarana produksi belum tercipta, sehingga penduduk tidak terbagi-bagi atas dasar pemilikan keahlian.
- b. Usaha tani berkembang, sumber daya terbatas sehingga menuntut hadirnya peralatan-peralatan khusus yang pada gilirannya menciptakan kesempatan-kesempatan baru atas penguasaan alat yang tidak setiap orang mampu memilikinya. Yang tidak mampu membeli atau menyewa peralatan mesti bekerja keras atau bekerja bagi yang memiliki. Secara mendasar manusia mulai terbagi, dan prinsip perbudakan mulai merembes menggeser struktur dasar.
- c. Perbudakan berkembang berubah kearah prinsip-prinsip kuli kontrak. Orang yang dulunya budak pelan-pelan bergeser statusnya mengikuti pergeseran pemilikan lahan. Meskipun mereka merdeka, keterikatan pada lahan membuatnya tidak berdaya mengikuti kehendak tuan-tuan tanah. Meski nyawa tetap dibadan, namun bila tanah garapan dijual dan tuan pemilik berganti, maka terbawa pula seluruh kuli yang ada didalam tata usaha pengolahan tanah itu.

- d. Prinsip kuli kontrak memberi kesempatan bagi tumbuhnya benih-benih feodalisme, tata penguasaan ditangan minoritas bangsawan. Buruh menjadi bergantung kepada lahan usaha tempat ia mengandalkan hidupnya. Dirinya terikat kepada aristokrat. Hak-hak yang dimilikinya, baik hak sipil maupun hak sosial etap saja hilang.
- e. Struktur dasar bergeser ke arah prinsip borjuis. Lapisan ini bukan petani, melainkan kelas menengah. Dengan memiliki alat dan sarana-sarana produksi, kelompok ini mampu menguasai industri dan mesin.
- f. Kini kaum borjuis memperoleh keuntungan yang besar. Maka muncul gejala baru, yaitu lapisan ini menjadi embrio sebuah kapitalisme industri. Perkembangan selanjutnya adalah memberi peluang terhadap terjadinya pertentangan kelas.

Dalam ilustrasi historis di atas masyarakat terbagi dalam dua lapisan utama meliputi, struktur dasar yaitu lapisan dibawah sebagai penyebab dan suprastruktur, yaitu lapisan diatas yang kebanyakan berperan sebagai akibat yang ditentukan. Struktur dasar terdiri atas kelompok mapan yang memainkan peranan utama, misalnya feodalisme (pada zaman feodalistik), dan yang lainnya menjadi suprastruktur. Memang yang lainnya selalu menyesuaikan diri dengan indakan, misalnya struktur dasar terkait dengan prinsip-prinsip borjuis, maka lapisan suprastruktur pun akan mengalami perubahan. Dan ini landasannya adalah “pemilikan” yang terdiri dari dua jenis, yakni tunggal (monopoli) dan pemilikan umum (sosial), atau lahirnya prinsip-prinsip sosialisme dan kapitalisme.

C. Kelompok Kedudukan Sebagai Dimensi Pelapisan Sosial

Kedudukan berbeda dean kelas. Kedudukan (status group) adalah lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan. Namun dalam hal pembagian kekuasaan dalam masyarakat, diantara kelas ekonomis dan kelompok kedudukan banyak tali-temalnya. Kedudukan berdasarkan hail pengamatan dari masyarakat yang penilaiannya dapat positif atau negatif. Teori

pelapisan sosial menurut dimensi kedudukan ini merupakan tanggapan Weber terhadap kelas dalam pelapisan sosial. Menurut Weber, status atau kedudukan merupakan hal yang menyangkut gaya hidup, kehormatan dan hak-hak istimewa. Kalau kelas berkaitan dengan produksi, maka kedudukan berkaitan dengan konsumsi barang-barang. Masyarakat dapat berfungsi, bergantung kepada adanya pola-pola kelakuan timbal balik antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Posisi yang saling berhadapan didalam pola-pola kelakuan timbal-balik semacam itu secara teknis disebut “status”. Setiap individu mempunyai banyak kedudukan karena setiap individu ikut serta mengungkap sejumlah pola. Kedudukan berbeda dengan individu yang mendudukinya, yaitu sekumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya dapat diwujudkan dengan perantara. Masyarakat pada umumnya memperkembangkan dua macam kedudukan, yaitu *Pertama* disebut *ascribe status* yaitu kedudukann seseorang tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, diperoleh karena kelahiran, misalnya bangsawan atau kasta. *Kedua* disebut *achieved-status*, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dicapai dengan usaha-usaha yang disengaja (tindakan) sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tiada kedudukan tanpa peranan (role), dan juga sebaliknya. Dalam hal ini peranan merupakan aspek dinamis dari status, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kedudukannya. Kedudukan dan peranan merupakan jalannya individu mewujudkan pola-pola ideal bagi kehidupan sosial pada pengertian individu, sekaligus sebagai “model” pengorganisasian sikap dan kelakuannya.

Kedudukan yg tinggi mempunyai gaya hidup (status symbol) yang tersendiri, sebagai jaminan dan caramenyatakan kedudukan. Gaya hidup bermacam-macam jenisnya, tetapi semuanya bermaksud untuk menyatakan kekhasan kedudukan dibandingkan dengan kedudukan yang lain. Wujud gaya hidup adalah sebagai pola cita rasa dan pola konsumsi. Jaminan hak-hak

istimewa dan monopoli dalam kedudukan, berwujud keeksklusifan seperti “pembatasan lingkungan” pergaulan, pemukiman dan lingkungan hubungan-hubungan lainnya. Gejala tersebut muncul dalam proses perkawinan dengan diadakannya pembatasan, orang cenderung mencari istri atau suami dari lingkungannya “sendiri”. Batas dari kelompok status biasanya tidak tegas, tetapi pada waktu tertentu batas-batas tadi mungkin menjadi kaku sehingga wujudnya seperti kasta. Bila hal itu terjadi, maka kehormatan status menjadi suatu hak istimewa dengan dasar hukum tersendiri. Kondisi ini penting bagi kehormatan status apabila diidentikkan dengan posisi kelas (berlangsung lama) dan perbedaan etik (rasial).

Kelas dan kedudukan memiliki hubungan timbal-balik yang erat karena status berasal dari kelas, dan dalam perkembangan keduanya cenderung bersatu walaupun dapat dibedakan secara analitis. Contoh, partai terbentuk atas dasar kelas dan status, sebagai prototipenya dapat diperhatikan kegiatan ekonomis dan politis dari buruh tani atau kegiatan dari pegawai pemerintah. Organisasi buruh tani atau pegawai pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dan keefektifan organisasinya, dilakukan bersamaan dengan kegiatan untuk memanipulasikan lambang-lambang kedudukan atau status.

D. Teori Fungsional

Davis dan Moore (1945), melihat bahwa pelapisan sosial mempunyai fungsi karena pelaku sosial dalam setiap masyarakat perlu disebar dalam kedudukan tertentu dalam suatu pola masyarakat. Dalam kedudukan-kedudukan tersebut pelaku sosial mempunyai tugas dan memperoleh ganjaran dengan cara-cara tertentu. Perbedaan martabat disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) perbedaan pentingnya fungsi kedudukan dan, (2) perbedaan kelangkaan orang yang dapat menempati kedudukan. Tiap-tiap struktur sosial mempunyai tujuan tertentu dengan berbagai kedudukan-kedudukan, dimana tugas dari berbagai kedudukan tersebut berbeda-beda kepentingannya. Dengan sendirinya kedudukan yang lebih penting secara fungsional dalam struktur

sosial, mempunyai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Kedudukan menuntut semacam keahlian atau kemampuan yang diperoleh mungkin sebagai bakat atau melalui pendidikan, yang kadang sulit didapat. Agar kedudukan-kedudukan yang fungsional penting dan langka tenaganya dapat terisi, maka perlu disediakan imbalan-imbalan sebagai rangsangan dan motivasi untuk berusaha menepati kedudukan seperti itu. Penempatan atau penentuan alokasi imbalan serta hubungan dengan posisi-posisi, sesuai dengan tanggung jawab kolektif yang dibebankan atau dipercayakan sehingga seluruh sistem berjalan secara fungsional dan efektif.

E. Elite, masyarakat, dan kesamaan derajat

Kesamaan derajat sebagai cita-cita, dalam kenyataannya menghadapi struktur masyarakat yang menyangkut perubahan kedudukan golongan-golongan sosial, mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah gerak perubahan seperti yang dirasakan sekarang. Pendapat umum telah bersimpati kepada “demokrasi” didalam berbagai bentuk dan manifestasinya, paling tidak dari segi teori, terutama mengenai persamaan. Derajat dan kesamaan nilai kepribadian manusia. Di lain pihak, kitapun melihat kontradiksi dari prinsip semacam itu pada zaman moderen ini, sehingga timbul kecurigaan terhadap para penentu kebijaksanaan yang dengan terang-terangan atau sembunyi menjalankan siasat keji, yang secara keseluruhan didasarkan atas asas perbudakan, kepentingan perseorangan atau keuntungan pribadi. Umum juga telah bersimpati terhadap usaha meningkatkan penghargaan martabat manusia melalui institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi kontradiksi pun timbul, misalnya negara tidak menjamin kondisi yang dibutuhkan untuk perkembangan individu dan keluarga sendiri, sesuai dengan tujuan semula institusi semacam itu. Kesejahteraan ekonomi, produksi barang sering hanya untuk kekayaan saja.

Kenyataan ini memberikan dorongan timbulnya gerakan-gerakan atau pandangan yang menawarkan tentang pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia, dan terhadap kemerdekaan dasar individu-individu dalam masyarakat Barat, demikian pula Timur, menawarkan pandangan dengan sasaran yang sama, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang masing-masing jauh berbeda. Di Barat perhatian kepada individu-individu tersebut timbul dari pandangan yang *antroposentris*, dimana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu. Di Timur (dalam Islam) pandangannya bersifat *teosentris*, Tuhan adalah Yang Maha Tinggi, dan manusia ada hanya untuk mengabdikan kepadaNya.

Beberapa nilai utama kebudayaan Barat dengan pandangan *antroposentris*, yaitu demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi berpusat pada penghargaan mutlak terhadap manusia. Demokrasi didasarkan pada filsafat tentang manusia sebagai sumber nilai dan kepercayaan, bahwa rakyat jelata sanggup memutuskan dan memilih untuk kepentingan umum. “Kenyataan akan nilai dan keagungan individu (dengan segala keterbatasannya) adalah dasar paling dalam dan pusat demokrasi. “Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) menyatakan:... bahwa semua manusia diciptakan sama, dilengkapi Pencipta dengan hak-hak yang tidak dapat digugat, antara lain hidup, kebebasan dan usaha untuk kebahagiaan. Demikian pula dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, bahwa nilai martabat yang ada dalam diri manusia dan hak-hak yang sama dan tak tergugat dari seluruh anggota keluarga manusia adalah dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian didunia... Jumlah institusi sosial di berbagai negara untuk kesejahteraan dan perkembangan warganya begitu banyak, bantuan sosial, rumah sakit, sanatorium, pusat rekreasi, sekolah, perpustakaan umum, rumah-rumah khusus bagi orang cacat, orang tua, yatim piatu dan lain-lain. Bidang ini banyak dilakukan pula oleh pihak swasta, yayasan-yayasan yang diilhami motif keagamaan atau kemanusiaan, selain yang dikelola oleh negara. Kesejahteraan ekonomi sering menimbulkan kritik karena tujuan kekayaan

melalui matrealistis. Yang ditekankan kultur Barat adalah perspektif “antroposentris” mengenai nasib manusia, melalui otoritas sekuler, seperti negara atau kekuatan yang sedang menguasai negara.

Perspektif Timur (dalam hal ini Islam) bersifat “teosentris”, larangan dan perintah-perintah semuanya bersifat agama. Yang ditekankan dalam Al-Qur’an adalah menjamin transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja diatas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhan kepada kehendak Alloh, sebagai akibat logis doktrin utama “tida ada Tuhan kecuali Alloh, dan Muhammad adala Rasul Alloh”. Mengaku hak-hak dari manusia-manusia yang lain adalah sebuah kewajiban yang diberikan kepadanya oleh hukum agama untuk mematuhi Alloh, Nabi dan tokoh-tokoh yang dipercaya untuk mengatur urusan-urusan negara. Dalam Islam kemenangan tekanan seseorang tidak nmpak kecuali dengan agama. Manusia tidak lagi nampk dalam kelompok tradisional seperti marga atau suku, tetapi menekankankepribadiannya secara perseorangan atau kolektif, berdasarkan kepada Tuhan yang merupakan norma pokok, trasenden dan mutlak. Keseimbangan antara trasenden dan *immanent* memungkinkan keseimbangan antara seseorang dan masyarakat.ketegasan mentafisiklah yang memungkinkan kemerdekaan dalam negara di dunia. Mengatakan Allohu akbar (Tuhan adalah yang Maha Besar) berarti menutup pintu bagi segala macam perbudakan. Ini berarti merealisasikan proklamasi bahwa manusia itu merdeka. Hak-hak manusia atau keluhurannya hanya merupakan akibat yang tidak langsung. Kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan. Kelas, kedudukan dan kasta tidak mendapat tempat dalam struktur sosial, sebab manusia itu terhormat, pertama dalam kedudukannya sebagai makhluk yang dipercaya (paling taqwa) kepada Tuhan: “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu dihadapan Tuhan adalah yang paling taqwa” (Al-Hujarat:13). Ide tentang seorang manusia, kemerdekaannya dan kehormatannya

semua itu sebagai nilai-nilai hanya mempunyai peranan sekunder, tetapi selalu dalam rangka hubungan dengan Tuhan yang transenden. Ide persamaan politik terjamin, sebab hukumnya adalah dari Tuhan dan hasil konsensus masyarakat (ijma) dengan musyawarah Al-Qur'an menghukum tiap-tiap perpecahan atau stratifikasi (pelapisan) sosial: "Sesungguhnya Fir'aun itu sombong diatas bumi, memecah belah rakyatnya dalam kasta. Sungguh ia adalah orang yang merusak" (Al-Qasas:4). "Dan manusia itu sama satu dengan lainnya sebagai gigi sisir, tidak ada kelebihan seorang arab atas orang ajam (bukan arab) melainkan ketakwaan kepada Allah"(Hadis Nabi SAW). Dari segi persamaan material, ditolaknya dengan terang-terangan:"...dan Tuhan telah melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki makan" (AnNahl:71). Mengakui perbedaan kekayaan dan menjamin hak milik pribadi, konsep tentang kekayaan material, pada pokoknya bersifat keagamaan, milik Tuhan dan manusia hanya mempunyai hak pakai. Batasan yuridis mengenai kekayaan adalah harus diperoleh dengan jujur dan zakat (sedekah wajib) membantu retribusi kekayaan. Dalam sistem sosial soko gurunya adalah persamaan. Menolong anggota-anggota masyarakat yang tidak mampu adalah kewajiban, dan akan mengurangi perbedaan material atau pelapisan-pelapisan sosial secara praktis. Manusia adalah terhormat karena bertanggung jawab, dan ketinggian martabatnya atas segala makhluk lain dibuktikan secara teologis. Kalaupun ada sikap oposisi dari ide persamaan dalam sistem sosial, karena menekankan kedudukan pribadi manusia, biasanya bertentangan dengan masyarakat atau lembaga yang ada apabila manusia itu tidak memenuhi perintah ilahi, hilang dinamismenya, dan menjadi beku karena tradisinya. Sikap oposisi ini, baik yang diam ataupun aktif, baik yang bersifat perseorangan ataupun kolektif, tidak pernah ditujukkn pada hukum (Islam), akan tetapi pada aplikasinya. Demikianlah pandangan "teosentris" (Islam) terhadap kesamaan derajat.

Pandangan "antroposentris" dan "teosentris" semuanya adalah cita-cita tentang kesamaan derajat atau persamaan sosial,

yang menawarkan diri untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam tatanan masyarakat. Betapapun gencarnya usaha dari gerakan persamaan sosial dari kedua pandangan tersebut, pada umumnya sulit menghindari diri dari kenyataan. Teori yang menyatakan bahwa pembagian kelas dalam masyarakat merupakan syarat mutlak dalam organisasi sosial, sering digunakan oleh mereka yang mencari pembenaran ideologis untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Menghadapi teori fungsional berarti usaha melenyapkan atau mengubah pembagian kelas akan sia-sia. Kemudian teori yang menyatakan tak dapat dihindarkannya dominasi elite, dan suatu revolusi akan berhasil menggantikan elite yang satu dengan elite yang lainnya, hanya merupakan suatu pembenaran atas kaum elite. Teori lain, bahwa bertahannya dominasi elite bergantung kepada penggunaan manipulasi dan kekerasan. Maka timbul pertanyaan, apakah pembenaran moral bagi ketimpangan sosial dan penggunaan kekuasaan didukung oleh teori sosiologi? . dan apakah benar bahwa semua masyarakat sepanjang sejarah diatur oleh kaum elite (dengan asumsi rapuhnya hakikat kemanusiaan).

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas dan membandingkan realitas dengan pandangan-pandangan tentang kesamaan derajat serta teori-teori pelapisan sosial, perlu mengetahui sejarah tentang pelapisan-pelapisan dan elite masyarakat di Indonesia dengan terlebih dahulu mengkaji pengertian elite itu sendiri.

Yang mengulas secara lengkap tentang elite dan masyarakat adalah T.B.Bottomore dalam bukunya yang berjudul *Elites and society*. Istilah “Elite” pertama kali digunakan dalam abad ke-17 untuk menyambut barang-barang dagangan yang mempunyai keutaman khusus. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi, seperti kesatuan-kesatuan militer yang utama atau kalangan bangsawan atas. Dan menurut pikiran Plato, suatu komunitas harus diperintah oleh individu-individu yang lebih unggul (superior). Hal ini lebih

jelas dalam doktrin kasta Brahma yang mengatur masyarakat Hindu Kuno. Bentuk lain dari agama mempengaruhi teori-teori sosial dalam menyatakan pengertian elite ini, yaitu dalam hubungannya dengan “pilihan Tuhan”.

Definisi elite bertitik tolak dari adanya ketidaksamaan bakat-bakat individual dalam setiap lapisan kehidupan sosial. Lapisan yang lebih tinggi dari suatu masyarakat, kelompok elite, secara nominal terdiri atas kelompok tertentu, yang tidak selalu didefinisikan secara tajam, yang disebut aristrasi, aristokrasi yang bersifat militer, religius komersial, maupun plutokrasi (orang kaya).

Dalam zaman modern, kelompok elite tidak begitu saja ditempatkan di atas seluruh masyarakat, tetapi berhubungan erat dengan masyarakat melalui suatu sub-elite, yaitu suatu kelompok yang lebih besar yang meliputi seluruh “kelas menengah baru”, terdiri atas pegawai negeri, manajer dan karyawan administrasi, ilmuwan, kaum terpelajar dan intelektual. Munculnya elite baru, menurut pergeseran sosiologis maupun psikologis, disebabkan oleh timbulnya kekuatan-kekuatan sosial yang membela kepentingan-kepentingan baru (misalnya kepentingan ekonomis atau teknologis) dalam masyarakat. Istilah “elite” sekarang digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi (alasan apa pun). Teori elite menentang teori kelas dari Marx dan doxtrin sosialis, yang dalam dasa warsa terakhir abad ke sembilan belas mengganti pengertian satu kelas yang memerintah berdasarkan keunggulan kekuasaan ekonomi dan militer, dengan elite, yang berarti suatu kelompok kecil yang memerintah berkenaan dengan keunggulan mutu anggota-anggotanya. Jadi di sini istilah elite adalah pengertian saperioritas.

Masyarakat yang agraris (Jawa) mengacu kepada kepemimpinan, mengenal pelapisan-pelapisan dalam masyarakat. Lapisan bawah adalah “rakyat banyak” atau disebut juga wong cilik atau orang kecil, bukan pegawai, apakah petani, pedagang, tukang. Sedangkan lapisan yang berada di atas, yang langsung

menyangga kedudukan raja, adalah kaum “priyayi” (para yayi, para kerabat raja). Priyayi digolongkan ke dalam berbagai lapisan kepangkatan dan jarak kekeluargaan dengan raja. Sesudah Belanda datang, priyayi ini “diinfiltrasi” dengan siapa saja yang bersedia duduk pada birokrasi pemerintahan jajahan Belanda. Seorang penduduk swasta, meskipun kaya, masih dianggap kecil. Kemakmuran, kekuasaan, dan peradaban terpusat pada golongan pegawai atas (abdi dalem), hamba raja yang masih percaya kepada daya gaib (supranatural) pendahulunya, yang bermanifestasi sebagai dewa penguasa di atas bumi. Dari istana yang dibangun sebagai mikrokosmos alam semesta, kekuasaan mengalir keluar dan turun melalui hierarki para pegawai. Ada dua kriteria dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat: Pertama, prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan darah seseorang dengan pemegang pemerintahan. Kedua, prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh posisi seseorang didalam hierarki birokrasi. Seseorang karena mempunyai salah satu atau kedua kriteria itu, dianggap masuk kedalam golongan elite. Dan yang diluar golongan elite itu dianggap sebagai rakyat kebanyakan. Dari raja kekuasaan mengalir keluar (ke bawah) melalui hierarki pejabat birokrasi yang disebut abdi dalem. Para abdi dalem diberi hak atas tanah dan menarik pajak dari rakyat, sehingga tumbuh struktur sosial baru sistem feodalisme. Sampai abad XIX dan awal abad XX pola-pola tersebut berlangsung ketat, dan oleh pemerintah penjajah belanda dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan negeri ini.

Revolusi kemerdekaan membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk perubahan struktur sosial. Akan tetapi, di daerah yang mempunyai latar belakang sejarah kerajaan agraris, pola tradisionalisme sukar mencair. Kendatipun sistem dan struktur berubah, sifat perilaku elite masih berkesinambungan dengan “bungkus” yang lain dan kemudian orang menyebutnya sebagai gejala tumbuhnya neotradisionalisme. Kenyataan ini mungkin dapat membenarkan

buah pikir T.B.Bottomore tentang “elite dan masyarakat”, seperti dikemukakan diatas.

BAB IX

AGAMA DAN MASYARAKAT

Kaitan agama dengan masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur Nabi dalam mengubah kehidupan sosial, argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan kesadaran akan maut menmbulkan religi, dan sila Ketuhanan Yang Mahaesa agama merupakan tempat mencari makna hidup yang *final dan ultimate*. Kemudian, pada urutannya agama yang diyakininya merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya, dan kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial, dan individu dengan masyarakat seharusnya tidak bersifat antagonis.

Membicarakan peranan agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentu hubungannya erat, memiliki aspek-aspek yang terpelihara. Yaitu pengaruh dari cita-cita agama dan etika, agama dalam kehidupan individu dari kelas sosial dan grup sosial, perorangan dan kelotivitas, dan mencakup kebiasaan dan cara semua unsur asing agama di warnainya. Yang lainnya juga menyangkut organisasi dan fungsi dari lembaga agama sehingga agama dan masyarakat itu berwujud kolektivitas ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, yang mempunyai seperangkat arti mencakup perilaku sebagai pegangan individu (*way of life*) dengan kepercayaan dan taat kepada agamanya. Agama sebagai suatu sistem mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham, ritus dan upacara, serta umat atau kesatuan sosial yang terikat terhadap agamanya. Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya. Kemudian terstrukturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku, seperti banyaknya pendapat agama tetang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi, hari libur, prinsip waris, dan sebagainya. Peraturan agama dalam masyarakat penuh dengan hidup, menekankan pada hal-hal

yang normatif atau menunjuk kepada hal-hal yang sebaliknya dan seharusnya dilakukan.

Karena latar belakang sosial yang berbeda dari masyarakat agama, maka masyarakat akan memiliki sikap dan nilai yang berbeda pula. Kebutuhan dan pandangan kelompok terhadap prinsip keagamaan berbeda-beda, kadangkala kepentingannya dapat tercermin atau tidak sama sekali. Karena ini kebhinekaan kelompok dalam masyarakat akan mencerminkan perbedaan jenis kebutuhan keagamaan. Timbul hubungan dua arah, tidak hanya kondisi sosial saja yang menyebabkan lahir dan menyebarnya ide serta nilai-nilai, tetapi bila ide dan nilai itu telah terlembaga, maka akan mempengaruhi tindakan manusia. Karena itu perlu mempelajari pengaruh struktur sosial terhadap agama, dan juga perlu mempelajari pengaruh agama terhadap struktur sosial.

Dalam proses sosial, hubungan nilai dan tujuan masyarakat relatif harus stabil dalam setiap momen. Bila terjadi perubahan dan pergantian bentuk sosial kultural, hancurnya bentuk sosial dan kultural lama, akan tampil bentuk baru. Dengan demikian ragam kelompok dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial. Setiap kelompok berbeda dalam kepekaan agama dan cara merasakan titik kritisnya. Dalam kepekaan agama berbeda tentang makna, dan masing-masing kelompok akan menafsirkan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Demikian pula berbeda tingkatan merasakan “titik kritis” dalam ketidakpastian, ketidakbudayaan, dan kelangkaan untuk masing-masing kelompok.

Salah satu kasus akibat tidak terlembaganya agama adalah “anomi”, yaitu keadaan disorganisasi sosial dimana bentuk sosial dan kultur yang telah mapan menjadi ambruk. Hal ini, pertama, disebabkan oleh hilangnya solidaritas apabila kelompok lama dimana individu merasa aman dan responsif dengan kelompok lama dimana individu merasa aman dan responsif dengan kelompok tersebut cenderung ambruk. Kedua, hilangnya konsensus atau tumbangnya persetujuan terhadap nilai-nilai dan norma (bersumber dari agama) yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok. Di samping ada gerakan yang menawarkan nilai-nilai dan solidaritas

baru, ada juga tampil pola-pola sosial untuk mencari jalan keluar dari pengalaman yang mengecewakan anomi, menentang sumber yang nyata dan mencoba mengambil upaya pelarian yang telah disediakan oleh situasi, seperti narkotika, alkohol, kelompok *hippies*, komunikasi nonverbal, dan upaya pelarian lainnya. Keadaan demikian menimbulkan rangsangan dan kepekaan kelompok agama untuk mempermasalahkan masyarakat nilai dan Solidaritas baru yang bersifat keagamaan meskipun, dalam kenyataannya, kaitan agama dengan masyarakat dapat merupakan daya penyatu (sentripetal) atau mungkin berupa daya pemecah (sentrifugal).

A. Fungsi Agama

Untuk mendiskusikan fungsi agama dalam masyarakat ada tiga aspek penting yang perlu dipelajari, yaitu kebudayaan, sistem sosial, dan kepribadian. Ketiga aspek tersebut merupakan kompleks fenomena sosial terpadu yang pengaruhnya dapat diamati dalam perilaku manusia, sehingga timbul pertanyaan, sejauh mana fungsi lembaga agama dalam memelihara sistem, dan sejauh manakah agama dalam mempertahankan keseimbangan pribadi melakukan fungsinya. Pertanyaan itu timbul sebab, sejak dulu sampai saat ini, agama itu masih ada dan mempunyai fungsi, bahkan memerankan sejumlah fungsi.

Sebagai kerangka acuan penelitian empiris, teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang. Manusia mementaskan dan memolakkan kegiatannya menurut norma yang berlaku umum, peranan serta statusnya. Lembaga yang demikian kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial, dimana setiap unsur akan mempengaruhi unsur lainnya, dan akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan. Dalam pengertian lembaga sosial yang demikian, maka agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga.

Teori fungsional dalam melihat kebudayaan pengertiannya adalah, bahwa kebudayaan itu berwujud suatu kompleks dari ide-

ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta gaul satu tata kelakuan, bersifat kongkret terjadi di sekeliling. Dalam hal ini kebudayaan menentukan situasi dan kondisi bertindak, mengatur dengan sistem sosial berada dalam batasan sarana dan tujuan, yang dibenarkan dan yang di larang. Kemungkinan agama dengan referensi transendensi merupakan aspek penting dalam fenomena kebudayaan sehingga timbul pertanyaan, apakah posisi lembaga agama terhadap kebudayaan merupakan suatu sistem.

Manusia yang berbudaya menganut berbagai nilai, gagasan, dan orientasi yang berpola mempengaruhi perilaku, bertindak dalam konteks terlembaga dalam lembaga situasi, dimana peranan dipaksakan oleh sanksi positif dan negatif, memolakan penampilannya, tetapi yang bertindak, berfikir dan merasa adalah individu.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masalah fungsional dalam konteks teori fungsional kepribadian, dan sejauh mana agama mempertahankan keseimbangan pribadi melakukan fungsinya. Kepribadian dalam hal ini merupakan suatu dorongan, kebutuhan yang kompleks, kecenderungan bertindak dan memberi tanggapan serta nilai dan sebagainya yang sistematis. Kepribadian sudah terpola melalui proses belajar dan atas etonominya sendiri. Sebagai ilustrasi sistem kepribadian adalah id, Ego, dan Superego yang ada dalam situasi yang yang terstruktur secara sosial.

Aksimo teori fungsional agama adalah, segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya, karena agama sejak dulu sampai saat ini masih ada, mempunyai fungsi, dan bahkan memerankan sejumlah fungsi. Teori fungsionalis agama juga memandang kebutuhan “sesuatu yang mentransendensikan pengalaman” (referensi transendental) sebagai dasar dari karakteristik dasar eksistensi manusia meliputi : *Pertama*, manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia diluar jangkauannya. *Kedua* kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi

kondisi hidupnya terbatas, dan pada titik dasar tertentu kondisi manusia dalam kaitan konflik antara keinginan dengan lingkungan ditandai oleh keidakberdayaan. *Ketiga*, manusia harus hidup bermasyarakat, dimana ada alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran. Ini mencakup pembagian kerja dan produk. Dalam hal ini tentu masyarakat diharuskan berada dalam kondisi imperatif, yakin ini ada suatu tingkat superordinasi dalam hubungan manusia. Kelangkaan ini menimbulkan deprivasi relatif.

Jadi, seorang fungsionalis memandang agama sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengatasi diri dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan, agama dipandang sebagai mekanisme penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur tersebut. Sumbangan agama terhadap pemeliharaan masyarakat ialah memenuhi sebagian diantara kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh ialah dalam sistem kredit (masalah ekonomi), di mana sirkulasi sumber kebudayaan dari suatu sistem ekonomi bergantung kepada, apakah manusia satu sama lain dapat saling menaruh kepercayaan, bahwa mereka akan memenuhi kewajiban bersama dibidang keuangan. (janji sosial mereka untuk membayar). Dalam hal ini agama membantu mendorong terciptanya persetujuan dan kewajiban sosial, dan memberikan kekuatan memaksa memperkuat atau mempengaruhi adat-istiadat.

Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai, bersumber pada kerangka acuan yang bersifat sakral, maka normanya pun dikukuhkan dengan sangsi-sangsi sakral. Dalam setiap masyarakat sangsi sakral mempunyai kekuatan memaksa istimewa, karena ganjaran dan hukumannya bersifat duniawi dan supramanusiawi dan ukhrowi.

Fungsi agama dibidang sosial adalah fungsi penentu, dimana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Fungsi agama sebagai sosialisasi individu ialah individu pada saat dia tumbuh dewasa, memerlukan suatu sistem nilai sebagai semacam tuntutan

umum untuk (mengarahkan) aktivitasnya dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. Orang tua dimana pun tidak mengabaikan upaya “moralisasi” anak-anaknya, seperti pendidikan agama mengajarkan bahwa hidup adalah untuk memperoleh keselamatan sebagai tujuan utamanya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut harus beribadat secara kontinyu dan teratur dan membaca kitab suci dan berdoa setiap hari, menghormati dan mencintai orang tua, bekerja keras, hidup secara sederhana, menahan diri dari tingkah laku yang tidak jujur, tidak berbuat yang tidak senonoh dan mengacau, tidak berdansa, tidak meminum-minuman keras, dan tidak berjudi. Maka perkembangannya sosialnya terarah secara pasti serta konsisten dengan suara hatinya.

Masalah fungsionalisme agama dapat dianalisis lebih mudah pada komitmen agama. Dimensi komitmen agama, menurut Roland Robertson (1984), diklasifikasikan berupa keyakinan, praktek, pengalaman, pengetahuan dan konsekuensi.

- a. Dimensi keyakinan mengadung perkiraan atau harapan bahwa orang yang religius akan menganut pandangan teologis tertentu, bahwa ia akan mengikuti kebenaran ajaran-ajaran agama.
- b. Praktek agama mencakup perbuatan-perbuatan memuja dan berbakti, yaitu perbuatan untuk melaksanakan komitmen agama secara nyata. Ini menyangkut, *Pertama*, ritual, yaitu berkaitan dengan seperangkat upacara keagamaan, perbuatan religius formal dan perbuatan mulia. *Kedua*, berbakti tidak bersifat formal dan tidak bersifat publik serta relatif spontan.
- c. Dimensi pengalaman memperhitungkan fakta, bahwa semua agama mempunyai perkiraan tertentu, yaitu orang-orang yang benar-benar religius pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan yang langsung dan subjektif tentang realitas tertinggi, mampu berhubungan, meskipun singkat, dengan suatu perantara yang supernatural.
- d. Dimensi pengetahuan dikaitkan dengan perkiraan, bahwa orang-orang yang bersikap religius kan memiliki informasi

- tentang ajaran-ajaran pokok keyakinan dan upacara keagamaan, kitab suci, dan tradisi-tradisi keagamaan mereka.
- e. Dimensi konsekuensi dari komitmen religius berbeda dengan keempat dimensi lainnya. Dimensi ini mengidentifikasi pengaruh-pengaruh kepercayaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan keagamaan di dalam hidup sehari-hari. Terkandung makna ajaran “kerja” dalam pengertian teologis.

Dimensi keyakinan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan dapat diterima sebagai dalil atau dasar analitis, namun hubungan-hubungan antara keempatnya tidak dapat diungkapkan tanpa data empiris. Kaitan agama dengan masyarakat dapat mencerminkan tiga tipe, meskipun tidak menggambarkan sebenarnya secara utuh (Elizabeth K. Nottingham, 1954).

a. Masyarakat yang Terbelakang dan Nilai-nilai Sakral

Masyarakat tipe ini kecil, terisolasi dan terbelakang. Anggota masyarakat menganut agama yang sama, oleh karenanya keanggotaan mereka dalam masyarakat dan kelompok keagamaan yang sama. Agama menyusup kedalam kelompok aktifitas yang lain. Sifat-sifatnya :

- 1) Agama memasukkan pengaruhnya yang sakral kedalam sistem nilai masyarakat secara mutlak.
- 2) Dalam keadaan lembaga lain selain keluarga relatif belum berkembang, agama jelas menjadi fokus utama bagi pengintegrasian dan persatuan dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini nilai-nilai agama sering meningkatkan konservatisme dan menghalangi perubahan.

b. Masyarakat-masyarakat pra-Industri yang sedang Berkembang

Keadaan masyarakat tidak terisolasi, ada perkembangan teknologi yang lebih tinggi dari tipe pertama. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam

tipe masyarakat ini, tetapi pada saat yang sama lingkungan yang saklar dan sekular itu sedikit-banyaknya masih dapat dibedakan. Fase-fase kehidupan sosial diisi dengan upacara-upacara tertentu. Dilain pihak, agama tidak memberikan dukungan sempurna terhadap aktivitas sehari-hari. Agama hanya memberikan dukungan terhadap adat-istiadat, dan terkadang merupakan suatu sistem tingkah laku tandingan terhadap terhadap sistem yang telah disahkan. Nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat menempatkan fokus utamanya pada pengintegrasian tingkah laku perseorangan dan pembentukan citra pribadinya.

c. Masyarakat-masyarakat Industri Sekular

Masyarakat industri bercirikan dinamika dan teknologi semakin berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, sebagian besar penyesuain-penyesuaian terhadap alam fisik, tetapi yang penting adalah penyesuain-penyesuaian dalam hubungan-hubungan kemanusiaan sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai konsekuensi penting bagi agama. Salah satu akibatnya adalah anggota masyarakat semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasarkan penalaran dan efisiensi dalam menanggapi masalah kemanusiaan, sehingga lingkungan yang bersifat sekular semakin luas, seringkali dengan pengorbanan lingkungan yang sakral. Watak masyarakat sekular, menurut Roland Robertson (1984), tidak terlalu memberikan tanggapan langsung terhadap agama. Misalnya pemikiran agama, praktek agama dan kebiasaan-kebiasaan agama peranannya sedikit. Pada umumnya kecenderungan sekularisasi mempersempit ruang gerak kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang terbatas pada aspek yang lebih kecil dan bersifat khusus dalam kehidupan masyarakat dan anggota-anggotanya. Pernyataan diatas menimbulkan pertanyaan, apakah masyarakat sekular akan mampu secara efektif mempertahankan ketertiban umum tanpa kekerasan

institusional apabila pengaruh agama telah semakin berkurang. Barangkali agama akan bereaksi terhadap institusionalisme, impersonalitas, dan birokrasi masyarakat modern yang semakin bertambah. Akan tetapi bukan agama yang menerima nilai-nilai institusionalisme baru, melainkan agama yang bersifat aliran-aliran.

B. Pelebagaan agama

Agama begitu universal, permanen (langgeng), dan mengatur dalam kehidupan, sehingga bila tidak memahami agama, akan sukar memahami masyarakat. Hal yang perlu dijawab dalam memahami lembaga agama adalah, apa dan mengapa agama ada, unsur-unsur dan bentuknya serta fungsi dan struktur agama. Bila ini berhasil dijawab, maka lebih jelas lagi kaitannya agama dengan masyarakat. Tugas ini tidak mudah sebab agama lebih tahan terhadap kajian ilmiah dibandingkan dengan adat dan kebiasaan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pandangan yang emosional dan pikiran yang bias (rational bias).

Kebiasaan pandangan emosional ini akibat agama dengan segala sifatnya melibatkan nilai-nilai dasar yang menyebabkan agama itu hampir tidak mungkin dipandang dengan sikap yang netral. Pengamat biasanya sampai pada kesimpulan, bahwa agama bersifat mengelabui pikiran dan terbelakang, atau menyimpulkan agama bagi penganutnya terbaik dan tertinggi. Bila pengamat tadi menguraikan secara ilmiah, maka ia akan memperlihatkan pandangan yang sifatnya menyalahkan dan membenarkan.

Pendekatan rasional terhadap agama dengan penjelasan ilmiah biasanya akan mengacu dan berpedoman pada tingkah laku yang sifatnya ekonomis dan teknologis, dan tentu kurang baik. Karena dalam tingkah laku unsur rasional akan lebih banyak, dan bila dikaitkan dengan agama yang melibatkan unsur-unsur pengetahuan diluar jangkauan manusia (transedental), seperangkat simbol dan keyakinan yang kuat, hal ini nampaknya keliru. Bila sifat rasional penuh dalam membahas agama yang ada pada

manusia, maka berarti bersifat non agama. Karena itu pendekatan dalam memandang agama hanya sebagai suatu gejala (fenomena) atau kejadian. Ilmuwan yang menganut pandangan ini, juga akhirnya kecewa mengetahui adanya manusia dengan sifat non rasional mutlak atau terus-menerus nonrasional. Akhirnya ilmuwan akan kembali kepada interpretasi biologis, yang menganggap bahwa agama adalah ungkapan perasaan yang bersifat naluri (instink). Sebenarnya pandangan ini sama kelirunya karena tingkah laku agama (menurut penganut pada agama ini) sifatnya tidak rasional, dan kesimpulannya harus berdasarkan naluri. Justru sebenarnya tingkah laku agama yang sifatnya tidak rasional ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Agama melalui wahyunya atau kitab sucinya memberikan petunjuk kepada manusia guna memenuhi kebutuhan mendasar, yaitu selamat di dunia dan di akhirat, di dalam perjuangannya tentu tidak boleh lalai. Untuk kepentingan tersebut, perlu jaminan yang memberikan rasa aman bagi pemeluknya. Maka agama masuk dalam sistem kelembagaan dan menjadi suatu yang rutin. Agama menjadi salah satu aspek kehidupan semua kelompok sosial, merupakan fenomena yang menyebar mulai dari bentuk perkumpulan manusia, keluarga, kelompok kerja, yang dalam beberapa hal penting bersifat keagamaan.

Bermula dari para ahli agama yang mempunyai pengalaman agama dan adanya fungsi diferensiasi internal dan stratifikasi yang ditimbulkan oleh perkembangan agama, maka tampil organisasi keagamaan yang terlembaga yang fungsinya adalah mengelola masalah keagamaan. Adanya organisasi keagamaan ini, meningkatkan pembagian kerja dan spesifikasi fungsi, memberikan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan ekspresif dan adatif.

Pengalaman tokoh agama dan juga merupakan pengalaman kharismatik, akan melahirkan suatu bentuk perkumpulan keagamaan, yang kemudian menjadi organisasi keagamaan terlembaga. Pengunduran diri atau kematian figur kharismatik, akan melahirkan krisis kesinambungan. Analisis yang perlu adalah

mencoba memasukkan struktur dan pengalaman agama, sebab pengalaman agama, apabila dibicarakan, akan terbatas pada orang yang mengalaminya. Hal penting adalah mempelajari “wahyu” atau kitab sucinya, sebab lembaga keagamaan itu sendiri merupakan refleksi dari pengalaman ajaran wahyunya.

Lembaga-lembaga keagamaan pada puncaknya merupakan peribadatan, pola ide-ide dan keyakinan-keyakinan, dan tampil pula sebagai asosiasi atau organisasi. Misalnya pada kewajiban ibadah haji dan munculnya organisasi keagamaan.

Lembaga ibadah haji dimulai dari terlibatnya berbagai peristiwa. Ada nama-mnama penting seperti Adam, Ibrahim, Hajar dan juga syetan; tempatnya adalah Maasjidil Haram, Mas’a, Arafah, Masy’ar, Miria dan Ka’bah yang merupakan simbol penting, ada peristiwa kurban, pakaian ihram dan sebagainya. Adam dan Hawa dalam keadaan terpisah, kemudian keduanya berdoa “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memeri rahmat kepada kami, niscayalah kami termasuk orang-orang yang merugi” (Al Araf:23). Setelah itu Alloh memerintah Adam untuk ibadah haji (pergi ke sesuatu untuk mengunjunginya). Tatkala sampai disuatu tempat (Arafah=tahu, kenal), maka bertemulah ia dengan Hawa setelah diusir dari surga. Sebab itu dalam haji ada ketentuan wukuf (singgah). Nama Ibrahim selalu dikaitkan dengan Ka’bah sebagai pusat rohani agama islam (kiblatnya agama islam). Pada suatu peristiwa Alloh memerintahkan Jibril membawa Ibrahim, Siti Hajar (istrinya), dan Ismail (putranya) yang masih ke Makkah dari Palestine. Disuatu tempat ibrahim atas perintah Alloh supaya meninggalkan istrinya, Hajar, dan anaknya, Ismail. Sepeninggalnya Ismail menangis minta air. Tentu saja Hajar gelisah, maka ia mencari air dari Bukit Shafa ke Bukit Marwa tujuh kali. Setelah itu, dengan kuasa Tuhan, memancarlah air dari kaki Ismail. Sebab itu dalam rukun haji ada sya’I (berlari kecil). Hajar merupakan lambang ibu yang bertanggung jawab, tidak pasrah, perjuangan fisik, dan meniadakan diri tenggelam dalam samudera

cinta. Kurban dikaitkan resmi dengan ibadah haji. Lembaga ini berhubungan dengan sejarah rohani Ibrahim setelah ada perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail, untuk menguji kesempurnaan tauhidnya (monoisme). Sewaktu akan penyembelihan dilaksanakan, syetan sempat menggoda Ibrahim agar Hajar, istrinya dan Ibrahim, anaknya tidak melaksanakan penyembelihannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, sewaktu ibadah haji diwajibkan melempar dengan batu (jumrah). Sewaktu Ismail akan disembelih oleh Ibrahim, ternyata oleh Allah diganti dengan seekor gibas (domba) jantan. Firman Allah:

“*Mengerjakan haji* adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan pergi kesana. Barang siapa yang kafir (terhadap kewajiban haji) maka bahwasanya Allah Maha Kuasa (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta)”. (Al-Qur’an 3:97)./Jadi, kewajiban tersebut esenya adalah evolusi manusia menuju Allah dengan pengalaman agama yang penting. Mengandung simbolis dari sifat “penciptaan adam”, “sejarah”, “keesaan”, dan “umma”.

Organisasi keagamaan yang tumbuh secara khusus semula dari pengalaman agama tokoh kharismatik pendiri organisasi, kemudian menjadi organisasi keagamaan yang terlembaga. Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial Islam yang penting, dipelopori oleh pribadi Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menyebarkan pemikiran Muhammad Abduh dari Tafsir Al-Manar. Ayat suci Al-Qur’an telah memberi inspirasi kepada Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Salah satu *mottonya* ialah, bahwa Muhammadiyah dipandang sebagai “segolongan dari kaum” mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan jahat (ammar ma’ruf nahi’anil munkar). Organisasi agama ini tidak lepas dari tokoh kharismatik Dahlan (diIndonesia) dan Abduh yang memikat Dahlan, terutama dalam praktek lahiriah dan pembaharuan pemikiran (ijtihad) menyangkut masalah fundamental masyarakat dan umat Islam. Demikian pula Nahdlatul Ulama (NU), yang artinya “kebangkitan ulama”, menekan keterikatan pada Mazhab Syafi’i, dan menyeimbangi golongan pembaharu. Semula

organisasi ini tidak mempunyai anggaran dasar (tahun 1926), baru setelah tahun 1927 organisasi ini dirumuskan. Kegiatannya, selain tertib beragama, juga memperbaiki kehidupan sosial masyarakat.

Dari contoh sosial, lembaga keagamaan berkembang sebagai pola ibadah, pola ide-ide, ketentuan (keyakinan), dan tampil sebagai bentuk asosiasi atau organisasi. Pelembagaan agama puncaknya terjadi pada tingkat intelektual, tingkat pemujaan (ibadat), dan tingkat organisasi. Tampilnya organisasi agama adalah akibat adanya “perubahan batin” atau kedalaman beragama, mengimbangi perkembangan masyarakat dalam hal alokasi fungsi, fasilitas, produksi, pendidikan, dan sebagainya. Agama menuju kepengkhususan fungsional. Pengaitan agama tersebut mengambil bentuk dalam berbagai corak organisasi keagamaan.

C. Agama, konflik dan integrasi

Agama dalam kaitannya dengan masyarakat, mempunyai dampak positif berupa daya penyatu (sentripetal), dan dampak negatif berupa daya pemecah (sentrifugal). Agama yang mempunyai sistem kepercayaan dimulai dengan penciptaan pandangan dunia baru yang di dalam konsepsi lama dan pelembagaannya bisa kehilangan dasar adanya. Meskipun ajaran pokok suatu agama bisa bersifat universal, namun mula-mula ditujukan kepada sekelompok orang yang sedikit banyak homogen. Agama menjadi dasar solidaritas kelompok baru yang tertentu.

Perpecahan pun timbul manakala timbul penolakan terhadap pandangan hidup lama atau yang berbeda dengan agama. Perpecahan itu timbul disebabkan oleh klaim agama akan kemutlakan agamanya, dan sering diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang keras dan tanpa kompromi.

Dalam kajian ilmu sosial, tentang daya pemecah agama ini berkaitan dengan akronim SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Artinya mensejajarkan persoalan agama dengan suku, ras dan golongan politik tertentu, atau hal yang rawan, peka

dan tahu untuk dibicarakan. Tetapi dibalik itu semua, demi kajian ilmiah pun mengalami kesulitan dalam menghadapi para “pemeluk teguh”, apabila agama dijadikan ilmiah, idee dan logika internnya sendiri.

Daya penyatu dan pemecah itu berlangsung sejak awal pertumbuhan sampai berkembang dan mekarnya suatu agama guna mencapai sasaran yang lebih tinggi dengan cara “peningkatan” dan “intensifikasi” dalam tubuh masyarakat agama. Sasaran yang lebih tinggi ini sampai pada suatu piramida pemahaman terhadap agama, terwujud suatu kelompok kecil dari kalangan pemeluknya sendiri. Adanya kelompok kecil puncak piramida tersebut, terjalin karena pengalaman keagamaan dan adanya pendalaman dengan rumusan-rumusan ajaran yang lebih tegas serta engorganisasiannya yang ketat. Pada tingkat perkembangan ini, pemecahan diatas tidak lagi bersifat antar agama tetapi intraagama. Agama menciptakan kelompok, dan kelompok mendorong pengembangan (pemahaman) agama. Kelompok yang menemukan bentuk “autentik” dalam peribadatan, mendorong terbentuk kelompok baru dengan “pengenalan diri” secara tegas, dan terciptalah ideologi kelompok disertai proses pengembangannya. Bila memperoleh kemenangan, kelompok tadi dengan leluasa menetapkan hukum dan memaksakan kepemimpinan sehingga timbul pergolakan agama.

Mazhab-mazhab dalam agama merupakan usaha rasionalisasi dan sistematisasi yang berpusat pada tokoh-tokoh sentral, melahirkan teori dan praktek peribadatan, serta kultus tokoh mazhab acapkali lebih banyak menjadi sumber perhatian pemeluk daripada pendiri agama atau “Tuhan”-nya sendiri, sehingga simbol lebih penting daripada fungsi, dan solidaritas lebih utama daripada pemahaman. Perkembangan teologi, yakni pengolahan intelektual pokok-pokok ajaran agama, hanya menyibukkan kaum elite para pemikir agama (teolog), padahal pengikat solidaritas terdapat dalam tata keyakinan yang dasar. Dan perlu diingat, bahwa doktrin teologis yang mempunyai dampak

hanya dipunyai oleh ritus tertentu, yang tumbuh pada individu pengammal rasa nyata dari keagamaannya.

Terlepas dari relevan atau tidaknya pada masa sekarang, hasil enelitian Geertz dalam *The Religion of Java* (1960), masyarakat Jawa secara realistik terpilah tiga menjadi abangan, santri, dan priyayi atas dasar orientasi agama dan tradisi budaya. Meskipun banyak kritik bahwa penggolongan tersebut pada suatu sistem klasifikasi yang sama, tetapi pemilihan abangan dan santri dapat merupakan strukturalisasi masyarakat agama di Jawa atas dasar ketataan menjalan ibadah agama, yang sumbernya dari menemukan atau tidaknya bentuk “otentik” dalam peribadatan. Santri dan abangan merupakan bentukan pengenalan diri secara tegas, terjadi akibat pengalaman keagamaan dan pendalaman disertai rumusan agama yang tegas. Pilah dua tersebut dapat sampai pada konflik intraagama, akibat penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap nilai agama ditunjang banyak ideologis, sistem stratifikasi sosial yang berubah, dan mobilitas status cenderung memaksakan adanya kontrak diantara individu.

Mengenai agama dan stratifikasi sosial, pengertiannya terletak pada “kecenderungan keagamaan” masing-masing kelas atau lapisan masyarakat. Misalnya dalam menentukan arah, ada yang menuju pada keselamatan, etika rasional, etika pembalasan dan “etika teologis”. Konflik dalam lapisan sosial ini ada, tetapi biasanya ada pindahan konflik ke tingkat ekonomi atau politik. Agama dan integrasi sosial terwujud dalam ajaran tidak dibenarkan memaksakan keyakinan dan kepercayaannya kepada orang lain yang berbeda keyakinannya.

Mekanisme sosial lain, selain dari sumber ajaran agama itu sendiri, ialah integrasi sosial didukung oleh adanya perasaan berkebudayaan satu seperti peringatan hari besar. Dari segi pola keagamaan biasanya tidak terwujud secara langsung dalam bentuk sosial secara murni dan sederhana, tetapi banyak likunya, ada janji-janji kepada kelas, tetangga dan sebagainya. Cenderung seimbang, timbul individu dan kelompok “tipe campuran”. Keberadaan

agama tetap harus dilihat peranan positifnya dalam membangun masyarakat, sebab agama dihadirkan kepada umat manusia untuk petunjuk, dan kalau konflik itu ada, jadikanlah rahmat bagi penganutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar Z.A. (Peny.), *Orde Baru*, CV Ramadhani, Solo, 1990.
- Abdurrahman Wahid, *Muslim di tengah Pergumulan*, Leppenas, Jakarta, 1981, hal. 5-15.
- Ali Shariati, *Haji*, Free Islamic Literatures Inc., Bedford, Ohio, 1978, terjemahan Bahasa Indonesia oleh Anas Mahyuddin, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983.
- Ali Syariati, *Peranan Cendekiawan Muslim*, Cetakan I, Shalahuddin Press, Yogyakarta, 1985.
- Almond, G.A., dan Coleman, J.S., Ed., 1960. *The politics of the Developing*. Amerika: Areas, Princeton University Press.
- Althaf Goufthar, *The Challenge of Islam*, Islamic Council of Europe, London, terjemahan Bahasa Indonesia oleh Anas Mahyudin, Penerbit Pustaka, Bandung, 1982.
- Alvin Bertrand, *Basic Sociology, an Introduction to Theory and Method*, Meredith Publishing Company, USA, 1967, Terj.S.Faisal, Bina Ilmu Surabaya, 1980, hal. 29-44.
- _____, "Penelitian Agama di Indonesia" dalam *Penelitian Agama: Masalah Pemikiran*, Editor: Mulyanto Suwardi, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hal. 20-30
- _____, *The Religion of Java (Abangan, Santri, Priyayi)*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Aswab Mahasin, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1983.
- Around Raymond, *Main Currents in Sociological Thought*, I, A Doubleday Anchor Book, New York, 1968.
- Bennet, *The Ecological Transition*, Pergamon Press Inc. New York, 1976, hal. 165.
- Berger, P., L, Luckman, T., *The Social Construction of Reality, Treatise In The Sociology of Knowledge*, Doubleday&Co.Inc., Gardencity, New York, 1966.
- Bodgan, R., Taylor J.C., *Kualitatif dasar-dasar Penelitian*, Terj. Afandi, Usaha Nasional, Surabaya, 1993.

- Bromslaw Malinowski, *A Scientific Theori of Culture an other essays*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1994, hal. 91-119.
- Chalmers, *What id This Thing Called Science?*, University of Quensland Press, Quensland, 1976.
- Charoen, *Symbolic Interactionism*, Prentice Hall Inc., 1979.
- Clifford Geertz, *Involusi Pertanian*, Terj. S. Supomo, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1974, hal. 1-12.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, New York, 1975.
- Cohen, P. dan Arato, *Civil Society and Political Theory*, MIT, USA, 1990.
- Cohen, *Social Work and Social Problem*, New York NSW., 1964
- Conyers, *An Introduction to Social Palnng in The Third Wordl*, John Wiley Sous, 1984.
- Creswell. W J., *Research Design*, Sage Publications, London, 1994.
- Cuff and Payne, *Perspective in Sociology*, George Allen & Unwin, London, 1980, hal. 22-87.
- Dahrendorf, R., *Konflik dan Koflik dalam Masyarakat Industri*, Terj. Alimandan. PT. Rajawali, Jakarta, 1990.
- David Berry, *pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Paulus Wirutomo (Peny.), Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Dawan, *Insan Kamil*, Grafiti pers, Jakarta, 1985, hal. 84-85.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*, Buku I sampai Buku III, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka Jakarta, 1985
- Doyle, P.J., *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, John Wiley & Sons Inc, 1981.
- Effendi Sofyan, *Beberapa Hambatan Struktural Pelaksanaan Pengawasan Legislatif*, dalam Abar Z.A. *Orde Baru*, CV Ramadhani, Solo, 1990.
- Eisenstadt, S.N., *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Terj. Murdono, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991.

- Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society*, Random House Inc., New York 1954, terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abdul Muis Naharong, Penerbit CV Rajawali Jakarta, 1985, hal 31-69.
- Fachry Ali, “Pikiran Pengantar ke Arah Netralisasi Penmgertian Agama”, harian *Kompas* 11 Agustus 1978, Jakarta.
- Farchan Bulkin, “Tentang Paradigma”, *Harian Kompas*, Jakarta, 9 April 1984.
- Fay Brian, *Teori Sosial dan Praktek Politik*, Terj. Murdono, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1986.
- Fazlur Rahman Ansari, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, Risalah, Bandung, 1983, hal.302-303
- Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Fromm, E., *Masyarakat yang Sehat*, Yayasan Obor, Jakarta. 1995.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1977
- Gaffar, A., Partai Politik, *Elite dan Massa dalam Pembangunan Nasional*, dalam Abar Z.A. *Orde Baru*, CV Ramadhani, Solo, 1990.
- Gazalba Sidi, *Asas Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1975, hal.32-62.
- Geertz, C., *Involusi Pertanian*, Yayasan Obor dan IPB, Jakarta, 1976.
- Geller Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil*, Terj. Hasan, Mizan, Bandung, 1994.
- Giddens Anthony, *Capitalism and Modern Social Theory*, Terj. Soeheba Kramadibrata, UIP, Jakarta, hal. 95.
- Grusky, David B., *Social Stratification*, West Vie Press, Oxford, 1994, hal. 79.
- Habermas, J., *Technik Un Wessenchaft als Ideologie*, Terj. Basari, Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1983, hal. 15.

- Hardiman Fransisco Budi, *Kritik Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Harsya W. Bachtiar, Hasan Walinono, H.A. Sallatang, dan Max H. Waney, *Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Ilmu Sosial Dasar*, Konsorsium Antar-Bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Penataran Dosen-dosen ISD se-Indonesia Timur di Solo, 1-13 Agustus 1982.
- Harsya W. Bachtiar, *Problema Sosial*, dalam Penataran Dosen-dosen ISD se-Indonesia Timur di Solo, 1-13 Agustus 1982.
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat 2*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hal. 122-123.
- Hidayat Nataatmadja, *Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia ilmiah*, Iqra, Bandung, hal 75-77.
- Horkheimer, *Critical Theory*, The Seabury Press, New York, 1985.
- Horton P., Hunt. C., *Sociology*, McGraw Hill Inc., Western Michigan University, 1984.
- Hufo F. Reading, *Dictionary of Social Sciences*, Terj. Sahat Simamora, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Huwaydi Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1993.
- Kaelan, M.S. 2007. *Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kingsley Davis, *Human Society*, The McMillan Company, New York (tanpa tahun), hal.509-550.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 149-191.
- Laeyendecker, *orde, Verandering, Ongelijkheid*, terjemahan Baha Indonesia: *Tata, Perubahan dan Ketimpangan*, oleh Sanaekto, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lance Castles, Siyatno, *Birokrasi, Kepemimpinan dan Revolusi Sosial*, Penerbit Hapsara, Surakarta, 1983.
- Lenski, Gerhard E., *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*, New York, 1966.

- Louis Leahy, S.J., *Masalah Ketuhanan Dewasa ini*, Penerbit Yayasan Kanisius, , Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 43-46.
- Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terjemahan Bahasa Indonesia oleh H.M. Rasjidi, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1980
- Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, terjemahan Bahasa Indonesia: *Sosiologi Kontemporer*, Yasogama, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Miriam Budiarto. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Mochtar naim, *Penghayatan Islam*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1981, hal 55-64
- Mukti Ali, “Agama, Universitas dan Pembangunan”, kuliah di IKIP Bandung, 4 Desember 1971.
- Nisbet, RobertA., “*The Study of Social Problems*”, dalam *Contemporary Social Problems* (Robert K. Morten dan Robert A. Nisbet, Ed.), Harcourt Braco and World, New York, 1961, hal. 3-16.
- Parsudi Suparlan, “*Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar*”, Makalah Penataran Dosen-dosen ISD se-Indonesia Timur di Solo, 1-13 Agustus 1982.
- Payung Bangun, “Pelapisan Sosial”, pada Penataran Dosen-dosen Ilmu Sosial Dasar se-Indonesia Timur di Solo, bulan Agustus 1982.
- Reissman, L., “Social Stratification” dalam Neil J. Smelser, Ed.,*Sociology: An Introduction*, A Willey International, New York, 1967, hal 208-268.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, Boston Alyn and Bacon, Inc., 1980.
- Sahetapy, J.E. 1982. “*Hukum dan Masyarakat*”, Buku Penataran Pengujian Ilmu Sosial Dasar Wilayah Indonesia Barat. Solo: Tiga Serangkai.
- Saiful Hadi, *Materi Penataran MKDU Ilmu Sosial Dasar Unpad*, Unpad, Bandung, 1980, hal.2-3

- Sanford Labovitz and Robert Hagedorn, *Introduction to Social Research*, McGraw-Hill Inc., New York City, 1981.
- Satjipto Rahardjo, 2015. "*Hukum Masyarakat dan Penyimpangan Sosial*" Kalah pada Lokakarya Penyusunan Kumpulan Minimal Bahan Peragaan Kuliah Ilmu Sosial Dasar, Konsorsium Antar-Bidang di Universitas Israwijaya, Malang.
- Satono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Simorangkir, J.C.T., Kansil, C.S.T. Rudi Erwin T, 2011. *Aku Warga Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1969.
- Sudharto Ph., Frieda NRH, *Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1984, hal 20-21.
- Tjondronegoro, M.P. dan Soediono, "Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat", Lokakarya Penyusunan Kumpulan Minimal Bahan Peragaan Mata Kuliah ISD Universitas Brawijaya, Malang, 1985.
- To Thi Anh, *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni*, PT Gramedia, Jakarta, 1984

BIODATA PENULIS



Dr. Lue Sudiyono, MM, dilahirkan di Batu Nyiwuh, 16 Februari 1956, tahun 1975 Lulus Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN), tahun 1985 Lulus S1 Sarjana Pendidikan, tahun 1999 Lulus S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, bulan Februari 2012 Lulus S3 Ilmu Sosial konsentrasi Sosiologi Pendidikan, dan tahun 1975 sebagai PNS Guru SD Inpres, tahun 1986 diangkat sebagai Dosen Negeri di Universitas Negeri Palangkaraya (UNPAR), sejak 1990 pindah ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta, dan sejak Januari 2010 sampai sekarang sebagai Dosen Negeri di perbantuan pada IKIP PGRI Wates Yogyakarta.

Jabatan Akademik Lektor Kepala/Pangkat Pembina Tingkat I/IVB. Sudah sertifikasi, mengajar di beberapa perguruan tinggi dan masih aktif menulis artikel dimuat di jurnal-jurnal ilmiah serta masih aktif menulis buku.

BIODATA PENULIS



Yulia Palupi, M.Pd, dilahirkan di Ujung Pandang, 07 Juli 1981, tahun 2004 Lulus S1 Sarjana Teknologi Pendidikan FIP UNY, tahun 2007 Lulus S2 Magister Pendidikan Program Studi Teknologi Pembelajaran UNY, tahun 2012 diangkat sebagai Dosen pada IKIP PGRI Wates Yogyakarta. Jabatan akademik Asisten Ahli / IIIB, mengajar di beberapa perguruan tinggi dan masih aktif menulis artikel dimuat di jurnal-jurnal ilmiah serta masih aktif menulis buku.